

**CORAK PEMIKIRAN A. MALIK FADJAR  
TENTANG PENGEMBANGAN MADRASAH PADA ERA  
GLOBALISASI DI INDONESIA  
(Studi Pemikiran Tokoh Pendidikan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Ilmu Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam (KI)



Oleh:

**ABDULWAHIB**  
**NIM: 3101326**

**FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

Wahyudi, Drs., M.Pd.  
Jl. Beringin Asri A I No. 21  
Beringin Asri Ngaliyan Semarang 50189.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Abdul Wahib.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Abdul Wahib**

NIM : **3101326**

Jurusan : **Kependidikan Islam (KI)**

Judul : **CORAK PEMIKIRAN A. MALIK FADJAR**

**TENTANG PENGEMBANGAN MADRASAH  
PADA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA**

**(Studi Pemikiran Tokoh Pendidikan)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Juli 2008

Pembimbing,

**Wahyudi, Drs., M.Pd.**  
NIP. 150 254 611



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS TARBIYAH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601295

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Abdul Wahib  
Nomor Induk : 3101326  
Judul : Corak Pemikiran A. Malik Fadjar Tentang  
Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi  
Di Indonesia (Studi Pemikiran Tokoh Pendidikan)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

**25 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Tarbiyah.

Semarang, Juli 2008

Ketua Sidang, Dewan Penguji, Sekretaris Sidang,

**Drs. Hasmi Hashona, M.A.**  
NIP. 150 260 673  
Penguji I,

**Siti Tarwiyah, S.S., M.Hum.**  
NIP. 150 290 932  
Penguji II,

**Ahwan Fanani, M.Ag.**  
NIP. 150 327 101

**Drs. Sugeng Ristiyanto, M.Ag.**  
NIP. 150 234 336

Pembimbing,

**Wahyudi, Drs., M.Pd.**  
NIP.150 254 611

## MOTTO

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ  
النَّارِ. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. ﴿البقرة:  
٢٠١-٢٠٢﴾

*“Dan di antara mereka ada orang yang berdo’a: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya”.*  
(QS. Al- Baqarah: 201-202).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Soenarjo, dkk., *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur’an, 1996), hlm. 33.

## PERSEMBAHAN

*Setiap sesuatu di Alam Raya ini ada awal dan akhir-  
Dari awal tidur dan bangunku dan apa yang di antaranya  
adalah Karunia-Mu*

*Aku hanya hamba lemah tanpa apa pun kecuali dari-Mu*

*Sembah dan sujudku Tangisku*

*Berdiri dan berjalanku Kerjaku*

*Pena dan tuliskanmu Upahku*

*Seandainya bisa ku manfaatkan Ridho-Mu*

*Ridho mereka yang menyapihku*

*(Bapak dan Ibuku)*

*Kasih dan Sayang-Mu*

*kasih-sayang saudara darahku*

*(M. Jais dan Ani Rahmawati)*

*Keindahan dan Kebahagiaan-Mu*

*keindahan dan kebahagiaan bersama kekasihku*

*(Luqfatul Hasanah)*

*Kesusahanku musna dengan Kebagusan-Mu*

*kebaikan dan kebagusan saudara-saudara beta-ku*

*hanya dengan mereka aku benamkan wujud dari polahku.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan ke pangkuan beliau Nabi Muhammad SAW., beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, beserta staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan dengan baik selama masa penelitian
3. Prof. Dr. A. Malik Fadjar, M.Sc., selaku tokoh kajian dalam penelitian yang telah memberikan kesempatan untuk berdialog dan wawancara dengan peneliti, dan atas pemikirannya, hingga data yang dibutuhkan dapat di lengkapi dan digunakan sebagaimana mestinya
4. Wahyudi, Drs., M.Pd., selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini
5. Segenap Civitas Akademik IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan layanan dan bimbingan kepada penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan.
6. Sahabat-sahabat dekat penulis, angkatan 2001 yang telah mendahului penulis yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semuanya, penulis mengucapkan terima kasih serta do'a; semoga budi baik semuanya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. *Amiin*.

Akhirnya, semoga apa yang telah penulis rencanakan dan kerjakan mendapat Ridlo Allah SWT. dan dapat bermanfaat bagi seluruh ummat pada umumnya dan diri penulis khususnya.

Semarang, Juli 2008

Penulis.

## **DEKLARASI**

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa: Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, Juli 2008  
Deklarator,

**ABDUL WAHIB**  
NIM: 3101326



## ABSTRAK

**Abdul Wahib** (NIM: 3101326). ”*Corak Pemikiran A. Malik Fadjar Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi Di Indonesia (Studi Pemikiran Tokoh Pendidikan)*”. Skripsi. Semarang: Program Strata I IAIN Walisongo Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam 2008.

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: bagaimana corak pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah pada era globalisasi di Indonesia? Dan bagaimana kebijakan-kebijakan tentang madrasah yang dikeluarkan A. Malik Fadjar untuk menghadapi era globalisasi di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan mendeklarasikan: corak pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah pada era globalisasi di Indonesia dan kebijakan-kebijakan tentang madrasah yang dikeluarkan A. Malik Fadjar untuk menghadapi era globalisasi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer. Namun, penulis memadukannya dengan wawancara (penelitian lapangan), dengan alasan tokoh yang diteliti masih hidup. Maka, jenis penelitian ini adalah kualitatif studi pemikiran tokoh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitin yaitu pendekatan *historis-sosiologis*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah; metode dokumentasi dan wawancara, dengan teknik analisis deskriptif, sintesis dan komparatif yang difokuskan pada *categorical analyze* (suatu analisis untuk menentukan katagori pemikiran seseorang).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa corak pemikiran A. Malik Fadjar adalah: Futuristik, visioner, teo-institutif/ kombinasi. Dan, kebijakan-kebijakan yang A. Malik Fadjar keluarkan adalah kebijakan yang bersifat futuristik, sosialis (mengutamakan kepentingan masyarakat bawah), dan *aplicable*.

Manfaat penelitian ini penulis sampaikan kepada para mahasiswa Fakultas Tarbiyah khususnya yang nantinya akan menjadi pribadi pendidik, sebagai muslim yang taat pada ajaran Islam, sebaiknya perlu mengkaji dan menggali konsep-konsep pendidikan Islam sekaligus mengamalkannya dalam mendidik generasi-generasi mendatang; yaitu dengan mengambil dari pemikiran tokoh pendidikan Islam sehingga dapat diterapkan dan dijadikan pertimbangan pemikiran dalam menentukan arah pendidikan Islam yang baik untuk dikembangkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DEKLARASI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	10
C. Pembatasan Masalah dan Rumusan Permasalahan .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi .....	15
E. Telaah Kepustakaan .....	15
F. Metode Penelitian .....	17

### **BAB II: PENGEBANGAN MADRASAH PADA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA**

A. Pengertian Pengembangan Madrasah .....	24
1. Pengertian Madrasah.....	24
2. Pengembangan Madrasah.....	27
B. Sejarah Singkat Perkembangan Madrasah di Indonesia .....	30
1. Latar Belakang Munculnya pendidikan Madrasah di Indonesia	30
a. Faktor-Faktor Munculnya Madrasah.....	30
b. Tokoh-Tokoh dan Organisasi dalam Pembaruan Madrasah ..	32
2. Perkembangan Madrasah di Indonesia.....	34

a. Madrasah Model.....	40
b. Madrasah Terpadu.....	41
c. Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) .....	41
d. Madrasah Aliyah Program Ketrampilan (MAPK) .....	42
e. Madrasah Wajib Belajar (MWB) .....	42
C. Kebijakan-Kebijakan Pengembangan Madrasah di Indonesia.....	45
1. Kebijakan Madrasah pada Masa Kolonial .....	45
2. Kebijakan Penegerian Madrasah.....	45
3. Kebijakan Madrasah Dalam Undang-Undang SISDIKNAS ....	48
4. Kebijakan Madrasah Dalam Peraturan Pemerintah .....	50
D. Era Globalisasi .....	52
1. Pengertian Era Globalisasi .....	52
2. Peluang dan Tantangan Globalisasi Bagi Madrasah Di Indonesia .....	55

**BAB III : RIWAYAT HIDUP A. MALIK FADJAR DAN PEMIKIRAN  
TENTANG PENGEMBANGAN MADRASAH PADA ERA  
GLOBALISASI DI INDONESIA**

A. Riwayat Hidup A. Malik Fadjar.....	58
1. Latar Belakang Keluarga.....	58
2. Riwayat Pendidikan .....	61
3. Karier dan Prestasi .....	62
a. Menjadi Guru SRN .....	62
b. Menjabat Sekretaris Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang.....	64
c. Menjadi Rektor UMM dan Rektor UMS .....	65
d. Menjabat Ditjen Binbaga Islam Depag RI.....	66
e. Menjadi Menteri Agama RI .....	67
f. Menjabat Menteri Pendidikan Nasional.....	68
g. Menjabat Menko Kesra ad-Interim .....	71
h. Menjadi Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah.....	72
4. Karya-Karya A. Malik Fadjar .....	73

a. Karya Tulis Berupa Buku.....	73
b. Karya Tulis Berupa Makalah dan Sambutan-Sambutan dalam Berbagai Seminar dan Buku.....	74
B. Pemikiran A. Malik Fadjar Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi Di Indonesia.....	77
1. Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan.....	77
2. Madrasah dan Tantangan Era Globalisasi.....	82
a. Makna Harfiah Madrasah.....	83
b. Dimensi Sejarah Dan Budaya .....	85
c. Realitas Dewasa Ini.....	88
d. Kebijakan Menyongsong Era Globalisasi .....	90
e. Membangun Harapan .....	92
C. Kebijakan-Kebijakan Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi.....	93
1. Akreditasi Madrasah .....	96
2. Kebijakan Dan Program.....	98

**BAB IV : ANALISIS CORAK PEMIKIRAN A. MALIK FADJAR TENTANG  
PENGEMBANGAN MADRASAH PADA ERA GLOBALISAASI DI  
INDONESIA**

A. Pemikiran A. Malik Fadjar Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi Di Indonesia .....	100
1. Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan.....	100
2. Madrasah dan Tantangan Era Globalisasi.....	106
a. Makna Harfiah Madrasah.....	108
b. Dimensi Sejarah Dan Budaya .....	110
c. Realitas Dewasa Ini.....	114
d. Kebijakan Menyongsong Era Globalisasi .....	116
e. Membangun Harapan .....	118

B. Kebijakan-Kebijakan Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi.....	119
---	-----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	129
B. Saran-Saran .....	130
C. Kata Penutup .....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS.

## DAFTAR TABEL

**Tabel :**

I. Perkembangan Jumlah Madrasah Tahun 2007 .....	48
--	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia dalam sejarah perkembangannya adalah bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa dan kaya dengan ragam budaya. Bangsa ini telah mengalami proses panjang dalam penemuan, pembentukan, perubahan, peningkatan dan pengembangan nilai. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan dan sumber bagi pembentukan budaya bangsa yang sepanjang sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Agama (Agama Islam).

Amanat Presiden Soekarno ketika melantik K.H. Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama RI yang ke-9, pada tanggal 2 Maret 1962, beliau mengikrarkan bahwa:

“Kedudukan Agama di dalam masyarakat merupakan salah satu unsur mutlak dalam usaha *Nation Building*, baik aspek politik, ekonomi, sosial, kejasmanian dan hubungan Internasioal. Dan salah satu unsur mutlak dalam *Nation Building* Indonesia yang terpenting adalah Agama dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>1</sup>

Perkembangan budaya tersebut berjalan dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh bangsa, baik untuk kehidupan di Dunia maupun kelak di Akhirat. Oleh karena itu, pencarian, pengembangan, pemeliharaan serta penggalian ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta seni dan budaya kepada generasi yang akan datang merupakan sarana yang tidak bebas nilai. Demikianlah, perkembangan tersebut hendaknya mengandung manfaat dan rahmat bagi seluruh bangsa dan umat manusia.

Keragaman budaya yang terdapat pada seluruh elemen masyarakat merupakan kekayaan bagi pembentukan budaya bangsa dalam rangka pengembangan peradaban manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai bangsa yang ber-Bhineka dalam watak, ras, suku, etnik, golongan, agama dan budaya, dan

---

<sup>1</sup> K.H. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 497.

merupakan kekayaan nasional sebagai modal dasar yang tidak sekedar membentuk budaya bangsa, lebih dari itu adalah membentuk kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila.<sup>2</sup> Maka dengan modal tersebut, umat Islam Indonesia sebenarnya hanya memiliki tugas mengembangkan modal sosial (*social capacity*).<sup>3</sup> Dalam hal ini, perhatian yang serius dan semaksimal mungkin perlu ditekankan pada pengembangan sains dan teknologi. Karena, peradaban yang hanya didukung dengan modal budaya merupakan suatu nihilisme. Namun, peradaban Islam yang penuh dengan dasar spiritual, pada saat ini, ternyata tidak lagi menawarkan sendi-sendi yang kokoh dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pewarisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan perlu mempunyai sistem, metode dan pengelolaan yang lebih memadai untuk mewujudkan citra manusia yang seimbang dan berkesinambungan, yaitu melalui Pendidikan. Karena, pendidikan merupakan sebuah proses sekaligus sistem yang bermuara pada pencapaian tujuan tertentu yang dinilai dan diyakini sebagai yang paling ideal.

Bagi Bangsa Indonesia, tujuan ideal yang hendak dicapai melalui Proses dan Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagaimana yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pada Bab II pasal 3 tersurat bahwa:

”Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 24.

<sup>3</sup> Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. XI.

<sup>4</sup> Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 7.



Sedangkan, yang lebih utama sebagai pedoman mutlak dan yang paling ideal dalam tujuan pendidikan Islam adalah sebagaimana terdapat dalam laporan hasil *World Conference On Muslim Education* pertama yang bertempat di Makkah pada tanggal 31 Maret sampai dengan 8 April 1977, di dalamnya disebutkan:

*Education should aim at balanced growth of the total personality of man through the training of man spirit, intellect, the rational self, feelings, and bodily senses. Education should therefore cater for the growth of man in all its aspects: spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic both individually and collectively, and motivate all these aspects toward goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large.* (Pendidikan seharusnya bertujuan menimbulkan pertumbuhan kepribadian total manusia secara seimbang, melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, perasaan, dan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, linguistik baik secara individual maupun kolektif, dan memotivasi semua aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada realisasi kepasrahan mutlak kepada Allah pada tingkat individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya).<sup>5</sup>

Namun yang terjadi dalam Pendidikan Nasional hanyalah sampai pada pengembangan kecerdasan otak, kecakapan keilmuan dan penguasaan keterampilan, tanpa diimbangi dengan pendidikan akhlak, penanaman semangat mengabdikan dan berdedikasi. Pengembangan pendidikan hanya dilakukan secara administratif ketatalaksanaan pendidikan formal, bukan secara fundamental.<sup>6</sup> Sedangkan, Pendidikan Islam dalam menghadapi

---

<sup>5</sup> Abdullah Idi dan Toto Suharto, *op. cit.*, hlm. 49. Dikutip dari Hasan Langgulung, "Asas-Asas Pendidikan Islam", (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), Cet. 2, hlm. 308.

<sup>6</sup> K. H. Saifuddin Zuhri, *Secercah Da'wah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 490-491. Lebih lanjut, K. H. Saifuddin Zuhri menilai bahwa pembaharuan pendidikan nasional terlalu asyik berkonsentrasi pada prioritas komponen, jenjang, mobilitas, teknik, metode, mekanisme dan perundang-undangan pendidikan. Memang semua itu komponen yang tidak boleh diabaikan, namun segi-segi yang bersifat fundamental spiritual yang bakal mencegah ambruknya seluruh bangunan pendidikan nasional, kurang memperoleh prioritas yang seimbang. K.H. Saifuddin Zuhri, *Kaliedeskop Politik di Indonesia*, Jilid II, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 113.

perkembangan zaman tidak dapat menempatkan diri pada posisi strategis, bahkan terkungkung dalam posisi yang *defensive* (hanya bertahan) atau kurang memiliki kemampuan ofesifitas yang tinggi. Pendidikan Islam sering dituduh sebagai sistem pendidikan yang konservatif dan konvensional, sehingga umat Islam tidak bisa berharap banyak akan lahirnya inovasi-inovasi baru.

Mengenai pendidikan modern, Jusuf Amir Feisol menjelaskan bahwa: perlu diselenggarakan pendidikan melalui bidang-bidang humaniora, karena humaniora memberikan kepekaan, keinsyafan dan penghayatan nilai-nilai yang tersimpan dalam ke-Esa-an Tuhan untuk menjadi manusia yang beradab.<sup>7</sup> Berhubungan dengan hal itu juga, A. Malik Fadjar, dengan tegas menambahkan bahwa:

Pendidikan harus di kelola menurut manajemen modern dan futuristik sebagai usaha mengantarkan peserta didik ke posisi-posisi tertentu di masa depan. Yaitu suatu manajemen yang berpotensi membangun manusia profesional-intelektual dan *skilled* dalam hal bagaimana mereka mampu bergaul di tengah-tengah komunitas global secara dinamis, kreatif dan inovatif.<sup>8</sup>

Kritik di atas senada dengan ungkapan Azyumardi Azra bahwa:

Modernisme dan modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia yang berlangsung sejak awal abad ke-20 hingga saat ini, nyaris tanpa melibatkan wacana epistemologi, dan modernisasi sistem serta kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia cenderung diadopsi dan diimplementasikan begitu saja. Oleh karena itu, proses modernisasi tersebut berlangsung secara *ad hoc* (sementara) dan parsial (tidak lengkap), sehingga modernisasi yang dilakukan kemudian cenderung bersifat involutif, yakni sekedar perubahan-perubahan yang hanya memunculkan persoalan baru dari pada terobosan-terobosan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dari segi konsep maupun viabilitas, kelestarian dan kontinuitas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Jusuf Amir Feisal, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>8</sup> Ahmad Barizi, *Holistika Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. IX.

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 40. Tentang corak modernisasi pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, lihat antara lain: Azyumardi Azra, "Pembaharuan Pendidikan Islam: Sebuah Pengantar", dalam Marwan Saridjo, "Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam", (Jakarta: Depag RI, 1996), Deliar Noer, "Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942", (Jakarta: LP3ES, 1996), Burhanuddin Daya, "Gerakan Pembaharuan Dalam Islam Kasus Sumatra

Lebih dari itu, pada kelembagaan pendidikan Islam dalam hal ini adalah madrasah, meskipun dilakukan penyesuaian dengan kecenderungan pendidikan modern, sampai saat ini masih tetap dituntut menampilkan ciri khasnya sendiri, yakni; memperhatikan Ilmu-ilmu Agama secara proporsional. Namun, persoalan yang muncul adalah madrasah kini berada dalam tarik-menarik antara keharusan mempertahankan pengajaran Ilmu-ilmu Agama secara modern sebagai ciri khas yang harus di tunjukkan sebagai wujud keaslian, di satu pihak, dan mengembangkan Ilmu-ilmu Non-Agama, di lain pihak. Sikap yang terlalu konservatif inilah yang menjadikan madrasah terasing atau bahkan lenyap dari perkembangan modern.

Selanjutnya, sikap yang terlalu akomodatif terhadap kecenderungan pendidikan modern (sekuler), akan menjerumuskan madrasah sebagai salah satu dari sekian banyak lembaga pendidikan Islam yang lepas dari nilai-nilai keislaman.<sup>10</sup>

Pada awal perkembangan gagasan modernisasi Pendidikan Islam, setidak-tidaknya terdapat kecenderungan-kecenderungan pokok dalam eksperimen yang berkelanjutan dari para tokoh modernis dan ormas-ormas Islam.<sup>11</sup> Bentuk eksperimen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

*Pertama*, mengadopsi seluruh kurikulum HIS (*Holland's Inlandsche School*) dengan memasukkan pelajaran agama Islam.  
*Kedua*, eksperimen yang dilakukan bertitik tolak dari sistem dan

---

Thawalib”, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), dan Mahmud Yunus, “Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia”, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).

<sup>10</sup> Zakiah Daradjat dalam Maksud, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. viii. Bahwa menjaga karakter keislaman madrasah di satu pihak dan mengembangkan relevansi serta vitalitas kependidikan madrasah di lain pihak adalah dua hal yang menjadi fokus dari proses transformasi pendidikan di Indonesia. Persoalan ini pada dasarnya meniscayakan keharusan untuk melakukan perubahan-perubahan (pembaharuan) terhadap beberapa aspek tertentu dari lembaga pendidikan madrasah dengan tetap menjamin karakter madrasah yang esensial.

<sup>11</sup> Hal ini menimbulkan tarik-menarik dalam menentukan format pengembangan pendidikan Islam antara kecenderungan mempertahankan pengajaran agama dengan menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab dalam model madrasah-pesantren (salaf) dan kecenderungan menyelenggarakan pendidikan umum dengan memasukkan pelajaran Agama Islam dalam bentuk atau model sekolah. Inilah yang secara tidak langsung melahirkan dikhotomi dalam pendidikan. Hal ini mulai terjadi dari abad ke-20 dan sampai saat ini terus berlangsung, yang di antaranya bertujuan mengembangkan *madzhab*, sebagaimana tergambar dalam kasus kaum tua dan kaum muda di Sumatra, dan NU-Muhammadiyah di Jawa.

kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern, khususnya dalam kandungan kurikulum dan teknik serta metode pengajarannya.<sup>12</sup>

Dari eksperimen pertama, ternyata yang terjadi bukan hanya kemerosotan sistem dan kelembagaan Pendidikan Islam, tetapi juga *mandegnya* regenerasi dan reproduksi ulama. Sementara, eksperimen kedua dengan memodernisasi Pendidikan Islam asli Indonesia yang belakangan ini malah dijadikan alternatif dan lebih mengakar kuat dan mendalam, serta lebih *acceptable* bagi masyarakat Indonesia (madrasah), dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sehingga, tidak menghasilkan insan-insan yang beribadah saja (untuk kepentingan Akhirat), tetapi juga diimbangi dengan kecakapan-kecakapan praktis untuk keperluan hidup di Dunia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kerangka ini, bisa dipaahami munculnya persoalan dikotomi Pendidikan (Islam dan Umum). Kedua bentuk eksperimen tersebut di atas nampaknya sampai saat ini terus bergulir. Sehingga dengan jelas dapat dilihat dua arus utama yang dikhotomik dalam pendidikan.

*Pertama*, sistem dan kelembagaan Pendidikan Islam yang sebenarnya merupakan pendidikan umum dengan penekanan seadanya pada aspek-aspek pengajaran Islam. Termasuk dalam kategori ini adalah madrasah -setelah melewati proses panjang dari awal munculnya SKB Tiga Menteri, dan pasca UUSPN 1989- yang secara eksplisit menyatakan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri keagamaan, kemudian dipertegas lagi dengan disahkannya UUSPN No. 20 tahun 2003, hingga sekarang ini dengan berbagai peraturan pemerintah yang berlaku.

*Kedua*, sistem dan kelembagaan pesantren dalam banyak hal telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan zaman.<sup>13</sup> Modernisasi

---

<sup>12</sup> Azyumardi Azra, *op. cit.*, hlm. 36-37.

<sup>13</sup> Maksum mengungkapkan bahwa; perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia selama masa 1966-1998 menunjukkan adanya proses adaptasi dan antisipasi yang tinggi. Lihat Maksum, *op. cit.*, hlm. 2.

pesantren yang terjadi pada awal abad ke-20 dan menemukan momentumnya pada tahun 1970-an, telah banyak mengubah sistem dan kelembagaan pendidikan pesantren. Dalam banyak hal, pada waktu-waktu terakhir banyak pesantren yang tidak hanya mengembangkan madrasah sesuai dengan pola Departemen Agama, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum.<sup>14</sup>

Persoalan lainnya adalah pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya.<sup>15</sup> Indonesia mewarisi pendidikan politik kolonial yang harus dikikis habis dan harus berusaha menghancurkan tradisi-tradisi dan pengertian-pengertian lama serta membangun satu kehidupan atas dasar cita-cita bangsa Indonesia yang tersimpul dalam falsafah Negara (Pancasila).

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, nampaknya telah terkecoh melihat kemajuan sektor ekonomi, industri, dan politik yang didemonstrasikan oleh negara-negara sekuler sehingga terpancing untuk mengadopsi sistem pendidikan sekuler secara apriori. Hal ini menyebabkan hegemoni negara atas pendidikan sangat besar sekali.<sup>16</sup> Padahal, seharusnya pemerintah memberikan kebebasan kepada penyelenggara pendidikan atas

---

<sup>14</sup> Hal ini lebih terdorong oleh faktor psikologis agar pesantren tetap eksis atau mampu mempertahankan jumlah santrinya, lihat A. Qodri Azizy, *Islam Dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 108.

<sup>15</sup> Soegarda Poerbakawatja, "Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka", (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm. 90. Dalam Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 209. Barangkali kita perlu menengok sejarah, bahwa setelah Rasulullah wafat, persoalan yang pertama kali muncul dalam Islam adalah persoalan politik kemudian berkembang menjadi persoalan teologi. Lihat pula Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa dan Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 2. Kemudian hal ini disinyalir mempengaruhi perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam Islam pada masa-masa selanjutnya, yang digambarkan bahwa dominasi kepentingan politik telah menentukan bentuk pendidikan dan corak ilmu pengetahuan yang dikembangkan.

<sup>16</sup> Selama Orde Baru misalnya, peningkatan kualitatif jumlah murid, guru dan fasilitas-fasilitas pendidikan termasuk didalamnya pendidikan Islam yang *noticeable* lebih menampilkan sosoknya sebagai alat indoktrinasi politik kekuasaan dari pada wahana pencerdasan dan pembentukan masyarakat yang demokratis, bermoral dan berkeadilan. A. Qodri Azizy, *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta (Kajian Historis-Normatif)*, Makalah, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 1999), hlm. 1.

dasar kepercayaan dan masyarakat sebagai pengawas langsung terhadap pendidikan tersebut.

Pada saat ini, Bangsa Indonesia tengah memasuki era baru yang bisa kita sebut dengan “Era Globalisasi”. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi, pendidikan tidak mungkin menisbikan apalagi mengabaikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global.

Dalam menuju era globalisasi, bangsa Indonesia harus melakukan reformasi pendidikan, dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis, menuju terwujudnya masyarakat yang modern (*Khoirul Ummah*). Sebagaimana halnya pesan Sayyidina 'Ali bin Abi Tholib R.A. beliau berpesan dalam sebuah hadits: “Didiklah anak-anak kalian dengan hal-hal yang tidak seperti yang telah kalian pelajari diajarkan. Sesungguhnya mereka itu diciptakan dalam zaman yang berlainan dengan zaman kalian diciptakan. (HR. Imam Ibnu Majjah)”<sup>17</sup>.

Untuk itu, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan dan tanggung jawab. Di samping itu, pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan yang mampu memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung kesuksesan ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan berbasis kemasyarakatan yang berwawasan global. Premis untuk memulai pendidikan berwawasan global adalah bahwa informasi dan pengetahuan tentang sisi bagian dunia yang lain, yaitu dengan mengembangkan kesadaran, bahwa keadaan kita akan dapat lebih baik dari sekarang apabila kita memahami hubungan dengan masyarakat lain dan memahami isu-isu global.

---

<sup>17</sup> Mustofa Syarif dan Juanda Abubakar, (eds.), *Visi Pembaruan Pendidikan Islam H. A. Malik Fadjar*, (Jakarta: LP3NI, 1998), hlm., 33.

Dengan gambaran-gambaran tersebut di atas, apa yang tersisa dari aspek kelembagaan dari ciri khas Pendidikan Islam adalah *Boarding System*. *Boarding System* ala pesantren ini ternyata mampu menemukan momentum popularitas baru. Yayasan Al-Azhar dan Yayasan Wakaf Paramadina, misalnya, telah mengadopsi *Boarding System* pesantren untuk mengembangkan sekolah Islam unggulan atau dalam istilah Azyumardi Azra disebut sebagai “Sekolah Elit Muslim”.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, dalam tataran paradigmatik secara operasional, penyelenggaraan Pendidikan Islam selama ini merupakan Pendidikan Islam yang menyesuaikan dengan pendidikan modern, bukan Pendidikan Islam yang benar-benar dijiwai, dilandasi dan dikembangkan berdasarkan atau bersumber dari ajaran Islam. Dalam hal ini, madrasah yang merupakan lembaga pendidikan yang masih di pandang sebagai lembaga pendidikan “kelas dua”,<sup>19</sup> meskipun pada hakikatnya madrasah memiliki banyak keragaman dan keunikan, kekayaan dan kemampuan, keuletan dan keberdayaan dalam menghadirkan dan memproduksi lulusan-lulusan yang berkompeten sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Namun apa yang terjadi dan dirasakan oleh madrasah hingga kurun terakhir tak lain adalah peminat madrasah hanyalah siswa-siswa yang kemampuan inteligensi dan ekonominya pas-pasan. Akibatnya usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan selalu mengalami kesulitan.<sup>20</sup>

Dari hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dikaji secara mendalam pemikiran dan strategi pengembangan Pendidikan Islam (Madrasah) dalam menghadapi era globalisasi di Indonesia oleh tokoh-tokoh pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, penulis memilih mengkaji dan menelaah hasil pemikiran dari seorang Tokoh Nasional yang telah lama berkiprah dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu Prof. Dr. H. A. Malik Fadjar, M.Sc.,

---

<sup>18</sup> Azyumardi Azra, *op. cit.*, hlm. 89.

<sup>19</sup> A. Malik Fadjar, *Madrasah Dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), Cet. 2, hlm. XV.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. XI.

Dengan alasan bahwa; meskipun telah banyak usaha yang dilakukan oleh para pemikir, praktisi dan pelaku pendidikan dan mengkonstruksinya sebagai amunisi memasuki era masa depan, dalam konteks ini, kiranya nama A. Malik Fadjar merupakan salah seorang pakar dan sekaligus praktisi pendidikan di Negeri ini, yang gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan beliau selalu mendapat respon positif bagi kemajuan pendidikan.

Intelektualitas pemikiran beliau dan kapabilitasnya di bidang pendidikan adalah merupakan cerminan sejarah hidup yang diabdikannya pada lembaga-lembaga yang dipimpinnya sehingga mencapai kualifikasi *academic exelence* dan *competitive advantage* di era global.<sup>21</sup>

Beliau juga memandang bahwa madrasah dengan ciri khas dan keunikannya adalah salah satu dari lembaga pendidikan yang dirasakan atau tidak, telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia yang perlu mendapat sorotan pengembangannya untuk masa depan bangsa dalam menghadapi era Globalisasi.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi “**Corak Pemikiran A. Malik Fadjar Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi Di Indonesia (Studi Pemikiran Tokoh pendidikan)**”. Sebelumnya, perlu penulis tekankan bahwa penelitian ini adalah penelitian studi analisis (*analysis study*) yang memusatkan pengkajian pada pemikiran tokoh A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah pada era globalisasi di Indonesia.

Untuk itu, perlu kiranya penulis kemukakan penegasan istilah dari redaksi judul di atas agar bisa dipahami secara operasional dan kongkret. Adapun penegasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Corak Pemikiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*Corak*” berarti: 1) bunga atau gambar (ada yang berwarna-warni) pada kain (tenunan,

---

<sup>21</sup> Ahmad Barizi, *op. cit.*, hlm. 3.



anyaman, dsb.), 2) berjenis-jenis warna pada warna dasar (tt. kain, bendera, dsb.), 3) *ki.*, sifat (paham, macam, bentuk) tertentu.<sup>22</sup> Sedangkan, Kata *pemikiran* berarti: Proses, Cara, perbuatan memikir.<sup>23</sup>

Lebih dari itu, kata yang lebih memahamkan dalam pembahasan ini adalah kata berpikir, yang berarti merujuk kepada kemampuan untuk membedakan, mengidentifikasi dan menunjukkan sesuatu. Adapun kata pemikiran memiliki arti cara atau hasil berpikir.

Di dalam Al-Qur'an, ada banyak kata fikir. Sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra selain dari kata akal. Misalnya:

Kata merenungkan (*tadabbara*) ada 8 ayat, mengerti (*faqiha*) ada 20 ayat, melihat secara abstrak (*nadhara*) ada 30 ayat, berfikir (*tafakkara*) ada 16 ayat, dan kata '*aqola* sendiri di jumpai lebih dari 30 ayat. Lebih lanjut, beliau mengutip Harun Nasution yang mengatakan ayat-ayat yang terdapat di berbagai kata tersebut di atas, mengandung perintah agar manusia mempergunakan akal dan daya pikirnya.<sup>24</sup>

Maka, corak dalam suatu pemikiran dapat diartikan macam-macam bentuk, atau jenis-jenis pemikiran seseorang yang memiliki warna, gaya atau motif, dan paham tersendiri (lain dari yang lain).

## 2. A. Malik Fadjar

A Malik Fadjar adalah seorang tokoh Nasional Indonesia sebagai abdi masyarakat, beliau memiliki nama lengkap Abdul Malik Fadjar. Beliau telah menghabiskan sebagian besar usianya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai tokoh nasional, beliau pernah menjabat beberapa jabatan strategis di Pemerintahan Pusat Republik Indonesia. Seperti: Dirjen Binbaga Departemen Agama RI, Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menko Kesejahteraan Sosial ad-interim, dan sekarang ini, beliau aktif di Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta.

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 2005), Cet. 2, hlm. 220.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 768.

<sup>24</sup> Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 97.

### 3. Pengembangan Madrasah

Kata pengembangan adalah berasal dari kata dasar kembang, yang memiliki arti: 1) Mekar, terbuka atau membenteng (tt. barang yg berlipat atau kuncup), 2) Menjadi besar (luas, banyak dsb), 3) Menjadi bertambah sempurna (tt pribadi, pikiran, pengetahuan dsb), 4) Menjadi banyak (merata, meluas dsb). Sedangkan pengembangan berarti: “proses, cara, perbuatan mengembangkan” dan pengembang adalah ”orang yang membentangkan”.<sup>25</sup>

Sedangkan kata ”Madrasah”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan Agama Islam.<sup>26</sup> Nurul Huda dalam buku *Dinamika Pesantren Dan Madrasah* menuliskan bahwa:

Jika dikaji dari pengertian bahasa, istilah *madrasah* merupakan isim makan (nama tempat), berasal dari kata *darasa*, yang bermakna tempat orang belajar. Dari akar makna tersebut kemudian berkembang menjadi istilah yang kita pahami sebagai tempat pendidikan, khususnya yang bernuansa Islam.<sup>27</sup>

Di lihat dari pengertian di atas maka madrasah berarti tempat untuk mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.<sup>28</sup>

Jadi, pengembangan madrasah dimaksudkan sebagai proses atau cara menjadikan madrasah besar, mekar dan mengembang, dalam arti bertambah banyak dan semakin sempurna dalam mencerdaskan, menghilangkan ketidaktahuan, menghilangkan kebodohan dan melatih keterampilan peserta didik (Siswa).

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hlm. 538.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 694.

<sup>27</sup> Nurul Huda, “Madrasah: Sebuah Perjalanan Untuk Eksis”, dalam Ismail, SM, Nurul Huda, Abdul Kholiq, (eds.), *Dinamika Pesantren Dan Madrasah*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 211.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Kerjasama PSAPM Surabaya dan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004), hlm. 184.

#### 4. Era Globalisasi

Di dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English* di tuliskan bahwa istilah “globalisasi” berasal dari kata “global” yang dalam Bahasa Inggris berarti: *Embracing The Whole of Group of Items* (merangkul keseluruhan kelompok yang ada).<sup>29</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Globalisasi" adalah proses masuknya ke ruang dunia.<sup>30</sup>

Supriyoko, menunjukkan; bahwa dalam globalisasi terdapat saling ketergantungan (*interdependency*) dalam masalah-masalah sosial, politik, dan kultural antar bangsa.<sup>31</sup> Artinya: perkembangan perikehidupan sosial, kultural dan politik suatu bangsa akan saling mengait dengan bangsa lainnya di seantero dunia.

Inti dari makna globalisasi di atas adalah perdagangan bebas dengan ditandai tidak adanya batas negara dan kompetisi atau daya saing tinggi. Negara yang daya persaingannya lemah akan menjadi negara pekerja, dimana para ahlinya datang dari berbagai negara maju, daya saing yang di tandai dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus dan ini berarti kualitas pendidikannya haruslah sangat bagus. Inilah yang merupakan medan jihad bagi pendidikan Islam pada saat ini, yang harus kita hadapi.

#### 5. Studi Pemikiran Tokoh Pendidikan

Studi adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya).<sup>32</sup> Sedangkan tokoh pendidikan adalah sosok, seseorang yang memiliki ciri khas, yang menonjol, populer,<sup>33</sup> tentang pendidikan. Dalam hal ini adalah tentang lembaga pendidikan madrasah. Dengan cara malakukan pemeriksaan secara

---

<sup>29</sup> Abdullah Idi dan Toto Suharto, *op. cit.*, hlm. 102.

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hlm. 366.

<sup>31</sup> Supriyoko, “Pendidikan Politik Di Era Globalisasi”, dalam M. Masyhur Amin dan Ismail S. Ahmad (eds.), *Dialog Pemikiran Islam Dan Realitas Empirik*, (Yogyakarta: LKPSMNU, 1993), hlm. 103.

<sup>32</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hlm. 965.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 987.

konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat memperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.<sup>34</sup>

Jadi, studi pemikiran tokoh pendidikan disini, adalah suatu kajian (penyelidikan ilmiah) tentang perbuatan memikir atau telaah atas hasil pikiran orang cerdas-pandai yang populer tentang pendidikan (Pendidikan Islam Madrasah) yang hasil pemikirannya dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain.

### **C. Pembatasan Masalah dan Rumusan Permasalahan**

#### **1. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa kesulitan dalam menentukan pemerolehan dan pencapaian tujuan penelitian apabila masalah yang di ajukan tidak ada sebuah pembatasan. Oleh karena, masalah yang di ajukan merupakan sebuah permasalahan global, dan kontinu, walaupun dalam bingkai pemikiran seorang tokoh. Maka pembatasan masalah di sini adalah antara lain:

##### **a. Pengembangan Madrasah**

Pengembangan madrasah dimaksudkan adalah madrasah dalam perkembangannya di Indonesia dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kelembagaan antara madrasah dan sekolah, kurikulum, manajemen, dan pengelolaan madrasah. Hal lainnya adalah sejarah perkembangan madrasah, dan peluang serta tantangan madrasah pada era Globalisasi, dalam kebijakan, peraturan pemerintah dan UU Sisdiknas 2003.

##### **b. Era Globalisasi**

Era Globalisasi yang dimaksud adalah perkembangan dunia yang telah melewati abad ke-21 atau bisa di sebut sebagai Millennium ke-3. Masalah globalisasi ini penulis batasi dalam permasalahan perkembangan sosial dan budaya (dengan melewatkan bidang ekonomi,

---

<sup>34</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 103.

politik, dan pertahanan dan keamanan) yang berkembang di Indonesia pasca tahun 2000 sampai sekarang.

## 2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana corak pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah pada era globalisasi di Indonesia?
- b. Bagaimana kebijakan-kebijakan tentang madrasah yang dikeluarkan A. Malik Fadjar untuk menghadapi era globalisasi di Indonesia?

## D. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeklarasikan tentang:

1. Corak pemikiran A. Malik Fadjar dalam hal pengembangan madrasah pada era Globalisasi di Indonesia.
2. Kebijakan-kebijakan tentang madrasah yang dikeluarkan A. Malik Fadjar untuk menghadapi era globalisasi di Indonesia.

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini antara lain adalah:

1. Sebagai bahan masukan kepada Fakultas Tarbiyah sebagai tambahan bahan pustaka, dan
2. Sebagai bahan informasi bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah sebagai calon guru yang nantinya akan terjun di lapangan dan memajukan pendidikan di Indonesia.

## E. Telaah Kepustakaan

Sebagaimana tujuan penelitian ini, bahwa kajian ini memusatkan perhatian pada pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah pada era Globalisasi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis mengakui bahwa penelitian ini bukanlah yang awal, melainkan telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang telah membahas hal tersebut. Di antaranya, penulis menemukan beberapa literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

Buku yang sering dibahas oleh para penulis terdahulu mengenai madrasah, yaitu buku *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Kurun Modern* karya Karel A. Steenbrink, yang mana buku ini merupakan pedoman bagi madrasah selama ini. Karena, sampai saat ini buku inilah yang memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan madrasah. Dalam Buku ini, penulis menemukan kaian tentang madrasah dari sejarah hingga harapan masa depan bagi pendidikan madrasi (Madrasah), yang mana sistem pendidikan madrasah dianggap sebagai sistem pendidikan warisan dari kolonial Belanda.

Teks-teks di dalam buku ini dipandang dapat memberikan kontribusi dan inspirasi serta perspektif-perspektif baru tentang pendidikan Islam yang tidak terbatas hanya pada kelembagaannya, tetapi juga memberikan informasi tentang hal ihwal kurikulum dan bidang-bidang yang menjadi kajian pada lembaga-lembaga pendidikan Islam hingga pada proses pembelajarannya; yaitu proses-proses ke arah konvergensi yang menjembatani dualisme sistem pendidikan di Indonesia dan juga menjadi perhatian pokok oleh penulis nya.

Namun dalam teks buku ini, juga memiliki keterbatasan, antara lain hanya memberikan informasi perkembangan pendidikan Islam hingga pada awal tahun 1970-an, tentang peristiwa-peristiwa tahun-tahun terakhir dan sesudahnya yang memiliki gambaran perubahan-perubahan signifikan belum sempat terekam.

Selain yang tersebut di atas, ada lagi teks-teks yang relatif baru adalah karya Maksun, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. Teks-teks buku ini secara spesifik memberikan uraian tentang perkembangan madrasah baik dari Timur Tengah maupun di Indonesia. Buku ini bahkan mengungkapkan kerangka teoritik pendidikan Islam, perkembangan madrasah di Indonesia, walaupun kurang memadai.

Karya Ahmad Barizi, disertasi yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul *Holistika Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar*, tidak lepas dari kajian penulis. Karena dalam buku ini penulis menemukan beberapa pemikiran A. Malik Fadjar, yang mana dalam buku ini pula hampir keseluruhan pemikiran beliau tentang pendidikan dituangkan.

Dalam penelitian lain, penulis menemukan literatur lain yang membahas tentang madrasah, berupa Skripsi, yaitu skripsi karya Nuril Fuadila (NIM. 3101446) yang berjudul: “*Kurikulum Madrasah di Era Otonomi Daerah di MAN I Semarang*”.<sup>35</sup>

Di dalam skripsi tersebut diterangkan bahwasannya; kurikulum di era desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah, yang diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang kepada daerah untuk mewujudkan pembangunan pendidikan baik menyangkut pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan yang terus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Semenjak kurikulum yang pertama tahun 1968-1973 dan kemudian diberlakukannya SKB tiga menteri, kurikulum disusun menjadi kurikulum tahun 1976 yang disempurnakan menjadi kurikulum tahun 1984. Selanjutnya, pemerintah menetapkan UU Sisdiknas; UU No. 2 Tahun 1989, yang memiliki dampak cukup berarti pada pendidikan madrasah dalam bidang kurikulum madrasah dan sekolah umum.

Sepanjang penyelidikan selanjutnya, belum dijumpai karya-karya penelitian yang membahas pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah. Oleh karena itu, dalam pengkajian ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam mengolah data untuk mengungkap corak pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah pada era globalisasi di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya, penulisan skripsi ini berangkat dari sebuah penelitian. Adapun, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif literer. Penelitian kualitatif sesuai dengan apa yang di definisikan oleh Kirk dan

---

<sup>35</sup> Nuril Fuadila (NIM. 3101446), “*Kurikulum Madrasah di Era Otonomi Daerah di MAN I Semarang*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Preustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2006).

Miller, penelitian kualitatif adalah sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>36</sup>

Namun, ketika dalam pencarian dan pengumpulan data, penulis memadukannya dengan wawancara (penelitian lapangan), dengan alasan tokoh yang diteliti masih hidup. Maka, jenis penelitian ini adalah kualitatif studi pemikiran tokoh.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian seperti dikatakan Vernon van Dyke, sebuah Pendekatan mengisyaratkan sebuah criteria untuk menyeleksi data yang dianggap relevan.<sup>37</sup> Sedangkan, Abdul Aziz menjelaskan hal tersebut sebagaimana: “sebuah pendekatan mencakup di dalamnya standar dan cara kerja atau prosedur tertentu dalam proses penelitian, termasuk misalnya memilih dan merumuskan masalah, menjaring data, serta menentukan unit analisis yang akan diteliti dan lain sebagainya”.<sup>38</sup>

Adapun, pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *histories-sosiologis*. Pendekatan tersebut, penulis gunakan antara lain untuk mencermati kajian yang ada dalam penelitian, yaitu dalam Bab dua. Penulis menggunakan pendekatan *historis*. Pendekatan ini digunakan untuk menggali informasi tentang madrasah (sebelum, saat, dan sesudah) A. Malik Fadjar menjabat Mendiknas.

Pendekatan *Sosiologis* penulis gunakan dalam Bab tiga dan Bab empat, yaitu untuk memahami bagaimana sang tokoh dan kiprahnya dalam kehidupan sosial serta pemikiran-pemikirannya dan untuk memahami esensi dan substansi pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan

---

<sup>36</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 1995), hlm. 36.

<sup>37</sup> Vernon van Dyke, *Political Science: A Philosophical Analysis*, (Stanford: Stanford, University Press, 1960), hlm. 63.

<sup>38</sup> Abdul Azizi SR., “Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus”, dalam Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 18.



madrasah dan kebijakn-kebijakan dalam menghadapi era Globalisasi di Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode:

#### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengabadikan dalam memperoleh data otentik yang bersifat dokumen baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Yang dimaksud dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis,<sup>39</sup> baik itu teks asli maupun hasil wawancara.

Metode tersebut penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pengembangan madrasah dan kebijakan-kebijakan mengenai madrasah oleh A. Malik Fadjar, dengan menggunakan pendekatan *sosiologis, teologis dan filosofis*.

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian yang berupa Kajian pemikiran tokoh, maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun, mengklasifikasikan dan menelaah lebih jauh pemikiran tokoh secara obyektif dan sistematis dengan jalan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta menyintesis bukti-bukti untuk mengungkap fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.<sup>40</sup>

#### b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*interview*) yaitu: metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dengan berlandaskan tujuan penelitian.<sup>41</sup> Melalui

---

<sup>39</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

<sup>40</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 16.

<sup>41</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 67.

metode ini, penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan dan jawaban dari informan oleh penulis dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).

Sesuai jenisnya, wawancara dibagi menjadi:

#### 1) Wawancara Relatif Berstruktur

Wawancara Relatif Berstruktur ialah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan beserta alternatif jawabannya. Namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban. Jawaban yang diberikan subjek tidak berarti tidak dapat keluar dari alternatif yang dibuat oleh peneliti.<sup>42</sup>

#### 2) Wawancara Relatif Tidak Berstruktur.

Wawancara Relatif Tidak Berstruktur ialah identik dengan wawancara bebas. Pedoman wawancara hanya berupa pertanyaan-pertanyaan singkat dengan kemungkinan peneliti dapat menerima jawaban yang panjang.<sup>43</sup>

Dalam hal wawancara ini, penulis menggunakan bentuk relatif berstruktur, dengan teknik; penulis mengajukan pertanyaan yang sudah terstruktur. Kemudian, satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>44</sup>

Wawancara dalam penelitian ini penulis gunakan untuk menggali data tentang biografi A. Mlik Fadjar, karya-karya, dan pemikiran tentang pengembangan madrasah pada era globalisasi di Indonesia yang sebagian telah dituangkan dalam buku *Madrasah Dan Tantangan Modernitas* karya beliau yang telah diterbitkan oleh penerbit Mizan, tahun 1998.

---

<sup>42</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 139.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 230.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka jenis data yang diperlukan adalah data pustaka (data yang tertulis) baik dalam buku maupun dokumen-dokumen lain dan data yang berasal dari wawancara (*Interview*).

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut data asli.<sup>45</sup>

Sumber data primer yang dimaksud adalah karya-karya A. Malik Fadjar, yaitu buku *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, serta data-data yang penulis kumpulkan dari wawancara (*interview*).

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik (tidak asli) karena diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>46</sup>

Sumber data sekunder ini penulis gunakan sebagai data pelengkap atau analisa perbandingan untuk mengetahui kualitas keautentikan pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah.

#### 5. Metode Analisis Data

##### a. Metode Deskriptif

Menurut John W. Best, metode deskriptif adalah usaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada

---

<sup>45</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995), hlm. 80

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat (*effect*) yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.<sup>47</sup>

Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan serta menginterpretasikan secara detail pemikiran A. Malik Fadjar hingga didapat deskripsi yang dapat dengan mudah dicerna dan dipahami.

Kemudian, metode deskriptif ini penulis fokuskan dan tekankan pada bentuk *Categorical Analyze*.<sup>48</sup> Yaitu; suatu jenis kajian yang di gunakan untuk menemukan suatu model tertentu. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yang antara lain adalah untuk menemukan corak pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah pada era Globalisasi.

#### b. Metode Interpretasi

Metode Interpretasi adalah menyelami buku-buku dengan setepat mungkin untuk mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan.<sup>49</sup>

Metode ini, penulis gunakan untuk mengkritisi data atau buku karya A. Malik Fadjar yang memuat pemikiran-pemikirannya tentang pengembangan madrasah, baik mengenai kebijakan-kebijakan, sistem, kelembagaan, guru, kurikulum, manajemen dan pengelolaan madrasah.

#### c. Metode Analisis Sintesis

Menurut Pardoyo, analisis sintesis dimaksudkan untuk menelaah secara kritis, menelaah istilah, definisi yang dikemukakan oleh para tokoh atau pemikir, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk kemudian menemukan definisi atau pengertian baru yang lebih tepat dan lengkap.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> John W. Best, "Research in Education", dalam Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Warseso (Peny.), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasioanl, 1982), hlm. 119.

<sup>48</sup> Hasbi Indra, *Pesantren dan Transformasi Sosial: Studi atas Pemikiran K.H. Abdullah Syafi'i Dalam Bidang Pendidikan Islam*, (Jakarta: PENAMADANI, 2003), hlm. 28.

<sup>49</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

<sup>50</sup> Pardoyo, *Sekularisasi Dalam Polemik*, (Jakarta: Graffiti, 1993), hlm. 14.

Metode ini penulis gunakan untuk menelaah secara kritis terhadap pemikiran A. Malik Fadjar dan tokoh-tokoh lain yang secara implisit mengandung gagasan tentang strategi pengembangan madrasah pada era globalisasi di Indonesia.

#### d. Metode Komparatif

Menurut Aswarni Sudjud, sebagaimana dikutip Suharsimi Arikunto, beliau menyatakan bahwa:

Analisis komparatif akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok dan terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Disamping itu, juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, group atau negara terhadap kasus orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.<sup>51</sup>

Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah pada era globalisasi di Indonesia dengan mengomparasikan atau membandingkannya dengan tokoh lain. Dalam hal komparasi ini, metode tersebut penulis gunakan hanya sebagai wawasan kritis.

---

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 245-246. Sedangkan menurut Suharsimi, metode komparatif adalah cara berfikir dengan cara membandingkan kesamaan pendapat orang, group atau negara terhadap kasus orang, peristiwa atau ide-ide.



## BAB II

# PENGEMBANGAN MADRASAH PADA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA

## A. Pengertian Pengembangan Madrasah

### 1. Pengertian Madrasah

Secara *etimologi*, kata “madrasah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan Agama Islam.<sup>1</sup> Sedangkan di dalam Ensiklopedi Islam di Indonesia, kata madrasah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar “*darasa*” yang artinya “belajar”. Madrasah berarti tempat untuk belajar.<sup>2</sup> Kata *darasa* dengan pengertian “membaca dan belajar”, yang merupakan akar kata madrasah itu sendiri, berasal dari Bahasa Hebrew atau Aramy.<sup>3</sup>

Dalam pengertian lain, di dalam *Wikipedia, the free encyclopedia* dijelaskan:

*Madrasah (Arabic: مدرسة, madrasa pl. madāris) is the Arabic word for any type of school, secular or religious (of any religion). It has been loaned into various other languages. It is variously transliterated as madrasah, madarasaa, medresa, madrassa, etc. In common English usage the word "madrasah" has been taken to refer to an Islamic religious school.*<sup>4</sup> (Madrasah (bahasa Arab: مدرسة, jamaknya *madāris*) adalah kata Arab untuk suatu tipe sekolah sekuler atau religius (untuk suatu Agama). Madrasah ini telah dikembangkan dalam berbagai bahasa, yang telah disalin dengan berbagai kata seperti *madrasah, madarasaa, medresa, madrassa*, dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Depdiknas-Balai Pustaka, 2005), Cet. 2, hlm. 220.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi/ IAIN Jakarta, 1992/1993), hlm. 661. Madrasah juga berarti Aliran atau Madzhab. Secara harfiah kata “madrasah” berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia “sekolah” (yang notabene juga bukan kata asli bahasa Indonesia). Pada umumnya pemakaian kata madrasah dalam arti sekolah, mempunyai konotasi khusus, yaitu sekolah-sekolah Agama Islam. Madrasah mengandung arti tempat atau wahana dimana anak didik mengenyam pembelajaran, dengan maksud di madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, terdorong, terkendali.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <http://www.wikipedia/freeensiklopedia.com/madrasah/html>. Diakses pada: Selasa, 15 Mei 2007.

Dalam kaidah bahasa Inggris kata "*madrasah*" digunakan untuk mengacu pada sebuah sekolah Agama Islam)

Nurul Huda, dalam buku "Dinamika Pesantren Dan Madrasah" menuliskan bahwa:

Jika dikaji dari pengertian bahasa, istilah madrasah merupakan *isim makan* (nama tempat), berasal dari kata *darasa*, yang bermakna tempat orang belajar. Dari akar makna tersebut kemudian berkembang menjadi istilah yang kita pahami sebagai tempat pendidikan, khususnya yang bernuansa Islam.<sup>5</sup>

Sedangkan secara *epistemologi*, madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia yang diusahakan di samping masjid dan pesantren.<sup>6</sup> Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia, lembaga pendidikan ini merupakan lembaga madrasah timur tengah masa modern --karena pengaruh pendidikan barat—yang diisi secara dominan dengan kurikulum keagamaan. Meskipun demikian, karena pengaruh pengaruh politik penjajah, sekolah dan madrasah dipandang sebagai dua bentuk lembaga pendidikan yang berbeda secara dikhotomis: sekolah bersifat sekuler dan madrasah bersifat Islam.<sup>7</sup>

A. Malik Fadjar memaknai madrasah lebih luas lagi dalam buku "Madrasah dan Tantangan Modernitas", beliau menjelaskan bahwa:

Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, dipimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik. Di lembaga ini anak memperoleh pembelajaran hal-ikhwal atau seluk-beluk Agama dan keagamaan. Sehingga dalam pelaksanaannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah Agama.

Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah

---

<sup>5</sup> Nurul Huda, "Madrasah: Sebuah Perjalanan Untuk Eksis", dalam Ismail, SM, Nurul Huda, Abdul Kholiq (eds.), *Dinamika Pesantren Dan Madrasah*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 211.

<sup>6</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Logog Wacana Ilmu, 1999), hlm. 7.

<sup>7</sup> *Ibid*,

Agama, setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa diakui telah mengalami perubahan-perubahan walaupun tidak melepaskan diri dari makna asli sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam.<sup>8</sup>

Secara teknis, yakni dalam proses belajar-mengajar secara formal, di Indonesia madrasah tidak hanya dipahami sepintas sebagai sekolah. Melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni "Sekolah Agama", tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-hal atau seluk-beluk agama dan keagamaan (Agama Islam).

Dari penjelasan di atas, madrasah dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan. Kaitannya dengan pembahasan ini, adalah madrasah sebagai sebuah lembaga yang mengemban visi-misi keislaman (*li tafaqquh fiddin*). Sebagaimana Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat: 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ﴿التَّوْبَةُ: 122﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang Agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah ayat: 122).<sup>9</sup>

Secara spesifik, madrasah bukan hanya lembaga pendidikan atau sekolah yang mengajarkan kepada anak didiknya ilmu-ilmu yang mementingkan keduniaan saja. Namun, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan, mendidik dan sekaligus membekali anak didik dengan ilmu-ilmu yang mementingkan dunia dan akhirat. Karena, tidak sepenuhnya umat Islam semuanya harus menguasai ilmu-ilmu yang

<sup>8</sup> A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), Cet. 2, hlm. 17-19. Lihat pula dalam; Ahmad Barizi (ed.), *Holistika Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 230.

<sup>9</sup> Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI-Yayasan Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 302.



berkepentingan dengan keakhiratan saja, namun mereka harus ada yang menguasai dengan mendalami ilmu-ilmu keduniaan.

Oleh sebab itu, pendidikan Islam haruslah menuju kepada kebaikan jasmani dan rohani demi kebahagiaan perorangan dan kemakmuran masyarakat atau dengan perkataan lain untuk kebaikan dunia dan akhirat, yaitu dengan mendasari potensi anak manusia dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Sehingga terlihat manifestasinya dalam setiap individu muslim yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merusak, fitnah yang membahayakan masyarakat dan ancaman-ancaman yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

## 2. Pengembangan Madrasah

Sebagai sebuah institusi pendidikan, madrasah merupakan institusi yang tumbuh dan berkembang oleh dan dari masyarakat,<sup>10</sup> serta untuk masyarakat yang penuh dengan makna budaya Islami, diakui atau tidak madrasah telah mengarungi perjalanan peradaban yang panjang dalam mewujudkan pembentukan kepribadian bangsa yang penuh dengan perubahan-perubahan, namun madrasah enggan melepaskan diri dari makna asalnya yang sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam.<sup>11</sup>

Pengembangan madrasah erat kaitannya dengan pengembangan potensi kepribadian manusia. Abdul Rachman Shaleh menjelaskan, dalam "Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi", bahwa pengembangan kepribadian manusia meliputi:

- a. Pengembangan iman, yang diaktualisasikan dalam ketakwaan kepada Allah Swt. sehingga menghasilkan kesucian.
- b. Pengembangan cipta, untuk memenuhi kebutuhan hidup materiil dan kecerdasan, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini menghasilkan kebenaran.
- c. Pengembangan karsa, untuk mempunyai sikap dan tingkah laku

---

<sup>10</sup> Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu), hlm. 1.

<sup>11</sup> Mustofa Syarif dan Juanda Abubakar (eds.), *Visi Pembaruan Pendidikan Islam H. A. Malik Fadjar*, (Jakarta: LP3NI, 1998), hlm., 112.

- yang baik (etika, akhlak dan moral). Pengembangan ini menghasilkan kebaikan.
- d. Pengembangan rasa, untuk berperasaan halus (apresiasi seni, persepsi seni, kreasi seni). Hal tersebut menghasilkan keindahan.
  - e. Pengembangan karya, untuk menjadikan manusia terampil dan cakap teknologi yang berdayaguna sehingga menghasilkan kegunaan.
  - f. Pengembangan hati nurani diaktualkan menjadi budi nurani yang berfungsi memberikan pertimbangan (iman, cipta, karsa, rasa, karya) sehingga menghasilkan kebijaksanaan.<sup>12</sup>

Sehingga dalam pengertian pengembangannya, pengembangan madrasah dapat artikan sebagai usaha dalam mewujudkan visi dan misi untuk menjadikan madrasah yang Islami, populis dan berkualitas.<sup>13</sup> Dimaksudkan sebagai proses atau cara menjadikan madrasah besar, mekar dan mengembang, dalam arti bertambah banyak dan semakin sempurna dalam mencerdaskan, menghilangkan ketidaktahuan, menghilangkan kebodohan dan melatih keterampilan peserta didik (Siswa) untuk mempersiapkan dirinya menghadapi tantangan masa depan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh berupa: kesucian iman, kebenaran cipta, kebaikan karsa, kegunaan karya, dan kebijaksanaan hati nurani.

Madrasah dituntut agar selalu berproses untuk menjadi besar, mekar dan berkembang, tersebar luas dan bertambah banyak, serta semakin sempurna dengan tujuan dasar untuk mencerdaskan, menghilangkan ketidaktahuan, melenyapkan kebodohan serta membekali anak didik dengan kompetensi di atas untuk menghadapi tantangan zaman yang penuh dengan perubahan-perubahan di berbagai sektor kehidupan, termasuk juga adalah Globalisasi, dengan tidak meninggalkan dasar Agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

---

<sup>12</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-'Alaq ayat: 5.

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿العلق: 5﴾.

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-'Alaq ayat: 5).<sup>14</sup>

Dalam pengembangannya, madrasah tentu tidak bisa melewatkan hal-hal yang mendasar sebagai sebuah lembaga yang mengelola manusia sebagai aset Agama dan Bangsa dalam menghadapi era Globalisasi. Kebutuhan-kebutuhan yang paling pokok dan mendasar terhadap madrasah adalah sebagaimana terdapat pada visi madrasah, yaitu “Islami, Populis, Berkualitas, dan Beragam”.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, format madrasah dari waktu ke waktu telah mengalami perkembangan hingga semakin jelas sosoknya, dari madrasah yang berawal dari unsur tradisional, swasta, hingga menjadi negeri, dan dari tingkat rendah (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, dan Madrasah Ibtidaiyah), hingga madrasah tingkat lanjutan (Madrasah Tsanawiyah sebagai lanjutan tingkat pertama dan Madrasah Aliyah sebagai lanjutan tingkat atas).

<sup>14</sup> Soenarjo, dkk., *op. cit.*, hlm. 982.

<sup>15</sup> Husni Rahim, *op. cit.*, hlm. 40. Visi pertama Islami; Islami pada madrasah, mencerminkan pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang suasana dan kehidupan para peserta didik, pendidik dan para penghuni lainnya mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Islami merupakan identitas utama yang harus tercermin dalam kurikulum dan proses pendidikan. Visi kedua Populis; Populis pada madrasah merupakan pesan utama dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Sejak periode yang paling dini, madrasah lahir dan berkembang dengan dukungan masyarakat serta terbuka bagi semua lapisan sosial. Populis merupakan gambaran bahwa madrasah itu lahir dan dibesarkan oleh dan untuk masyarakat. Visi ketiga Berkualitas; artinya berorientasi pada mutu. Hal ini merupakan tantangan masa depan yang sangat nyata, karena penghargaan masyarakat terhadap sebuah lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikan itu tercermin dalam dua tataran: proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan menggambarkan suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis serta konsisten dengan program dan target pembelajaran. Sedangkan hasil pendidikan menunjuk pada kualitas lulusan dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika gagal dalam mewujudkan visi ini, madrasah akan tertinggal dari lembaga-lembaga pendidikan lain. Berkualitas dicerminkan pada kegiatan dan nilai akademik yang diperoleh madrasah tersebut. Baik yang dapat dan dilihat dari hasil belajar siswa berupa nilai pada ulangan, kenaikan kelas, ujian akhir (NEM) maupun ujian masuk perguruan tinggi (UMPTN). Visi keempat Beragam; Beragam pada madrasah menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan pendidikan. Madrasah sangat menghargai keragaman bentuk dan jenis pendidikan. Karakter keragaman pada madrasah menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan pendidikan.

## **B. Sejarah Singkat Perkembangan Madrasah di Indonesia**

### **1. Latar Belakang Munculnya Pendidikan Madrasah di Indonesia**

Munculnya Sekolah Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia, yang selanjutnya bisa disebut dengan madrasah adalah Madrasah Adabiyah di Padang Panjang (Sumatra Barat) oleh Syeh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 M. Madrasah di Indonesia jauh berbeda dengan madrasah di pusat lahirnya Agama Islam (di Arab atau di Timur Tengah). Keadaan madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang muncul pada awal abad ke-20.<sup>16</sup> Dengan perkataan lain, lahirnya madrasah di Indonesia adalah hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) yang sudah ada di satu sisi, dengan pendidikan barat (modern) di sisi lain.<sup>17</sup>

Jika di Timur Tengah, madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran agama tingkat lanjut, madrasah di Indonesia lebih mengacu pada lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran Agama tingkat rendah dan menengah. Perkembangannya diperkirakan lebih merupakan reaksi terhadap faktor-faktor yang berkembang dari luar lembaga pendidikan yang secara tradisional telah ada, terutama munculnya pendidikan modern Barat.

#### **a. Faktor-faktor Munculnya Madrasah**

Faktor munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang dan telah berusia satu abad lebih, dalam pandangan Mehdi Nakosteen, dalam buku “Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam”, sebagaimana dikutip oleh Abdullah Idi dan Toto Suharto dalam buku “Revitalisasi Pendidikan Islam”, madrasah muncul karena dua faktor:

##### **1) Faktor internal**

Secara internal madrasah muncul karena proses pendidikan

---

<sup>16</sup> A. Malik Fadjar, *op. cit.*, hlm. 17.

<sup>17</sup> Abdul Rachman Shaleh, *op. cit.*, hlm. 12.

dari lembaga-lembaga sebelumnya yaitu: surau, kuttab, masjid dan masjid khan. Dalam pandangan Mehdi Nakosteen, disebutkan bahwa:

Secara internal, proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan di Kuttab, masjid, dan masjid-khan memiliki beberapa kelemahan, antara lain: *Pertama*, Kurikulum dan fasilitas pada lembaga-lembaga tersebut dipandang belum mampu mendukung terciptanya proses pendidikan yang memadai. *Kedua*, adanya pertentangan antara tujuan pendidikan dan tujuan Agama pada ketiga lembaga tersebut hampir tidak dapat dikompromikan. *Ketiga*, Tujuan pendidikan memiliki konsekuensi pada aktivitas yang cenderung menimbulkan suasana hiruk-pikuk. *Keempat*, kegiatan ibadah (sebagai tujuan Agama) di masjid menghendaki suasana tenang dan penuh kekhusyuan.<sup>18</sup>

## 2) Faktor eksternal

Secara eksternal, kemajuan ilmu pengetahuan menuntut adanya sistem pengajaran bagi mereka yang mencari penghidupan melalui dunia pendidikan.<sup>19</sup> Secara lebih lengkap, Mahmud Yunus, dalam buku Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia, ada empat faktor eksternal yang mendasari munculnya madrasah, yaitu:

- a) Faktor politik. Para penguasa menarik hati rakyat dengan jalan memajukan Agama dan mementingkan pendidikan. Untuk tujuan politis tersebut, penguasa tidak segan-segan mengeluarkan sejumlah besar dana untuk membangun madrasah.
- b) Faktor religius. Para penguasa yang hidup dengan kemewahan bermaksud beramal dan menyiarkan Agama Islam dengan jalan mendirikan madrasah dengan harapan agar mendapat pahala dari Allah.
- c) Faktor ekonomi. Para penguasa dan orang-orang kaya mewakafkan harta mereka untuk pembangunan madrasah, dengan syarat pengelolaannya adalah putera-putera mereka secara turun-temurun. Dengan demikian, kehidupan ekonomi para keturunan tersebut dapat terjamin.

---

<sup>18</sup> Mehdi Nakosteen, "Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam", alih bahasa: Joko S. Kahhar dan Supriyanto, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), Cet. 1, hlm. 62. Terdapat dalam Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 15.

<sup>19</sup> *Ibid.*

- d) Faktor fanatisme. Pertentangan antara kaum Sunni dan Syi'ah membuat masing-masing pihak berlomba mendirikan madrasah sebagai alat untuk memperkuat aliran keagamaan masing-masing.<sup>20</sup>

Atas argumen yang demikian, menciptakan atau mewujudkan lembaga pendidikan lain yang mampu memperbaiki sistem pendidikan Islam serupa madrasah adalah hal penting dan amat diperlukan. Sementara, dasar berdirinya lembaga pendidikan yang disebut madrasah pada dasarnya tidak luput dari beberapa faktor yang mendasarinya, selain dari faktor internal dalam Pendidikan Islam itu sendiri, seperti disebutkan di atas.

- b. Tokoh-Tokoh dan Organisasi dalam Pembaruan Pendidikan Madrasah

Madrasah sebagai institusi pendidikan keagamaan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, sehingga dalam penelusuran perkembangannya kita harus menelusuri dari berbagai jejak pembaruan sistem pendidikan Islam baik yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin-pemimpin Islam, maupun yang dilakukan secara institusional melalui organisasi-organisasi sosial-keagamaan.

Berkenaan dengan pembaruan, Iqbal menyatakan bahwa pola pikir dan sikap pandang kaum Muslim yang menyimpang dan tidak sesuai dengan esensi Islam harus diperbarui. Pembaruan dilakukan dengan cara mengembalikan pola pikir dan sikap pandang kaum Muslim ke pangkal kemurnian Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>21</sup>

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits:

عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال إنّ الله يبعث لهذه الأمة على

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, "Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia", (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), Cet. 4, hlm. 69-71. Terdapat dalam, *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>21</sup> Abdullah Idi dan Toto Suharto, *op. cit.*, hlm. 68. Lebih lanjut penjelasan tentang konsep yang ditawarkan Iqbal dapat dibaca dalam Muhammad Iqbal, "Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam", alih bahasa Ali Audah, dkk. (Jakarta: Tintamas, 1966), Cet. 1, hlm. 158-192.

رأس كلِّ مائة سنة من يجدد لها دينها.<sup>22</sup>

Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda; Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap permulaan seratus tahun seorang atau kelompok yang akan melakukan pembaruan bagi agamanya. (HR. Abi Dawud).

Memang sangat sulit, untuk membuktikan siapa pemimpin, atau lembaga mana yang pertama kali memulai melakukan perubahan substansi dan didaktik-metodik dalam pendidikan Islam, yang diambil dari sistem pendidikan Barat ini.

Oleh karenanya, yang menjadi asal-muasal lahirnya lembaga pendidikan madrasah adalah pembaruan-pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh para tokoh pemimpin Islam di Indonesia dan organisasi-organisasi sosial-keagamaan.

Dari perkembangan sejak awal berdirinya hingga berkembangnya madrasah selanjutnya, secara umum dapat di tandaskan bahwa para tokoh yang berjasa dalam perkembangan madrasah adalah sebagaimana diungkapkan oleh Abdur Rachman Shaleh yaitu:

Di antara para ulama yang berjasa dalam perkembangan madrasah di Indonesia antara lain: Syaikh Abdullah Ahmad (1907) di Padang, K.H. Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, K.H. Wahab Hasbullah bersama K.H. Mas Mansyur (1914) di Surabaya, Rangkayo Rahmah Al-Yunusi (1915) di Padang Panjang, K.H. Hasyim Ashari (1919) mendirikan Madrasah Salafiyah di Tebuireng Jombang.

Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan banyak mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah umum dengan nama, jenis dan tingkatan yang bermacam-macam, antara lain adalah:

- 1) Muhammadiyah (1912) mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin/ Muallimat, Muballighin/ Muballighat dan Madrasah Diniyah.
- 2) Al-Irsyad (1913), mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan

---

<sup>22</sup> Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dalam *Sunan Abu Dawud*, CD-ROM Hadits, No. 3740.

Tahassis

- 3) Mathlaul Anwar di Menes Banten mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah.
- 4) Perhimpunan Umat Islam (PUI) (1977) mendirikan Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Pertanian.
- 5) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) (1928) mendirikan madrasah dengan berbagai nama, di antaranya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Tsanawiyah, Kuliyyah Syariah.
- 6) Nahdlatul Ulama (1926) mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya.<sup>23</sup>

Berangkat dari situlah, maka perkembangan madrasah selanjutnya hingga sekarang dapat dilihat kiprah dan eksistensinya dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sampai saat ini, yang mampu bertahan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman.

## 2. Perkembangan Madrasah Di Indonesia

Pada masa awal berkembangnya Agama Islam di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari bidang pendidikan dan pengajaran. Islam memiliki lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran yang diwariskan dari masyarakat Bangsa Arab pada masa itu.

Kemudian untuk kepentingan pengajaran, menulis dan membaca bagi anak-anak yang sekaligus bisa memberikan pelajaran Al-Qur'an dan Dasar-Dasar Agama Islam, diadakanlah *kuttab-kuttab* yang terpisah dari masjid, agar anak-anak tidak mengganggu ketenangan dan kebersihan Masjid.

Untuk perkembangan selanjutnya, muncullah sistem pendidikan dengan sistem klasikal dan berkelas yang selanjutnya disebut dengan "madrasah". Madrasah atau sekolah Agama yang didirikan pertama adalah madrasah atau sekolah Adabiyah di Padang Panjang (Sumatera Barat),

---

<sup>23</sup> Abdul Rachman Shaleh, *op. cit.*, hlm. 19-20.



oleh Syeih Abdullah Ahmad pada tahun 1909 M.

Kalau dalam sistem pendidikan dan pengajaran sebelumnya dilaksanakan dalam sistem *khalaqah* (duduk bersila di sekitar guru), tidak berkelas dan tidak menggunakan bangku, meja dan papan tulis, maka dalam sistem madrasah ini, pengajaran di laksanakan dalam bentuk klasikal, dalam unit-unit kelas dengan menggunakan perlengkapan-perengkapan sebagai mana dalam kelas-kelas pada sekolah-sekolah yang ada sekarang.

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda, pertumbuhan dan perkembangan sistem pendidikan madrasah tersebut pada dasarnya dipengaruhi dan didorong oleh adanya perkembangan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Kolonial Belanda, dan sekaligus sebagai imbalan terhadap sistem pendidikan Kolonial yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan cita-cita umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Ada beberapa ciri-ciri pokok sekolah umum yang dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial, yaitu:

- a. Pendidikan dibiayai oleh Belanda (sekolah-sekolah umum yang netral terhadap Agama)
- b. Tidak terlalu memikirkan bagaimana cara hidup secara harmonis dalam dunia, tetapi menekankan tentang bagaimana memperoleh penghidupan.
- c. Diselenggarakan berdasarkan kelompok etnis di dalam masyarakat
- d. Diselenggarakan untuk mempertahankan perbedaan kelas dalam masyarakat Indonesia, terutama kalangan masyarakat Jawa
- e. Sebagian besar diarahkan pada pembentukan kelompok elite masyarakat yang bisa digunakan untuk mempertahankan supremasi politik dan ekonomi Belanda di negeri jajahannya.<sup>24</sup>

Dengan demikian, madrasah-madrasah merupakan tandingan terhadap sekolah yang dikembangkan pemerintah Kolonial Belanda. Perkembangannya didukung sepenuhnya oleh swadaya masyarakat Islam

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 663.

di Indonesia.

Melihat perkembangan Pendidikan Islam yang sedemikian, pemerintah Kolonial Belanda tidak tinggal diam. Akhirnya untuk mengontrol dan mengawasinya; dikeluarkanlah *Departement van Onderwijst en Eeredinst* untuk pengajaran Agama di sekolah umum, dan *Departement voor Inlandsche Zaken* untuk pengajaran Agama di lembaga pendidikan Islam (pesantren dan madrasah).<sup>25</sup>

Selain dua departemen di atas, pemerintah Kolonial Belanda juga memberlakukan kebijakan Ordonansi Guru pada tahun 1905 dan 1925, dan Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1930-an.<sup>26</sup> Pada masa itu, semua guru Agama diwajibkan memiliki izin resmi dari pemerintah kolonial, bila tidak memiliki maka dianggap sebagai guru liar, dan setiap penyelenggara pendidikan harus memiliki surat izin dari pemerintah Koloial dan harus melaporkan keadaan sekolah dan kurikulum yang diterapkan.

Sesudah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kekuasaan pemerintah beralih pada Rakyat Indonesia. Maka, pengaturan-pengaturan pada masa Kolonial Belanda dan Jepang beralih pada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 oleh kabinet Sutan Syahrir,<sup>27</sup> yang sekarang berubah menjadi Departemen Agama.

Madrasah-madrasah diarahkan kepada Kementerian Agama melalui pengumuman BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 22 Desember 1945, yang salah satunya menganjurkan untuk memajukan pendidikan dan pengajaran di madrasah, langgar, dan pesantren. Pesantren dan madrasah mendapatkan perhatian, pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah dengan cara pemberian bantuan yang

---

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, "Sejarah Madrasah: Pertumbuhan, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia", [http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i\\_367=st01](http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=st01), hlm. 1. Diakses pada tanggal, 04 Mei 2008.

<sup>26</sup> Lihat Karl A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), Cet. 2, hlm. 41.

<sup>27</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 2.

diperbesar, karena lembaga pendidikan ini telah menjadi salah satu aset untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>28</sup>

Pembinaan tersebut mengarah kepada pengintegrasian madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional bersama-sama dengan sekolah-sekolah umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki adanya satu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat Nasional. Maka dalam konteks perkembangan madrasah, Kementerian Agama menjadi tumpuan untuk dapat mengangkat posisi madrasah, sehingga mendapat perhatian para pengambil kebijakan. Salah satunya adalah didirikannya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN)<sup>29</sup> yang kemudian diikuti berdirinya madrasah-madrasah yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia seraya terus berusaha untuk membenahi madrasah sebagai bagian dari komponen pendidikan nasional dan mencari format madrasah yang tepat.

Dengan demikian pemerintah bisa berharap bahwa:

Madrasah mampu melaksanakan amanat UU-PPP No. 4/1950 tentang kewajiban belajar. Dalam UU tersebut pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa; belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Departemen Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Untuk itu, pemerintah menggariskan kebijaksanaan bahwa madrasah yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar, harus terdaftar pada Kementerian Agama. Syarat yang harus dipenuhi untuk itu adalah bahwa madrasah yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu atau 25 persen dari seluruh mata pelajaran.<sup>30</sup>

Hingga akhirnya, dari pendaftaran madrasah pada tahun 1954 menunjukkan jumlah madrasah di seluruh Indonesia adalah: Madrasah

---

<sup>28</sup> Maksum, *op. cit.*, hlm. 90.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 123. Menurut Maksum, kedua lembaga ini menandai perkembangan yang sangat signifikan, dimana pendidikan madrasah dimaksudkan mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan, di samping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah.

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 6. Dikutip dari Abdurrahman Shaleh, "Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan", (Jakarta: Dharma Bakti, 1984), hlm. 24.

Rendah, sebanyak 13.057 buah, madrasah lanjutan pertama, sebanyak 776 buah, dan madrasah lanjutan atas (MA) sebanyak 16 buah.<sup>31</sup>

Untuk mencapai ke dalam sistem pendidikan Nasional, madrasah tetap diupayakan dengan jalan menyusun pola dan penjenjangan serta isi (kurikulum) yang mendekati sesuai dengan sekolah-sekolah umum. Secara berangsur-angsur akhirnya madrasah terus berkembang mengikuti tipe sekolah umum dengan keseimbangan mata pelajaran dengan pengakuan formal dari departemen pendidikan dan kebudayaan. Pengakuan ini didukung dengan dikeluarkannya surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975, yang selanjutnya disebut SKB 3 Menteri; yaitu keputusan Nomor 6/1975 tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah”. Dengan alasan bahwa siswa madrasah sebagaimana warga negara Indonesia lainnya berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk peningkatan kualitasnya dalam lapangan pendidikan melalui pengajaran di madrasah.

Dari SKB tersebut disusunlah kurikulum madrasah tahun 1975 dengan perbandingan alokasi waktu 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama, yang bisa disebut kurikulum agama. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam SKAB 3 Menteri tersebut ditetapkan keputusan sebagai berikut:

- a. Ijazah madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih atas
- c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.<sup>32</sup>

Ternyata, tidak semua madrasah dapat menyesuaikan diri dengan madrasah-madrasah yang berhak mendapatkan pengakuan tersebut. Sebagian madrasah masih tetap mempertahankan statusnya sebagai

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 663.

<sup>32</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1994), hlm. 45.

sekolah Agama yang murni, yang semata-mata hanya memberikan pendidikan Agama saja. Madrasah yang demikian, disebut Madrasah Diniyah.

Masyarakat tetap mempertahankan adanya madrasah diniyah dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang berasal dari sekolah-sekolah umum yang ingin memperdalam Agama. Umumnya madrasah diniyah ini masih tetap dipertahankan dalam lingkungan pondok pesantren atau masjid-masjid. Madrasah diniyah ini terdiri dari tiga jenjang, yaitu:

- a. Madrasah Diniyah Awwaliyah (Madrasah yang khusus mempelajari Agama Islam tingkat dasar/ permulaan)
- b. Madrasah Diniyah Wustho (Madrasah yang khusus mempelajari Agama Islam tingkat menengah pertama), dan
- c. Madrasah Diniyah Aliyah (Madrasah khusus mempelajari Agama Islam tingkat atas).<sup>33</sup>

Madrasah-madrasah yang mendapatkan pengakuan sama dengan sekolah-sekolah umum mempunyai jenjang pendidikan dan pengajaran yang sama dengan jenjang yang ada pada sekolah-sekolah umum, demikian pula sistem penyelenggaraan dan perlengkapan atau alat-alat pendidikan lainnya. Madrasah-madrasah seperti ini terdiri dari:

- a. Madrasah tingkat permulaan atau pra-sekolah yang sering juga disebut sebagai taman kanak-kanak, Raudlotul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA).  
Sistem penyelenggaraannya sama dengan taman kanak-kanak pada umumnya. Fungsinya untuk mempersiapkan anak-anak memasuki Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (tingkat dasar), yang setingkat dengan sekolah dasar yaitu 6 tahun, demikian pula sistem penyelenggaraannya.  
Kurikulum untuk pelajaran pengetahuan umum menggunakan standard pelajaran sekolah dasar, hanya saja sebagai ciri khusus madrasah adalah 30% dari jam pelajarannya digunakan untuk pelajaran Agama. Fungsi madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan dasar pada umumnya adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat mengikuti pelajaran pada tingkat sekolah menengah baik pada sekolah menengah

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 664.

- pertama (SMP) maupun pada Madrasah Tsanawiyah.
- b. Madrasah Tsanawiyah (tingkat menengah) yang merupakan madrasah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lama belajar 3 tahun sebagaimana pada SMP. Setelah tamat Madrasah Tsanawiyah, murid-murid bisa melanjutkan pelajarannya ke Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), baik SMTA umum atau SMTA kejuruan, demikian pula ke Madrasah Aliyah (MA).
  - c. Madrasah Aliyah (tingkat atas) yaitu madrasah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Pada madrasah tingkat ini hampir tidak ada bedanya dengan sekolah umum baik lama belajar, sistem penyelenggaraannya maupun penjurusannya sama dengan SMA, hanya khususnya terdapat jurusan Agama pada madrasah Aliyah.<sup>34</sup>

Sampai sekarang, madrasah-madrasah seperti dijelaskan di atas tetap masih eksis dan sebagian besar madrasah yang ada adalah madrasah swasta yang dikelola oleh yayasan atau penyelenggara lain yang notabene dengan pembiayaan sendiri atau otonom.

Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia, muncul berbagai macam model atau format madrasah, yaitu antara lain sebagaimana:

a. Madrasah Model.

Madrasah model adalah madrasah negeri yang memiliki standard tertentu dari segi sarana dan prasarana, jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan (guru), dan siswa-siswi yang terseleksi sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan intensitas tinggi.<sup>35</sup> Intervensi utama terhadap madrasah model adalah meningkatkan kualitas bidang sains dan matematika (MAFIKIB),<sup>36</sup> di samping manajemen dan sarana dan prasarana belajar.

Madrasah model ini akan memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi model (contoh, teladan), fungsi pelatihan, fungsi kepemimpinan,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Lihat; A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 82.

<sup>36</sup> MAFIKIB adalah singkatan dari mata pelajaran di MA/ SMA untuk matematika, fisika, kimia biologi dan bahasa Inggris. Mata pelajaran ini yang merupakan titik lemah dari madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam.

fungsi pengawasan (supervisi) pendidikan, fungsi pelayanan, dan fungsi pengembangan profesi.

b. Madrasah Terpadu.

Madrasah terpadu adalah madrasah 12 (dua belas) tahun, yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang berada dalam satu lokasi, memiliki satu kesatuan administrasi, manajemen, dan kurikulum.<sup>37</sup> Madrasah yang ditunjuk sebagai madrasah terpadu harus melakukan integrasi administrasi, integrasi kurikulum, integrasi personel, integrasi sarana dan prasarana, dan integrasi pembiayaan.

Sampai saat ini Departemen Agama telah menunjuk 7 MI, 7 MTs dan 7 MA sebagai madrasah terpadu:

- 1) Madrasah Terpadu Malang;
- 2) Madrasah Terpadu Yogyakarta;
- 3) Madrasah Terpadu Palembang;
- 4) Madrasah Terpadu Aceh;
- 5) Madrasah Terpadu Jakarta;
- 6) Madrasah Terpadu Padang;
- 7) Madrasah Terpadu Jambi;
- 8) Madrasah Terpadu YASUCI Jakarta.<sup>38</sup>

Konsep madrasah terpadu ini bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi merupakan konsep pendukung yang diintegrasikan dengan konsep madrasah model dan madrasah unggul. Dengan demikian akan terjadi sinergi yang kuat dalam mewujudkan madrasah berkualitas yang Islami.

c. Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

Madrasah Aliyah Keagamaan adalah Madrasah Aliyah Program Khusus sebagai upaya mempertahankan madrasah aliyah program ilmu-ilmu Agama yang diharapkan dapat menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan dasar ilmu Agama dan Bahasa Arab yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Agama

---

<sup>37</sup> Abdul Rachman Shaleh, *op. cit.*, hlm. 42

<sup>38</sup> *Ibid.*

(IAIN/ PTAI) atau perguruan tinggi di Timur Tengah.

Madrasah Aliyah Keagamaan merupakan upaya program tambahan bagi madrasah tingkat lanjutan atas yang memfokuskan keahlian sebagaimana Madrasah Aliyah atau setingkat dengan SMA yang memiliki jurusan pilihan bagi anak didik berupa jurusan IPA dan IPS, serta Bahasa, namun pada MAK ditekankan lebih pada keagamaan.

d. Madrasah Aliyah Program Ketrampilan (MAPK)

Madrasah Aliyah Program Ketrampilan (MAPK) adalah Madrasah Aliyah yang diberi tambahan program ekstra-kurikuler dalam berbagai bidang ketrampilan yang terstruktur.<sup>39</sup> Tujuan penyelenggaraan program ini adalah untuk membekali siswa yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja dengan bekal ketrampilan tertentu.

e. Madrasah Wajib Belajar (MWB).

Madrasah wajib belajar adalah lembaga pendidikan 8 tahun yang difungsikan untuk mendukung kenajuan ekonomi, industri, dan transmigrasi.<sup>40</sup> MWB merupakan rangkaian pelaksanaan undang-undang wajib belajar yang baru terealisasi tahun 1980-an. Namun, kementerian Agama yang pada saat itu dijabat KH Moh. Ilyas, mengeluarkan kebijakan yang cukup drastis dengan mengadakan pembaruan sistem pendidikan di madrasah dengan memperkenalkan madrasah wajib belajar (MWB) 8 tahun. Jadi, jauh sebelum presiden Soeharto mencanangkan wajib belajar 6 tahun, kemudian menjadi 9 tahun pada tahun 1994, di madrasah telah ada kewajiban belajar 8 tahun.

Madrasah-madrasah tersebut benar-benar merupakan tampilan budaya yang simpatik dengan jati diri bangsa yang berakar pada

---

<sup>39</sup> Husni Rahim, *op. cit.*, hlm. 179.

<sup>40</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 7.



"Bhinneka Tunggal Ika", yaitu betapa simpatiknya pengakuan bahwa madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah), merupakan sekolah umum yang berciri khas Islam dan menjadi bagian keseluruhan Sistem Pendidikan Nasional.<sup>41</sup>

Sebagai kelebihannya, madrasah dapat mengembangkan pendidikan dan pengajaran Agama Islam dengan setara dalam status yang sama dengan pendidikan atau sekolah umum, dan sebagai kekurangannya adalah madrasah tidak dapat optimal dan leluasa dalam menerapkan sistem dan kurikulum madrasah sebagai cirri keislaman di madrasah, karena harus mengikuti sistem dan kurikulum Nasional.

Pada saat ini, madrasah memang menempati posisi yang dipandang secara lahiriah sangat menguntungkan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1960-1970-an silam. Betapa tidak, status yang setara dengan sekolah umum otomatis menjadikan madrasah unjuk keistimewaan, selain juga menambah tugas dan tantangan dalam dunia pendidikan.

Tetapi, keadaan madrasah tidak seperti yang kita nilai menempati puncak yang menggiurkan. Malah sebaliknya, dapat kita perhatikan dari jumlah madrasah yang tersebar di seluruh tanah air adalah madrasah swasta, dan apabila dibandingkan dengan madrasah negeri, perbandingannya sangat mengejutkan. Di tengah tingginya tuntutan peningkatan kualitas pada semua jenjang pendidikan, keberadaan madrasah dari jenjang Ibtidaiyah (MI/setara SD), Tsanawiyah (MTs/SLTP), sampai dengan Madrasah Aliyah (MA/SLTA) di seluruh Tanah Air saat ini sangat memprihatinkan. Antara lain terlihat dari sisi ketersediaan guru, status guru, kondisi ruang belajar, tingkat pembiayaan (unit cost) siswa, hingga tidak adanya standarisasi mutu madrasah.

Keadaan madrasah pada masa reformasi pemerintahan Indonesia, dimaksudkan sejak tahun 1998 sampai sekarang. Madrasah pada masa era reformasi menempati peranan penting dalam dunia pendidikan di

---

<sup>41</sup> Mustofa Syarif dan Juanda Abubakar (eds.), *op. cit.*, hlm. 109.

Indonesia, apalagi ketika bangsa Indonesia tengah berada dalam keterpurukan citra, terutama citra pendidikan Islam pada khususnya dan citra pendidikan nasional pada umumnya.

Menurut Abdul Aziz, dalam tulisannya yang dimuat di Kompas tertulis bahwa:

Dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum, keberpihakan Negara terhadap madrasah (MI/MTs/MA) selama ini sangat senjang. Sudah saatnya dilakukan penanganan secara terpadu. Dia menyebutkan, dari 456.281 guru madrasah saat ini hanya 17,3 persen berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Berarti, 82 persen lebih mengabdikan dengan status non-PNS. Pada jenjang ibtdaiyah, dari 196.374 guru hanya 19 persen berstatus PNS. Pada jenjang tsanawiyah dari 192.279 guru hanya 14,6 persen berstatus PNS. Pada jenjang aliyah, dari 67.628 guru hanya 20 persen berstatus PNS. Selain itu, mayoritas guru madrasah mengajar tanpa sesuai latar belakang pendidikannya. Menurutnya, umumnya guru madrasah digaji oleh yayasan. Kalaupun mendapat tunjangan dari pemerintah, jumlahnya sangat kecil. Tunjangan guru taman kanak-kanak Rp. 23.400, MI Rp. 127.967, MTs Rp. 139.691, dan MA Rp. 144.685 per orang perbulan.

Minimnya guru madrasah yang berstatus PNS berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kerja mereka. Sebagai contoh, sejumlah guru madrasah di Bogor, Jawa Barat, hanya menerima gaji Rp. 140.000 per bulan. Bandingkan bagaimana senjangnya penghasilan mereka dengan guru yang berstatus PNS.

Tentang kondisi ruang kelas, Saat ini jumlah ruang kelas (MI/MTs/MA) sebanyak 206.156 unit. Sekitar 59.685 unit di antaranya dalam keadaan rusak ringan dan 30.660 unit rusak berat.<sup>42</sup>

Dari format-format madrasah yang dijelaskan di atas, sampai saat ini, madrasah masih terus berproses dalam berkembang menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Dapat ditandaskan bahwa madrasah adalah benar-benar merupakan lembaga pendidikan yang Islami, populis, dan berkualitas, yang sanggup memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat menuju masyarakat yang modern, maju, berkualitas seta

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz, "Madrasah Perlu Dibina Lintas Departemen", <http://Kompas.com/kompas-cetak/0406/28/humaniora/1112151/htm>. Diakses pada: Jum'at, 12 Mei 2006.

beriman dan bertakwa.

Dari gambaran keadaan madrasah tersebut di atas, sudah saatnya Negara tidak memandang sebelah mata pada madrasah. Secara kultural, madrasah tidak bisa dipisahkan dari pranata masyarakat Indonesia. Madrasah telah berkiprah mendidik masyarakat jauh sebelum kehadiran sekolah-sekolah umum. Oleh karena itu, meskipun di setiap desa telah tersedia sekolah umum, madrasah tetap diminati.

### **C. Kebijakan-Kebijakan Pengembangan Madrasah di Indonesia**

Perkembangan lembaga pendidikan Islam madrasah, secara institusional tentunya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang mengatur dan mengarahkannya. Secara umum, sebagaimana gambaran perkembangan madrasah yang telah disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai kebijakan-kebijakan tentang lembaga pendidikan madrasah yang pernah ada, yaitu antara lain:

#### **1. Kebijakan Madrasah pada Masa Kolonial**

Kebijakan tentang lembaga pendidikan Islam madrasah yang pernah ada pada masa Kolonial Belanda adalah: Kebijakan Ordonansi Guru pada tahun 1905 dan 1925, dan Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1930-an.<sup>43</sup> Kebijakan tersebut berisi tentang: Setiap guru Agama diwajibkan memiliki surat izin untuk melakukan pengajaran Agama dari pemerintah Kolonial Belanda, dan setiap penyelenggara pendidikan dan pengajaran Agama juga harus mendapatka surat keterangan dan izin dari pemerintah Kolonial dan diwajibkan untuk melaporkan keadaan dan kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan yang bersangkutan.

#### **2. Kebijakan Penegerian Madrasah**

Pada masa awal kemerdekaan, status madrasah belum begitu berkembang dan banyak diminati masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah melalui departemen agama membuat beberapa kebijakan mengenai

---

<sup>43</sup> Karl A. Steenbrink, *lock. cit.*

mengembangkan madrasah yang di antaranya adalah tentang penergian madrasah:

- a. Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1959 tentang penyerahan SRI di Aceh.
- b. Penetapan Menteri Agama No. 2 Tahun 1959 tentang penyerahan SRI di Lampung.
- c. Penetapan Menteri Agama No. 12 Tahun 1959 tentang penyerahan SRI di Karisidenan Surakarta.
- d. Keputusan Menteri Agama No. 104 Tahun 1962 tentang perubahan nama SRI menjadi MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri).
- e. SK Menteri Agama No. 80 Tahun 1967 tentang penergian madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah dengan nama MTs AIN (Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri), dan MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri).
- f. Keputusan Menteri Agama No. 213 Tahun 1970 tentang penghentian penergian madrasah-madrasah swasta dan pendirian sekolah-sekolah/madrasah di lingkungan Departemen Agama.

Kebijakan-kebijakan pemerintah terus dilaksanakan dengan berbagai perubahan, hingga munculnya SKB 3 Menteri (Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), No. 3 Tahun 1975, madrasah masih tetap konsisten dengan orientasinya.

Perubahan struktur kemudian mendorong madrasah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan mendasar yang di rancang oleh sistem pendidikan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam SKB tersebut pada pasal 4; (a) pengelolaan madrasah dilaksanakan oleh menteri Agama; (b) pembinaan mata pelajaran pada madrasah dilakukan oleh menteri Agama.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Fatah Syukur, "Madrasah di Indonesia Dinamika, Kontinuitas dan Problematika", dalam Ismail, SM, Nurul Huda, Abdul Kholiq (eds.), *op. cit.*, hlm. 243.

Pada tahun 1978, terjadi rekonstruksi madrasah tingkat lanjut dengan dikeluarkannya SK Menteri Agama No. 15, 16, 17, dan 19, yang menetapkan perubahan nama madrasah dan PGA disamping perubahan jumlah madrasah negeri karena terjadi alih fungsi beberapa lembaga pendidikan agama negeri menjadi madrasah. Perubahan tersebut adalah:

- a. MIN tetap menjadi MIN dengan jumlah 376 buah
- b. MTs AIN menjadi MTsN, dan PGAP 4 Tahun menjadi MTsN, sehingga jumlah MTsN menjadi 430 buah
- c. MAAIN menjadi MAN dan sebagian PGAN 6 Tahun serta semua PPUPAN, PHIN, dan SP-IAIN menjadi MAN, sehingga jumlahnya menjadi 167 buah
- d. PGAN 6 Tahun menjadi PGAN 3 Tahun dengan jumlah 90 buah.<sup>45</sup>

Kemudian pada tahun 1991, dibuka kesempatan penegerian madrasah-madrasah swasta oleh pemerintah, dengan keputusan Menteri Agama No. 137 Tahun 1991, dan pada tahun 1992 terjadi alih fungsi PGAN menjadi MAN dengan SK menteri agama No. 42 Tahun 1992, dan pada tahun 1993 terjadi lagi penegerian madrasah dengan SK Menteri Agama No. 244 tahun 1993, dan di tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 1997 proses penegerian madrasah terus berlangsung.

Proses penegerian ini terakhir dilakukan pada akhir tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Agama No. ..../2003 tentang penegerian 250 madrasah di seluruh indonesia. Dan mungkin selama alasan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan kegiatan penegerian madrasah tetap terus dilakukan. Dari proses penegerian hingga tahun terakhir (2007), jumlah madrasah yang berkembang dan tersebar di seluruh tanah air adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 13.

TABEL 1.  
PERKEMBANGAN JUMLAH MADRASAH TAHUN 2007

No	Jenis Madrasah	Satatus	Jumlah
1	MIN	Negeri	1.568
2	MIS	Swasta	20.621
3	MTsN	Negeri	1.256
4	MTsS	Swasta	11.363
5	MAN	Negeri	644
6	MAS	Swasta	4.399
7	Madin	Swasta	38.085
8	RA	Swasta	15.120

Sumber: *EMIS Dirpendis DEPAG RI 2007.*

Dari kebijakan-kebijakan dan banyaknya jumlah madrasah yang tersebar di seluruh Tanah Air Indonesia, diharapkan madrasah mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia baik secara kelembagaan, sarana dan prasarana, manajemen serta pengelolaan yang memadai sehingga mampu menciptakan insan Indonesia yang berdayaguna dan berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan zaman.

### 3. Kebijakan Madrasah dalam Undang-Undang SISDIKNAS

Usaha pemerintah tetap berlanjut untuk memasukkan lembaga pendidikan islam madrasah beserta kurikulumnya ke dalam susunan sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1989, madrasah mendapatkan pengakuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh aspek bidang pendidikan di Indonesia, madrasah di tempatkan pada posisi yang menguntungkan namun juga memprihatinkan. Yaitu tertuang pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan pendidikan lainnya, madrasah semakin jelas posisinya yaitu sama dengan sekolah umum yang berciri khas Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah menuai banyak permasalahan dan terus mengikuti perjalanan sejarah bangsa. Hingga, madrasah mau tidak mau harus ikut dalam Sistem Pendidikan Nasional yang baik atau buruknya tergantung pada sistem yang ada. Dalam hal ini,

madrasah harus menyalin dirinya dalam bentuk dan format yang teratur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003, sebagaimana tersurat pada bagian umum pasal: 13, 14, 17, dan 18; yang berbunyi antara lain:

13. (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya, 14. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, 17. (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 18. (2) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.<sup>46</sup>

Sebuah keunggulan yang nyata, yang kini tengah kita jalankan dan kita elu-elukan, merupakan daya akomodatif yang mengintegrasikan pranata-pranata pendidikan yang beragam dalam satu bangunan sistem pendidikan yang dengan tetap dan penuh kesediaan mengakui kekhasan yang dimiliki masing-masing lembaga pendidikan.

Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur segala jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia, dalam hal ini, format yang di berikan oleh sistem yang di buat dan dilakukan oleh pemerintah pusat adalah format pendidikan sentralistik. Setiap jenis dan jenjang pendidikan terpusat pada (peraturan dan tata tertib perundang-undangan) pemerintah yang berlaku.

Namun, yang menjadi kekhawatiran kaum politisi dan pelaku pendidikan madrasah adalah kekhawatiran tentang kualitas baik kurikulum maupun sistem pendidikan (harus rela dengan pengajaran Agama 40% banding 60% dan terpusat serta harus di samakan dengan sekolah umum), dan sekaligus menjadi tugas pekerjaan yang berat adalah membentuk

---

<sup>46</sup> Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 12-13.

kualitas *out come* yang harus dipersiapkan sepenuhnya dalam menghadapi dunia luar (kehidupan di masyarakat) dengan sarana-prasarana dan dana operasional seadanya.

Baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, madrasah terus terang mengalami keadaan didiskriminasikan dan dianaktirikan oleh Diknas dan Pemerintah Daerah. Nampak jelas setelah disahkannya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, dimana madrasah dikelompokkan sebagai sekolah umum dan tidak lagi sebagai pendidikan keagamaan. Ini merupakan kekhawatiran dan merupakan sebuah indikasi bahwa madrasah sudah saatnya diserahkan pada daerah.

Terbukti oleh sebagian pihak, bahwa kalau madrasah diserahkan kepada daerah dapat dipastikan ciri khas madrasah tidak lagi dapat dipertahankan sehingga madrasah tidak ada bedanya dengan sekolah (umum).

#### **4. Kebijakan Madrasah dalam Peraturan Pemerintah**

Madrasah yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional -bukan merupakan bagian dari sistem keagamaan- adalah benar-benar memiliki eksistensi dalam pembangunan bangsa.

Adapun dalam perkembangan madrasah saat ini, kebijakan-kebijakan yang mengatur seluruh kerangka kelembagaan dalam madrasah seluruhnya di serahkan kepada pemerintah pusat (sentralisasi) dan dengan pengembangan kelembagaan sesuai Standard Nasional Pendidikan (desentralisasi). Kebijakan yang dimaksud disini adalah Peraturan Pemerintah. Di antara kebijakan tersebut adalah:

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 yang ditindaklanjuti dengan SK Mendikbud No. 0487/U/ 1992 Tahun 1992 dan SK No. 054/U/ 1993 Tahun 1992. Dalam kedua SK tersebut dinyatakan bahwa:

MI adalah SD dan MTs adalah SLTP yang berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Oleh karena itu, MI dan MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SLTP selain ciri khas Agama Islam pada MI dan MTs tersebut. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan Nomor 0489/U/ 1992 Tentang Sekolah Menengah Umum, ditetapkan bahwa Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.<sup>47</sup>

Dengan demikian maka bobot pendidikan umum pada Madrasah Aliyah harus sama dengan SMU pada umumnya dengan tidak mengurangi Pendidikan Agama Islam sebagai ciri khasnya.

Kemudian pada era sekarang, madrasah memiliki peraturan yang lebih baru lagi, yaitu sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Walaupun harus mempertahankan ciri khas keislamannya, madrasah harus mengikuti peraturan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dengan berbagai Peraturan Pemerintah yang menyertainya, yang mengatur segala bentuk pendidikan di Indonesia dalam kancah pendidikan Nasional. Antara lain:

- a. Kebijakan Kelembagaan Madrasah sama dengan lembaga sekolah umum,
- b. Kebijakan pengelolaan madrasah sebagaimana pengelolaan sekolah umum, namun ada sedikit perbedaan dalam pendanaan (otonomi pendidikan),
- c. Kebijakan standar sarana dan prasarana madrasah sama dengan standar sekolah-sekolah pada umumnya,
- d. Kebijakan kurikulum (standard isi) madrasah sesuai dengan kurikulum nasional yaitu KBK dan sekarang telah diresmikan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP),
- e. Kebijakan kualifikasi akademik dan kompetensi guru madrasah sama dengan sekolah umum yakni dengan adanya sertifikasi guru madrasah,
- f. Kebijakan akreditasi madrasah juga sama dengan akreditasi sekolah pada umumnya; mulai dari diakui hingga disamakan dengan sekolah umum negeri yang terakreditasi "A".

---

<sup>47</sup> Fatah Syukur, *op. cit.*, hlm. 255.

Dari kebijakan-kebijakan di atas, diharapkan mandrasah nantinya akan mampu bersaing pada sektor pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia secara global atau pada era globalisasi saat ini.

#### D. Era Globalisasi

##### 1. Pengertian Era Globalisasi

Satu kata yang menggemparkan dunia saat ini, “Globalisasi”<sup>48</sup> ternyata telah membuat banyak orang memberikan arti yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya tentang kata tersebut. Sehingga, di sini perlu penegasan dari kata globalisasi dengan kongkret untuk mendapatkan makna dan arti yang sesuai.

Di dalam Kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, tertulis bahwa: istilah globalisasi berasal dari kata “global” yang dalam bahasa Inggris berarti: 1) “Covering or affecting the whole world, 2) Considering or including all parts of sth,<sup>49</sup> Embracing the whole of group of items (merangkul keseluruhan kelompok yang ada)”<sup>50</sup>. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “globalisasi” adalah proses masuknya ke ruang dunia.<sup>51</sup>

Secara lebih lengkap globalisasi banyak didefinisikan oleh para ilmuwan dunia, seperti: Baylish dan Smith, mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses meningkatnya keterkaitan antara masyarakat sehingga satu peristiwa yang terjadi di wilayah tertentu semakin lama akan kian berpengaruh terhadap manusia dan masyarakat yang hidup di bagian lain

---

<sup>48</sup> Globalisasi pada dasarnya merupakan produk dari modernisasi. Menurut Nurcholis Madjid, modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya-guna yang maksimal dalam berpikir dan bekerja demi kebahagiaan umat. Oleh karena itu, modernisasi berarti pula berpikir dan bekerja menurut sunatullah (hukum ilahi) yang hak, sehingga untuk dapat menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku di alam.

<sup>49</sup> Oxford University, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, (New York: University Press, 2001), Cet. 6, hlm. 546.

<sup>50</sup> Abdullah Idi dan Toto Suharto, *op. cit.*, hlm. 102.

<sup>51</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hlm. 366.

di muka bumi.<sup>52</sup>

Anthony Giddens, memandang globalisasi sebagai sebuah proses sosial yang ditandai dengan semakin intensifnya hubungan sosial yang meng-global. Artinya: kehidupan manusia di suatu wilayah akan berpengaruh kepada kehidupan manusia di wilayah lain dan begitu pun sebaliknya.<sup>53</sup>

Akbar S. Ahmed dan Hastings Donnan, seorang tokoh pemikir Muslim, juga memberikan kesimpulan tentang modern dan globalisasi, dengan penjelasannya sebagaimana:

*If modern meant the pursuit of Western education, technology and industrialization in the first flush of the post-colonial period, postmodern would mean a reversion to traditional Muslim values and a rejection of modernism. This would generate an entire range of Muslim responses from politics to clothes to architecture. For us definition is literal. (Jika modern berarti mengejar pendidikan, teknologi dan industrialisasi Barat dalam semangat masa pasca kolonial yang awal, postmodern akan berarti pengambilan ke nilai-nilai Islam yang tradisional dan penolakan modernism [itu sendiri]. Hal ini menggeneralisir tanggapan dari seluruh lapisan Muslim dari [masalah] politik sampai pada pakaian dan arsitektur. Bagi kita [Muslim] definisi posmodern [hanyalah] bersifat kebahasaan.)<sup>54</sup>*

Wallerstain, seorang pelopor teori Sistem Dunia, dalam pengertian lain ia memandang bahwa: globalisasi tidak sebatas hubungan lintas batas negara. Namun, globalisasi merupakan wujud ke jalan ekonomi kapitalis dunia yang digerakkan oleh logika akumulasi kapital.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Lihat: [www.sociologyonline.co.uk/GlobalGiddens1.htm](http://www.sociologyonline.co.uk/GlobalGiddens1.htm). Diakses pada hari/tanggal: Jum'at, 22 Desember 2006.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Akbar S. Ahmed, "Postmodernism and Islam: Predicament and Promise", (London: Routledge, 1992), hlm. 6. Terdapat dalam A. Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. 5, hlm. 16.

<sup>55</sup> Dikutip dari J. Robert Holton, "Globalization and Nation State", (London, Macmillan Press, 1998), hlm. 11. Oleh Imam Machali, "Pendidikan Nasional Dalam Telikungan Globalisasi Telaah Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Pendidikan Nasional", dalam Imam Machali dan Musthofa (eds.), *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, (Yogyakarta: PRESMA Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga dan Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 110.

Jin Young Chung seorang Ilmuwan Politik asal Korea, senada dengan pengertian di atas ia memberikan definisi globalisasi dengan mengarahkan pada sektor ekonomi. Globalisasi adalah:

Sebagai suatu proses terintegrasinya dunia melalui peningkatan arus kapital, hasil produksi, jasa, ide dan manusia yang lintas batas negara. Proses ini merupakan hasil dari perkembangan-perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang revolusioner, serta liberalisasi perdagangan dan keuangan di negara-negara besar. Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa pada tataran tertentu globalisasi merupakan hasil alami dari kecenderungan ekspansi pasar yang sejalan dengan keinginan perusahaan maupun manusia mengejar kesempatan-kesempatan bisnis.<sup>56</sup>

Supriyoko menunjukkan dalam buku “Pendidikan Politik Di Era Globalisasi”, bahwa dalam globalisasi terdapat saling ketergantungan (interdependency) dalam masalah-masalah sosial, politik, dan kultural antar bangsa.<sup>57</sup> Artinya, perkembangan perikehidupan sosial, kultural dan politik suatu bangsa akan saling mengait dengan bangsa lainnya di seantero dunia. Selanjutnya, Ahmed memberikan batasan tentang globalisasi bahwa; pada prinsipnya globalisasi mengacu pada perkembangan-perkembangan yang cepat dalam teknologi komunikasi, transformasi, informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh [menjadi hal-hal] yang bisa dijangkau dengan mudah”.<sup>58</sup>

Dalam konteks ini, globalisasi dipahami sebagai sebuah serangkaian proses yang saling terkait dan terjadi dalam struktur-struktur

---

<sup>56</sup> Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 7, No. 2, Nopember 2003, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, hlm. 181. Terdapat dalam: *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>57</sup> Supriyoko, “Pendidikan Politik Di Era Globalisasi”, dalam M. Masyhur Amin dan Ismail S. Ahmad (eds.), *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, (Yogyakarta: LKPSMNU, 1993), hlm. 103.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19. Dengan berkiblat pada: Akbar S. Ahmed dan Hantings Donnan dalam “Islam, Globalization and Post-modernity”, (London: Routledge, 1994), hlm. 1. Dan mereka mendasarkan pendapat dari A. Giddens dalam “The Consequences of Modernity”, (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 64.

sistem kerja yang dibangun di atas mode-mode produksi kapitalis global.<sup>59</sup> Dengan ditandai perkembangan arus informasi yang begitu cepat dan tanpa batas semisal kejadian di mana pun berada dan kapan pun waktunya, dalam waktu yang bersamaan orang di seluruh penjuru dunia akan mudah mengakses dan mengetahui segalanya. Disamping itu arus pesatnya teknologi menciptakan persaingan-persaingan antara orang yang satu dengan yang lainnya, negara yang satu dengan negara lain.

Di sini, yang dimaksud globalisasi adalah sebagai masuknya unsur budaya, ideologi dan segala sesuatu dari dunia luar yang dapat mempengaruhi dan bahkan menggeser keberadaan budaya lokal madrasah. Inilah yang merupakan medan jihad bagi pendidikan Islam (madrasah) pada saat ini, yang harus kita hadapi dengan berproses untuk benar-benar mencapai puncak kejayaan keilmuan dan teknologi umat Islam baik di Indonesia dan seluruh dunia.

Inti dari makna globalisasi di atas adalah perdagangan bebas dengan ditandai tidak adanya batas negara dan kompetisi atau daya saing tinggi. Negara yang daya persaingannya lemah akan menjadi negara pekerja, dimana para ahlinya datang dari berbagai negara maju, daya saing yang di tandai dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bagus dan ini berarti kualitas pendidikannya haruslah sangat bagus.

## **2. Peluang dan Tantangan Globalisasi Bagi Madrasah Di Indonesia**

Permasalahan madrasah memang sangat kompleks, mengurainya tidak cukup dengan pendekatan anggaran. Tinjauannya harus melebar pada aspek lain, seperti sosial, budaya, dan sejarah keberadaan madrasah di negeri ini.<sup>60</sup> Oleh karena itu, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir-akhir ini, dalam proses peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam

---

<sup>59</sup> Lihat Musthofa Rembangy, "Pendidikan Islam Dalam Formasi Sosial Globalisasi (Sebuah Refleksi Kritis Dan Pencarian Format)", dalam Imam Machali dan Musthofa (eds.), *op. cit.*, hlm. 135.

<sup>60</sup> <http://Kompas.com/kompas-cetak/0406/28/humaniora/1112151/htm>. Diakses pada: Jum'at, 22 Desember 2006.

menghadapi era globalisasi saat ini. Nampaknya dunia pendidikanlah yang harus berperan penuh dalam pembentukan sumber daya manusia seutuhnya. Selama pendidikan masih memegang peran yang penting dan dalam satu kesatuan proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan sumber daya manusia, maka peran pendidikan selanjutnya pastilah dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi tuntutan zaman.

Berkenaan dengan hal itu, lembaga pendidikan Islam (madrasah) sebagai satu kesatuan sistem pendidikan di Indonesia ikut berperan penting dalam pembentukan dan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam merespon era globalisasi ini, pendidikan Islam khususnya madrasah tetap akan memberikan respon positif dan solutif, tanpa mengurung diri. Madrasah tetap inklusif dengan tanpa meninggalkan karakter dalam basic yang telah ada dan dimilikinya sejak awal berdirinya. Untuk menciptakan tatanan pendidikan Islam pada era globalisasi ini, pendidikan Islam khususnya madrasah perlu melakukan reformulasi atau semacam pencarian format kembali agar supaya madrasah masih bisa tetap memberikan kontribusi sekaligus solusi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan kahidupan pada era globalisasi saat ini.

Format madrasah pada era globalisasi, secara gris besar tidak jauh berbeda dengan format pendidikan Islam pada umumnya, sebagaimana di jelaskan oleh Musthofa Rembangy:

Adapun dalam pencarian format tersebut harus melakukan berbagai hal antara lain: 1) Rekontruksi paradigma pendidikan Islam yang berbasis kontekstual-kritis, 2) Reorientasi tujuan dan kurikulum pendidikan Islam, 3) Reorientasi manajemen dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) islami, 4) Demokratisasi pendidikan Islam dan penciptaan lembaga alternatif.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Musthofa Rembangy, *op. cit.*, hlm. 162.

Dalam pencarian format tersebut, madrasah harus mampu melakukan beberapa hal tersebut di atas, yang tertuang dalam visi madrasah yang “Islami, Populis, Berkualitas dan Beragam”, dan dengan perbaikan-perbaikan yang ada dalam kelembagaan madrasah, seperti manajemen, kurikulum, sarana-prasarana, dan lain sebagainya.



### BAB III

## RIWAYAT HIDUP A. MALIK FADJAR DAN PEMIKIRAN TENTANG PENGEMBANGAN MADRASAH PADA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA

### A. Riwayat Hidup A. Malik Fadjar

#### 1. Latar Belakang Keluarga

Seorang tokoh yang oleh penulis diharapkan banyak menyumbangkan informasi dan pemikirannya mengenai hal-hal penting yang dalam skripsi ini disebutkan sebagai pokok permasalahan, adalah salah seorang Tokoh Nasional yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan segala bhakti pengabdianya dengan penuh komitmen dan optimis untuk kemajuan Ilmu, Agama, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh yang dimaksud adalah Prof. Dr. H. A. Malik Fadjar, M.Sc. yang memiliki nama lengkap Abdul Malik (nama sejak kecil). Dilahirkan di Yogyakarta 22 Februari 1939, Ayahnya bernama Fadjar Martodiharjo dan Ibunya bernama Hj. Salamah Fadjar, keduanya sudah meninggal dunia. Pak Malik merupakan putera keempat dari tujuh bersaudara.

”Saya merupakan putera ke-empat dari tujuh bersaudara. Dari tujuh orang saudara, semua menekuni pendidikan. Saya anak nomor empat, adik saya yang kecil juga dosen dan Dekan Fakultas Tarbiyah Malang. Kemudian kakak saya lagi Rektor Universitas Widyagama Malang dan sekaligus Guru Besar Universitas Brawijaya. Kakak saya guru Sekolah Dasar. Sedang saya jelas menjadi guru mulai dari Sekolah Rakyat”.<sup>1</sup>

Abdul Malik, yang biasa dipanggil “Malik” (Pak Malik oleh penulis) tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga terdidik (*Educational Village Family*), ayahnya adalah seorang Guru Agama.<sup>2</sup> Melalui ayahnya, Pak Malik banyak belajar Ilmu Agama dan Keagamaan.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008.

<sup>2</sup> Ahmad Barizi, *Holistika Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 5.



Salah satu ajaran penting yang ditransmisikan oleh ayahnya kepada semua anak-anaknya adalah percaya diri dan keberanian diri.

“Ayah saya selalu mangajari anak-anaknya bagaimana menjadi orang yang berguna bagi sesamanya. Ajaran hadits Nabi Saw. Yang menyatakan, “*Khayr Al-nâs anfa’uhum li Al-nâs*” (sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat/ berguna bagi sesamanya), hadits itulah yang selalu diingatkan ayah saya kepada anak-anaknya. Hal ini juga ditampilkan ayah dan ibu saya dalam kesehariannya. Mereka bekerja dari pagi sampai sore dan bahkan malam hari. Ayah khususnya, pagi sampai sore mengajar di kelas-kelas yang berbeda di Sekolah Rakyat Negeri (SRN), petang hari (menjelang malam) mengajari para perempuan di desa untuk keperluan pemberantasan buta huruf, dan malam hari –selain mengajar ngaji Al-Qur’an- menyediakan bimbingan belajar untuk anak-anak yang duduk di kelas akhir (kelas VI SRN) untuk menghadapi ujian. Hal ini dilakukannya setiap hari, siang dan malam. Bahkan dalam beberapa kesempatan ayah masih meluangkan waktu menyampaikan pelajaran Agama kepada masyarakat di masjid, disamping melibatkan diri dalam perkumpulan kemasyarakatan dan keagamaan”.<sup>3</sup>

Hal seperti ini dikarenakan, ayah A. Malik Fadjar merupakan seorang yang dikenal sebagai pribadi ”liberal”, dalam arti lebih banyak menampilkan ”*Tutwuri*” yang mendorong lahirnya sikap percaya diri dan keberanian diri yang semuanya berpangkal kepada iman, dan ayahnya juga orang pergerakan. Selama 22 tahun menjadi guru Muhammadiyah, bukan hanya sekedar guru, tapi juga membangun sekolah-sekolah Muhammadiyah di Daerah Yogyakarta dan Magelang serta membangun Perpustakaan Desa selain memberikan dakwah Agama.

Sebagai tokoh pergerakan dan tokoh pendidikan inilah, Ayah A. Malik Fadjar benar-benar dapat mendidik anak-anaknya dengan disiplin dan penuh dengan kewibawaan serta tanggung jawab dalam menjalankan keagamaan yang disertai keimanan dan ketakwaan yang terpancar dalam diri anak-anaknya.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008. Lihat pula pada *Ibid.*, hlm. 10.

Nilai-nilai religiusitas dan humanitas dari ayahnya ini ternyata telah mengakar kuat dalam diri pribadi A. Malik Fadjar, sehingga dalam situasi dan kondisi apa pun, A. Malik Fadjar sanggup menghadapinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pribadi A. Malik Fadjar adalah pribadi pejuang dan pengabdian yang penuh percaya diri dan keberanian dalam mengkonstruksi cita-cita dan mimpi-mimpinya, khususnya di bidang pengembangan pendidikan.

Meskipun A. Malik Fadjar lahir dan besar di Yogyakarta, beliau mengukir karir dalam bidang pendidikan di Kota Malang, sempat menetap dan menjadi Guru di Sumbawa Besar NTT dan beberapa tahun berkiprah dalam pentas Nasional di Pusat Pemerintahan di Jakarta. Pada saat ini, A. Malik Fadjar sedang asyik-asyiknya menjalani hidup dan kehidupannya bersama dengan isterinya Norjanah Malik Fadjar di rumah kediamannya yang terletak di Jl. Tebetmas Raya 1/ F8 Jakarta Selatan.<sup>4</sup>

Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, A. Malik Fadjar adalah sosok ayah yang keras dan disiplin, namun santai, A. Malik Fadjar selalu mengajarkan kepada putra-putrinya hal-hal yang berbau kedisiplinan, sehingga anak-anak beliau semuanya menjadi orang-orang yang sukses dalam karier dan prestasi.

Kelima orang putra-putrinya kini semuanya telah mandiri, semuanya juga orang-orang yang sukses dan berpendidikan.

”Anak tertua, Nazarudin Malik Fajar, adalah seorang Dosen di sebuah Perguruan Tinggi di Malang, kemudian Iin Nur Marini Malik Fajar bekerja di PT Garuda Indonesia. Nurman Setiawan Malik Fajar, juga seorang Dosen di Unibraw (Universitas Brawijaya), Dien Nur Marina Malik Fajar lulusan S2 sebuah Perguruan Tinggi Australia ini juga menjadi Dosen, dan anak terakhir Nur Himiwan Malik Fajar, lulusan sebuah Perguruan Tinggi di Swiss”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Zaenal Arifin, Kabag. Humas PP. Muhammadiyah, via telephon, pada tanggal 26 Mei 2008.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008.

Demikianlah sekelumit gambaran latar belakang Pak Malik dalam keluarga yang dapat penulis tunjukkan dalam penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beliau dan dari beberapa sumber lain yang telah terdapat dalam buku-buku hasil penelitian lain tentang beliau.

## **2. Riwayat Pendidikan**

A. Malik Fadjar semenjak kecil setelah menginjak usia sekolah, menjalani pendidikan formal yang ditempuhnya yaitu:

- a. Sekolah Rakyat Negeri (SRN) yang dijalaninya selama 6 tahun di Deyangan Mertoyudan Magelang, beliau lulus tahun 1952.
- b. PGAPN (Pendidikan Guru Agama Pertama Negeri) Magelang yang diselesaikannya pada tahun 1957.
- c. PGAAN (Pendidikan Guru Agama Atas Negeri) di Yogyakarta lulus tahun 1959.
- d. Beliau juga meneruskan pendidikan ke tingkat sarjana dan akhirnya mendapatkan gelar kesarjanaan (Drs) dari Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1972 (kini telah menjadi UIN Malang).
- e. S-2 (Strata 2) di Florida State University, *The Departement of Educatioonal Research, Development and Foundation*, Amerika Serikat, dan akhirnya memperoleh gelar *Master of Science (M.Sc.)* pada tahun 1981.
- f. Setelah beliau kembali di Indonesia, di Almamaternya, beliau memperoleh gelar sebagai Guru Besar (Profesor) dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya (sekarang UIN Malang), pada tahun 1995 dan Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Kependidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001.

### 3. Karier dan Prestasi

Pria bertubuh jangkung yang kini tengah memasuki usia 70 tahun ini, rasanya sulit sekali lepas dari dunia pendidikan. Lebih dari separuh usianya dihabiskan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sejak usia 21 tahun A. Malik Fadjar memulai kariernya mulai dari tingkat bawah di bidang pendidikan formal hingga melejit sampai tingkat Nasional pada Pemerintahan Pusat di Jakarta, karier dan prestasi beliau antara lain yaitu:

#### a. Menjadi Guru SRN

A. Malik Fadjar menjadi guru sejak dari lulus PGAPN, yaitu sebagai Guru di Taliwang Sumbawa Besar, pada tahun 1959.

”Saya menjadi guru sejak umur 21 tahun, jadi saya mempunyai masa kerja sebagai guru sekitar 42 tahun. Mulai tahun 1959 saya mengajar di Sekolah Rakyat di Sumbawa Besar”.<sup>6</sup>

Kemudian, A. Malik Fadjar diangkat menjadi guru Agama di Sekolah Rakyat Negeri (SRN) Taliwang Sumbawa Besar NTT, dan di Daerah yang sama pula, beliau juga mengajar di SGB Negeri, dan dipercaya menjadi Kepala SMEP Muhammadiyah pada tahun 1961-1963, setelah menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya pada tahun 1972.

”Menjadi guru, memberi kesan tersendiri bagi saya. Artinya, di situ kita menangani hal-hal yang mengasyikkan, pekerjaan guru adalah sebuah komitmen. Saya sudah menjadi guru sejak tahun 1959. Pahit getirnya menjadi guru sudah pernah saya rasakan. Jalan kaki, naik sepeda berkilo-kilo, itu harus dilakukan untuk mengajar. Tetapi ada rasa dosa kalau tidak masuk mengajar. Salah satu yang membuat menjadi guru itu mengasyikkan adalah guru itu tidak mengenal kata pensiun, pensiunnya sebagai pegawai saja. Di rumah saja masih dipanggil 'Pak Guru' ”.<sup>7</sup>

Hal seperti itulah yang menjadikan A. Malik Fadjar menjadi seorang yang optimis dalam setiap langkah yang dijalani. Di berbagai waktu ketika bersama penulis, beliau juga sering melontarkan kalimat-

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008.

kalimat yang mendorong penulis untuk hidup optimis dan percaya diri. “Nantinya kalau sudah menjadi seorang guru, anda pasti akan tau bagaimana harus menempatkan diri anda dalam masyarakat. Makanya, cepat-cepatlah dan jangan lupa optimis, percaya diri dan juga ikhlas itu penting bagi seorang guru”.<sup>8</sup>

Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIS) ini, telah merasakan bagaimana cita-duka menjadi guru di daerah terpencil, gaji pas-pasan, ke sekolah harus naik sepeda berkilo-kilo. Bahkan, saat mengajar di Universitas pun sering berangkat mengajar dengan membonceng motor mahasiswa. Meskipun hidup sulit saat menjadi guru, A. Malik Fadjar mengaku merasa bersalah apabila tidak bisa memenuhi kewajibannya mengajar dan merasa memiliki kebahagiaan tersendiri bila mengajar. “Ada suatu perasaan yang tidak bisa saya ungkapkan saat berdiri di depan kelas dan mengajar. Sesuatu yang tidak dapat dibayar dengan materi”.<sup>9</sup>

Pada saat ini, A. Malik Fadjar pun yakin bahwa masih banyak guru di seluruh Indonesia yang mempunyai komitmen tinggi dalam mendidik anak bangsa. “Saat ini pun masih banyak guru yang baik, yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pendidikan dan masa depan generasi bangsa”.<sup>10</sup>

Kondisi guru yang pas-pasan tidak pernah membuatnya berhenti menjemput masa depan. Setelah menjadi guru Agama selama empat tahun, pada tahun 1963, beliau meneruskan pendidikan ke jenjang Sarjana Muda di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang. Kemudian, dilanjutkan lagi hingga meraih gelar Sarjana pada tahun 1972. Begitu lulus, beliau mengajar di Almamaternya. Sampai

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008.

kemudian menjadi Sekretaris Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel hingga tahun 1979.

b. Menjabat Sekretaris Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang

Putera keempat dari tujuh bersaudara pasangan Fadjar Martodiharjo dan Salamah ini, tidak hanya menjadi Guru di SR, dedikasi A. Malik Fadjar dalam dunia pendidikan berlanjut menjadi Dosen begitu lulus dari Almamaternya dan menempati jabatan Sekretaris Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya sampai tahun 1979.

A. Malik Fadjar juga dipercaya menjabat Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (Unmuh Malang) tahun 1983 hingga tahun 1984.

“Sebelum menjadi Rektor UMM, saya juga pernah menjadi Dekan Fisip, pernah menjadi Sekretaris Fakultas Tarbiyah IAIN Malang yang sekarang berubah menjadi STAIN. Saat merangkap Rektor UMS saya melakukan pembenahan-pembenahan kembali dan membesarkannya”.<sup>11</sup>

Ketika menjabat sekretaris Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, A. Malik Fadjar sering mendapat kritik dari banyak kalangan mengenai apa yang di lakukannya. Karena gerak dan kiprahnya cenderung *unpredictable*, beliau menggagas lahirnya Forum Studi Pascasarjana (FSP) IAIN Malang yang berfungsi sebagai media komunikasi, diskusi, perdebatan dan sekaligus wadah mencari solusi bagi pencerahan pendidikan Islam di masa depan. Bahkan lebih dari itu, hal perilaku akademik A. Malik Fadjar yang paling menyalahi kinerja birokrasi adalah diangkatnya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sepulang dari Baghdad sebagai dosen luar biasa dengan pangkat dan golongan Penata Muda III/a (Asisten Ahli Madya) di IAIN Sunan

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008.

Ampel Malang yang sebelumnya ditolak oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>12</sup>

Selain hal-hal yang banyak menuai kritik, A. Malik Fadjar juga menghidupkan LP3M (Lembaga Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Melalui lembaga ini, banyak hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan IAIN Sunan Ampel dan karenanya, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel dikategorikan sebagai *pilot project* Fakultas Tarbiyah di lingkungan IAIN se-Indonesia.

#### c. Menjadi Rektor UMM dan Rektor UMS

A. Malik Fadjar berkecimpung di UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) sejak belum ada, dan menanganinya sekaligus merangkap jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dari tahun 1996-2000.

”Saya menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan menangani UMM sejak mulai tidak ada menjadi ada, dan saya membesarkannya selama kurang lebih 16,5 tahun. Kemudian merangkap Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) selama empat tahun mulai tahun 1996-2000”.<sup>13</sup>

Sungguh tidak sembarang orang yang mampu memangku dua jabatan sekaligus dalam dunia yang sarat dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan banker sumber daya manusia. Bukan hanya sekolahan, perusahaan, komunitas atau tempatnya eksekutif, tetapi sebuah Universitas yang sekarang menduduki jajaran lembaga pendidikan berkelas di dunia perguruan tinggi nasional.

A. Malik Fadjar Beliau mengatakan bahwa:

”Pengalaman yang paling berharga selama menangani dunia pendidikan adalah bahwa manusia itu tidak bisa dikelola seperti mengelola barang-barang atau kantor secara birokratis. Mengelola manusia harus dengan pendekatan manusiawi. Pendidikan, semuanya menyangkut pergumulan sumber daya manusia, Jadi, di situ semakin nyata bahwa persoalan pendidikan

<sup>12</sup> Lihat Ahmad Barizi, *op. cit.*, hlm. 12.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008.

menjadi bagian dari *human asset* nasional. Oleh sebab itu, juga harus ditangani lebih serius”.<sup>14</sup>

#### d. Menjabat Ditjen Binbaga Islam Depag RI

Nama A. Malik Fadjar semakin berkibar dan dikenal banyak tokoh-tokoh senior baik di dalam maupun di luar negeri, setelah beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel pada penghujung tahun 1995, beliau dipanggil ke Jakarta untuk menduduki jabatan Dirjen Binbagais Departemen Agama RI.

”Ketika Menteri Agama Pak Tarmizi Taher memberikan sambutan pengukuhan Guru Besar saya, beliau mengatakan; ”Insya Allah Pak Malik akan kita tarik ke Jakarta”. Ternyata benar, selang beberapa bulan saya dipanggil ke Jakarta dan diangkat menjabat sebagai Dirjen (Direktorat Jenderal) di Departemen Agama Republik Indonesia menggantikan Ibu Andi Rasdyanah. Saya menjabat Dirjen Binbagais Depag RI selama kurang lebih 2 tahun (1996-1998)”.<sup>15</sup>

Ketika memnjabat Dirjen Binbagais Departemen Agama RI., A. Malik Fadjar tidak hanya berkreasi di dalamnya, tetapi juga banyak melakukan perubahan dan pembenahan dengan mngeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan tentang pengembangan dan pemberdayaan Perguruan Agama Islam (Madrasah) dalam menghadapi tantangan modernitas dan era globalisasi.

Menurut beliau, ada tiga hal penting yang sangat mendesak yang harus dilakukan untuk memajukan, memberdayakan, dan mengembangkan madrasah. Tiga hal tersebut yaitu: *Pertama*, kebijakan itu pada dasarnya harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam. *Kedua*, kebijakan itu harus memperjaelas dan memperkuat keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, produktif, dan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Juni 2008. lihat pula Ahmad Barizi, *op. cit.*, hlm. 25.



sederajat dengan sistem pendidikan umum. *Ketiga*, kebijakan itu harus dapat menjadikan madrasah mampu merespon tuntutan masa depan.<sup>16</sup>

#### e. Menjadi Menteri Agama RI

A. Malik Fadjar akhirnya sempat memimpin Departemen Agama pada masa Presiden B. J. Habibie, beliau berada dalam Departemen ini tidak lama, karena pemerintahan B. J. Habibie juga sebentar, kemudian pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), beliau pun kembali ke kampus untuk mengajar lagi.

“Dalam Kabinet Persatuan pada masa Presiden B. J. Habibie, saya juga pernah menjadi Menteri Agama selama satu tahun lima bulan. Karena manusia pada hakekatnya memiliki ikatan-ikatan ketuhanan yang disebut dengan iman, keyakinan. Di situ, sebetulnya kehadiran sejarah Departemen Agama juga ada dua hal penting. *Pertama*, yang diutamakan adalah untuk membangun pendidikan agama, dan *Kedua*, baru peradilan agama. Itu intinya”.<sup>17</sup>

Selama satu tahun lima bulan di Departemen Agama, A. Malik Fadjar sudah banyak membuat kemajuan dan memperbaiki citra Departemen Agama di mata masyarakat. Antara lain adalah dua hal penting dalam urusan Agama dan keberagamaan masyarakat, yaitu; membangun Pendidikan Agama, dan peradilan Agama. Termasuk adalah mengeluarkan kebijakan tentang konfersi IAIN menjadi UIN dan Fakultas Cabang menjadi STAIN dengan lahirnya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, serta membenahi manajemen haji dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang ditandatangani dan disahkan oleh Presiden B.J. Habibie tertanggal 3 Mei 1999 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara RI. No. 53 Tahun 1999, yang berarti menghapus seluruh produk hukum sebelumnya yang terkait tentang masalah haji dan umrah.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Juni 2008.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP. Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Juni 2008.

”Sebelum menjabat Mendiknas, saya juga sempat menjabat Menteri Agama, departemen yang kaya penyimpangan. Saat menjabat Menteri Agama itu, saya pernah pegang uang sampai triliunan. Yang namanya haji, pasti uangnya besar sekali. Tapi maaf-maaf saja kalau saya diajak menyelewengkan dana itu. Saya adalah satu-satunya menteri agama yang tidak naik haji. Tugas saya di sana adalah mengawasi saja. Jadi begini, kalau kita memberi keteladanan, setahap demi setahap, pasti akan ada hasil”.<sup>18</sup>

#### f. Menjabat Menteri Pendidikan Nasional

Dunia pendidikan kembali memanggil A. Malik Fadjar. Kali ini justru sebagai menteri atau orang pertama di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Dunia yang memang sudah lama diselami, A. Malik Fadjar dipercaya menjabat jabatan ini pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri (Kabinet Gotong Royong), tahun 2001-2004.

Saat Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan menteri dalam Kabinet Gotong Royong, A. Malik Fadjar sedang mengajar mahasiswa dalam kelas di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berita terpilihnya menjadi Menteri Pendidikan Nasional didengar dari Radio.

Sesaat setelah pelantikan, kepada pers beliau mengatakan:

”Masalah paling mendesak adalah bagaimana segera mewujudkan pendidikan yang lebih memanusiawikan manusia. Pendekatannya lebih humanis, yaitu ada keseimbangan antara *head* (rasio), *heart* (perasaan) dan *hand* (perbuatan), tetapi semuanya harus saling bersinergi, melibatkan keseluruhan unsur tidak jalan sendiri-sendiri. Selama ini, pendekatan yang digunakan dalam dunia pendidikan kita masih lebih birokratik, monopolisme, sehingga menyesakkan dada. Belum menumbuhkan suasana demokratis dan memberikan kebebasan hak asasi manusia”.<sup>19</sup>

A. Malik Fadjar menegaskan, bahwa pendidikan harus berorientasi pada masa depan. Sementara, tuntutan-tuntutan masa depan

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Juni 2008. Lihat pula dalam Ahmad Barizi, *op. cit.*, hlm. 26-27.

<sup>19</sup> Lihat: <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/a/abdul-malik-fadjar/index.shtml>. Diakses pada hari Selasa, 15 Mei 2007. 12: 15 WIB.

terhadap perkembangan zaman, terus berubah. Karena itu, “tanggung jawab menjadi seorang menteri tidak hanya saat ini, tetapi tanggung jawab masa depan”.<sup>20</sup> Kendati A. Malik Fadjar termasuk menteri berusia tua (nomor dua paling tua setelah Kwik Kian Gie), di jajaran Kabinet Gotong Royong, selalu bersemangat dalam bekerja.<sup>21</sup>

A. Malik Fadjar sering melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, untuk melihat potret pendidikan Tanah Air, termasuk saat keliling daerah dan melihat kondisi SD di beberapa daerah, hatinya menangis.

“Menangis hati saya melihat itu semua. Bangunan SD itu tidak pernah direnovasi sejak tahun 1970-an. Waktu berkunjung ke Irian, saya melihat, merasakan, dan berpikir, pantas mereka minta merdeka, lha... ternyata tidak ada pembangunan di sana”.<sup>22</sup>

Sebagai orang nomor satu dalam sebuah departemen yang diposisikan sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab untuk mencetak generasi penerus bangsa. Sementara hingga saat ini, pendidikan bangsa ini masih dinilai tertinggal. Ketertinggalan atau kegagalan pendidikan itu pula disebut sebagai penyebab utama rontoknya bangsa ketika menghadapi krisis multidimensi. Lebih prihatin lagi, manakala korupsi di Depdiknas sudah membudaya.

A. Malik Fadjar banyak menaruh harapan: ”mudah-mudahan di Depdiknas ini tidak terjadi hal seperti itu”.<sup>23</sup> Harapan itu muncul karena ketika menjabat di Depdiknas A. Malik Fadjar terus memantau proyek-proyek yang ada. Salah satu yang dilakukan adalah tidak pernah mau didatangi rekanan pemborong.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Kompas/soelastri*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/31/dikbud/foto09.htm>. Mendiknas Abdul Malik Fadjar, Rabu (29/5), meninjau beberapa perpustakaan sekolah, di antaranya perpustakaan di Madrasah Aliyah (MA) Negeri 15, Jakarta Utara. Selain melihat koleksi buku-sebagian besar ternyata buku paket (pelajaran)-Malik juga menyarankan agar buku-buku di perpustakaan ditata menurut katalognya, sehingga memudahkan pencarian. Kepada sekolah-sekolah yang dikunjungi, Malik Fadjar memberi bantuan sejumlah uang khusus untuk pembelian buku-buku perpustakaan sekolah.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Juni 2008.

”Kalau pemborong datang untuk mengobrol, saya persilakan. Tapi kalau sudah mulai membicarakan proyek, saya tidak mau. Itu memang sudah menjadi watak saya sejak menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan Surakarta. Di dua lembaga pendidikan tinggi itu, dulu saya membangun bermiliar-miliar, dan tidak pernah mau untuk berbicara soal proyek dengan kontraktor”.<sup>24</sup>

A. Malik Fadjar pun berupaya melakukan kontrol ke bawah. Diawali keteladanan, dari dirinya sendiri. Kemudian, setiap ada kasus atau tender selalu dicek. Kalau merasa ada yang tidak beres, langsung dibatalkan. A. Malik Fadjar tidak peduli siapa yang memegang, pokoknya kalau ada keanehan, di minta untuk segera dibatalkan.

”Hasilnya, *Alhamdulillah*, dana Jaring Pengaman Sosial, Bahan Bakar Minyak (BBM), yang disalurkan melalui Depdiknas relatif bagus. Laporan Depdiknas menjadi laporan terbaik dua tahun 2002-2003 versi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan”.<sup>25</sup>

Selama menjabat di Depdiknas, banyak hal-hal yang dilakukan yang menjadikan prestasi baginya. Antara lain adalah: *Pertama*, A. Malik Fadjar mengadakan otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan berarti pengalihan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dari pusat ke Pemerintah Daerah (PEMDA), yang memandang hubungan pusat dan daerah tidak lagi dalam kerangka hirarkis, tetapi konsultatif. Pemerintah pusat hanya memantau pemberdayaan dengan menyalurkan bantuan dalam model *block grant*, dan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

”Saya memang mengembangkan program *block grant* di Depdiknas. Program ini sangat menguntungkan karena langsung menuju ke sasaran. Orang tidak bisa macam-macam dengan hal itu. Bagi saya, tidak ada toleransi terhadap KKN. Beliau berharap jangan Depdiknas saja yang harus bersih dari KKN,

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Juni 2008.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Juni 2008.

tapi semua sistem pemerintahan. KKN jangan ada lagi. Mental korup harus dihilangkan”.<sup>26</sup>

*Kedua*, merubah beberapa status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). *Ketiga*, menaikkan tunjangan fungsional guru 100-150 persen. *Keempat*, mengesahkan berubahnya beberapa IAIN menjadi UIN. *Kelima*, mengesahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sampai sekarang, A. Malik Fadjar pun masih menguji mahasiswa S2 dan S3. Kalau yang diuji jelek, diminta mahasiswa tersebut mengulang ujian. Karena menurutnya: ”Meluluskan itu sebuah pertanggungjawaban, baik secara institusional, dan juga secara individual”.<sup>27</sup>

#### g. Menjabat Menko Kesra ad-Interim

A. Malik Fadjar menjabat Menko Kesra ad-Interim menggantikan Jusuf Kalla ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dalam pemilu 2004 sebagaimana tertuang dalam surat keputusan presiden RI Nomor B-137 tanggal 22 April 2004. A. Malik Fadjar dilantik pada hari Jum’at 23 April 2004. dan untuk beberapa bulan merangkap sebagai Mendiknas RI.

Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh A. Malik Fadjar ketika merangkap jabatan menko kesra ini, kecuali hanya meneruskan apa yang sudah diprogramkan oleh Menteri sebelumnya. Ada dua hal yang menjadi *mainstream* dari Pak Malik, yaitu pendidikan dan kesehatan. Karena keduanya diyakini sebagai kunci dalam meningkatkan mutu bangsa Indonesia di mata dunia.

”Apa pun dalihnya, pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan kunci pembuka bagi problem-problem kemanusiaan. Jika ingin melihat maju-tidaknya suatu bangsa, maka lihatlah

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Juni 2008.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Juni 2008.

tingkat pendidikan dan kesehatan yang dikandungnya. Keduanya adalah muara dan sekaligus jalan paling utama menuju kesuksesan suatu bangsa”.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, meskipun dengan pegawai sekitar 100 orang, disamping strategi dan kerja sama yang digalang baik dengan Departemen dan Kementerian di bawah koordinasinya, A. Malik Fadjar mampu menyemangati gairah fungsional para pegawai untuk mengimplementasikan program-program yang dicanangkan dalam konteks kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa A. Malik Fadjar adalah salah satu tokoh nasional yang membanggakan, khususnya di bidang pengembangan pendidikan nasional di Indonesia.

A. Malik Fadjar adalah pemerhati, pemikir, dan sekaligus pelaku yang senantiasa *concern* dengan pendidika anak bangsa. Tidak salah bila disebut sebagai ”penggerak reformasi”, khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan di Indonesia.

#### h. Menjadi Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah

Sejak kecil, beliau sudah aktif di kegiatan kepanduan di Yogyakarta, semasa kuliah pun A. Malik Fadjar juga termasuk aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia. Sejak tahun 1972 A. Malik Fadjar aktif di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI), aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ICMI dan juga HIPHIS.

Selain menjadi praktisi pendidikan, A. Malik Fadjar juga aktif di Organisasi Sosial Keagamaan khususnya Muhammadiyah.<sup>29</sup> Pada tahun 1958-1990 beliau menjadi salah seorang anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, menjadi wakil ketua lembaga pengkajian dan pengembangan PP Muhammadiyah tahun 1990-1995 dan menjadi Ketua LPSDM PP Muhammadiyah masa jabatan 1995-2000, dan pada

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Juni 2008.

<sup>29</sup> TIM Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 114. Beliau tercatat memiliki Nomor Buku Muhammadiyah: 547305.

Muktamar Muhammadiyah ke- 44 di Jakarta, beliau terpilih kembali menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Prestasi A. Malik Fadjar yang monumental selama berkecimpung di Muhammadiyah adalah keberhasilannya menjadikan Universitas Muhammadiyah Malang menjadi sebuah Universitas yang megah dan bermutu di Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan KAHMI, dan menjadi anggota Himpunan Pencinta Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS).<sup>30</sup>

#### 4. Karya-Karya A. Malik Fadjar

##### a. Karya Tulis Berupa Buku

Sebagai seorang akademisi dan pakar ilmu pendidikan Islam (terutama yang disandanginya, terakhir, sebagai guru besar dalam Ilmu Kependidikan Islam), A. Malik Fadjar telah menghasilkan beberapa karya tulis dalam bentuk buku. Di antaranya adalah:

- 1) Buku *Kuliah Agama Islam Di Perguruan Tinggi*, diterbitkan oleh: Al-Ikhlash, Surabaya, tahun 1981.
- 2) Buku *Kepemimpinan Pendidikan*, diterbitkan oleh: Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel Malang, tahun 1983.
- 3) Buku *Pancasila Dasar Filsafat Negara: Prinsip-Prinsip Pengembangan Hidup Beragama*, diterbitkan oleh: UMM Press, Aditya Media, Yogyakarta, tahun 1993.
- 4) Buku *Reorientasi Wawasan Pendidikan, Dalam Muhammadiyah dan NU*, diterbitkan oleh: Aditya Media, Yogyakarta, tahun 1993.
- 5) Buku *Pendidikan Islam: Paparan Normatif, Filosofis dan Politis*, diterbitkan oleh: UMM Press, Malang, tahun 1993.
- 6) Buku *Pendidikan Agama dan Kualitas Manusia Indonesia*, diterbitkan oleh: IKIP Malang, tahun 1993.

---

<sup>30</sup> Abudin Nata, Ahmad Sulhi Chotib (ed.), *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 300.

- 7) Buku *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, diterbitkan oleh: Aditya Media, Yogyakarta, tahun 1993.
  - 8) Buku *Pergumulan Pemikiran Pendidikan Tinggi Islam*, diterbitkan oleh: Bestari Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, tahun 1995.
  - 9) Buku *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan*, diterbitkan oleh: University Press, Malang, tahun 1998.
  - 10) Buku *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, diterbitkan oleh: Mizan, Bandung, tahun 1998.
  - 11) Buku *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, diterbitkan oleh: Mizan, Bandung, 1998.
  - 12) Buku *Reformasi Pendidikan Islam*, diterbitkan oleh: Fajar Dunia, Yogyakarta, tahun 1999.
- b. Karya Tulis Berupa Makalah dan Sambutan-Sambutan dalam Berbagai Seminar dan Buku
- Selain karya tulis dalam bentuk buku, juga menuliskan beberapa pemikiran dalam berbagai makalah dan sambutan-sambutan berbagai buku:
- 1) Makalah “Pokok-pokok Pikiran Tentang Strategi Transformasi Umat Islam Indonesia Menyongsong Abad XXI”, makalah ini disampaikan pada Seminar Kerohanian Islam Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
  - 2) Makalah “*First International Conference on Islam and The 21 Century Program and Abstract*”, makalah ini disampaikan dalam Konferensi Internasional yang berlangsung di Leiden, Netherland, 3-7 Juni 1996.
  - 3) Makalah “Sistem Pendidikan dan Kreativitas Anak”, makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional dan Kreativitas Anak ICMI Pusat, pada 10 Februari 1999.



- 4) Makalah "Pelaksanaan Fungsi dan Hak-Hak DPR Dalam Konteks Era Globalisasi". Makalah ini disampaikan dalam Sarasehan Calon Anggota DPR RI 1997-2002 di Bogor, sebagai bahan diskusi kelompok kontekstual.
- 5) Makalah "Kebijakan Umum Departemen Agama dalam Pembinaan Madrasah (Perguruan Agama Islam)", makalah ini disampaikan pada Musyawarah Kerja Nasional Majelis Pengajaran Umat Islam (PU) tanggal 4 april 1997 di Majalengka. Dalam makalah ini, A. Malik Fadjar mengemukakan tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan madrasah sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.
- 6) Makalah "Agama dan Kemiskinan", makalah ini disampaikan pada Seminar Sehari terhadap tanggapan dokumen UNESCO Bangkok mengenai *Basic Education For Empowerment Of The Poor* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga pada tanggal 20 Januari 1998. dalam makalah ini, A. Malik Fadjar menguraikan secara mendalam tentang berbagai variabel yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan.
- 7) Makalah "Dakwah dan Pengembangan SDM". Makalah ini disampaikan sebagai Pokok-pokok Bahasan untuk program pembibitan calon Da'i Muda tahun 1997/1998 yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, 15 April 1997 di Jakarta. Dalam makalah ini, dikemukakan tentang peran Da'i di masa mendatang serta sejumlah kompetensi yang seyogyanya harus dikuasai dan diharapkan para Da'i dapat mengemban tanggung jawab sebagai agen pembaharu dalam peningkatan SDM.
- 8) Makalah "Kebijakan Pembangunan Studi Islam Perguruan Tinggi di Indonesia Menuju PJP II". Makalah ini disajikan pada acara Studium General Program Magister Studi Islam, Pasca Sarjana

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 15 September 1997. Dalam makalah ini, dikemukakan pokok-pokok pikiran dalam sejumlah tantangan masa depan yang menuntut respon cepat dan tepat dari Lembaga Pendidikan Tinggi Islam. Respon ini menuntut kesiapan institusional, manajemen, kurikulum, dan staf.<sup>31</sup>

Selain menulis buku dan makalah-makalah, A. Malik Fadjar juga menyampaikan sambutan-sambutan dalam berbagai buku yang diterbitkan para pakar. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sambutan pada buku "Andai Tuhan Komersil". Pada buku tersebut, Malik Fadjar menyampaikan sambutan tentang Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih Lagi Penyayang yang tidak komersial, tidak pamrih kepada makhluk-Nya. Walaupun makhluk-Nya sering mengkomersilkan dengan atas nama Tuhan atau Agama untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
- 2) Sambutan atas buku "Al-Islam 1, dan 2". Dalam sambutannya ini, A. Malik Fadjar atas nama Rektor UMM mengemukakan tentang upaya-upaya pembinaan dan pengembangan lingkungan sekolah/kampus, guru/ dosen, sistem dan metode, materi dan isi. Pendidikan Islam menurutnya, ibarat pisau bermata dua, yaitu selain harus berperan sebagai wahana pembentuk watak beliau juga harus fungsional, yakni harus merupakan penerapan amal dan kreativitas.
- 3) Pengantar pada buku "Muhammadiyah Sejarah Pemikiran dan Amal Usaha". Dalam buku ini disampaikan pengantar bahwa di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi ada mata pelajaran Kemuhamadiyah dengan tujuan agar para siswa/ mahasiswa mengenal, menghayati dan sekaligus mengamalkan dan mengembangkan cita-cita Muhammadiyah. Karena itu harus ada perubahan pada pola penyajiannya dari pola dan pendekatan yang indoktrinatif menjadi pendekatan yang edukatif dan pedagogik.

---

<sup>31</sup> Abudin Nata, Ahmad Sulhi Chotib (ed.), *op. cit.*, hlm. 305-306

## **B. Pemikiran A. Malik Fadjar Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi Di Indonesia**

### **1. Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan**

Berangkat dari pengembangan pendidikan Islam yang mampu menjanjikan masa depan ini, pemikiran A. Malik Fadjar selanjutnya akan dapat mengarah pada pengembangan madrasah pada era globalisasi di Indonesia. Menurut A. Malik Fadjar, pendidikan Islam adalah:

“.....dalam studi kependidikan, sebutan “pendidikan Islam” umumnya hanya dipahami sebatas sebagai “ciri khas” –jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Demikian pula batasan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional”.<sup>32</sup>

Pendidikan Islam dalam pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, merujuk pada sejarah dan perkembangannya di Indonesia pada masa lalu, dimana sebagian besar masyarakat dalam memahami arti pendidikan Islam memang hanya sebatas pada ciri khas pendidikan yang mengandalkan Agama Islam sebagai ciri utamanya. Dalam artian bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan kepada anak didiknya tentang bagaimana beribadah dan menjalankan ajaran Agama Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, dari sudut pendekatan sistem pendidikan dan kelembagaan, diarahkan sebagai “mekanisme alokasi posisional”. Artinya, sistem pendidikan dan kelembagaannya mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan peserta didiknya ke dalam posisi atau peran ideal tertentu”.<sup>33</sup>

Bertolak dari pendekatan sistem pendidikan dan kelembagaan pendidikan sebagai mekanisme alokasi posisional di atas, demikian diuraikan bahwa:

”Secara jujur harus kita akui bahwa kehadiran madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi yang pendirian dan pengelolaannya berafiliasi pada ormas-ormas Islam seperti

---

<sup>32</sup> A. Malik Fadjar, *Madrasah Dan Tantangan Modernitas*, (Bangung: Mizan, 1998), hlm. 1. Lihat pula ”Visi Pembaruan Pendidikan Islam A. Malik Fadjar”, (Jakarta: LP3NI, 1998), hlm. 3.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Muhammadiyah, NU, dan Persis atau badan-badan/ yayasan-yayasan perguruan Islam, kebanyakan belum mampu menduduki kualitas, posisi serta peran yang diidamkan. Baik bagi kalangan sendiri apalagi bagi lapisan masyarakat tertentu yang secara sosiologis berada pada posisi menengah dan atas. Pendidikan Islam tampaknya masih dalam posisi sebagai “cagar budaya” untuk mempertahankan paham-paham keagamaan tertentu, belum membantu menumbuhkan mobilitas antar generasi demi generasi (Samuel Bowles, 1972). Karena itu, lembaga-lembaga tersebut masih jauh dari perannya sebagai pendidikan alternatif yang menjanjikan masa depan”.<sup>34</sup>

Dengan adanya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan sesungguhnya sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama umat Islam. Bahkan, hal itu kini terasa sebagai kebutuhan yang sangat mendesak terutama bagi kalangan muslim kelas menengah ke atas yang secara kuantitatif terus meningkat belakangan ini.

Kegelisahan dan kehausan masyarakat akan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan dalam setiap sektor kehidupan rasanya semakin menguak dan menggemparkan keadaan masyarakat sekarang. Lebih jauh lagi, A. Malik Fadjar mengutarakan bahwa:

”Kenyataan itu secara tidak langsung menuntut para pengelola pendidikan Islam untuk lebih bersikap rasional dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat luas. Apalagi sekarang, mempersiapkan sumber daya manusia di masa mendatang dan bukan semata-mata sebagai alat untuk membangun pengaruh politik atau alat dakwah dalam arti sempit. Kalau persepsi yang terakhir ini yang diacu dan dijadikan dalih untuk tetap bertahan, maka boleh jadi pendidikan bukan saja tidak menolong masa depan peserta didik, tetapi lebih jauh kebalikan dari itu, dapat dinilai sebagai perbuatan yang merugikan. Oleh karena itu, persoalan dunia pendidikan sebenarnya termasuk peka dan rawan. Pendidikan yang tidak didasarkan pada orientasi yang jelas dapat mengakibatkan kegagalan dalam hidup secara berantai dari generasi ke generasi”.<sup>35</sup>

Namun, apa yang terjadi dalam masyarakat adalah kurang tertariknya masyarakat untuk memilih lembaga-lembaga pendidikan Islam.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Padahal, paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan, yaitu nilai (Agama), status sosial, dan cita-cita. Masyarakat yang terpelajar akan semakin beragam pertimbangannya dalam memilih pendidikan bagi anak-anaknya. Hal ini berbeda dengan kondisi masa lalu yang masih serba terbatas dan terbelakang.

”Tempo *doeloe*, pendidikan lebih merupakan model untuk pembentukan maupun pewarisan nilai-nilai keagamaan dan tradisi masyarakat. Artinya, kalau anaknya sudah mempunyai sikap positif dalam beragama dan dalam memelihara tradisi masyarakatnya, maka pendidikan dinilai sudah menjalankan misinya. Tentang seberapa jauh persoalan keterkaitan dengan kepentingan ekonomi, ketenagakerjaan dan sebagainya merupakan persoalan kedua. Akan tetapi, masyarakat yang sudah semakin terdidik dan terbuka, pada umumnya lebih rasional, pragmatis, dan berpikir jangka panjang. Dan karenanya pula, ketiga aspek tersebut (nilai, status sosial, dan cita-cita) dijadikan pertimbangan secara bersama-sama. Bahkan, dua pertimbangan terakhir (status sosial dan cita-cita) cenderung lebih dominan”.<sup>36</sup>

Namun, bukan keondisi dan keadaan masyarakat yang telah bergeser, melainkan keadaan dan kondisi lembaga pendidikan Islam itu sendiri, yang perlu menata kembali susunan manajemen secara profesional dan futuristik.

”Sebenarnya komitmen masyarakat kita terhadap nilai-nilai agamanya masih cukup tinggi. Bahkan ada kecenderungan meningkat. Hal ini terlihat tatkala muncul pendidikan Islam yang dinilai bermutu dan menjanjikan, maka mereka akan menjadikannya sebagai pilihan pertama. Sebagai contoh dikemukakan di sini, kehadiran sekolah-sekolah pada perguruan Al-Azhar di Jakarta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 di Malang, dan SMU Muhammadiyah 1 di Yogyakarta, yang setiap tahun pelajaran baru selalu dipadati calon siswa. Terhadap lembaga pendidikan seperti ini ternyata “daya beli” masyarakat tinggi walaupun biaya pendidikan cukup tinggi. Dan pemerintah tampaknya tidak keberatan dan tidak membatasi upaya-upaya pengembangan lembaga-lembaga pendidikan yang menyangang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

ciri khas itu. Bahkan, pemerintah merekomendasi sekolah tersebut sebagai salah satu model “sekolah unggul”.<sup>37</sup>

Mewujudkan, mengatur serta mengarahkan sebuah lembaga pendidikan yang dapat menjamin masa depan anak bangsa adalah bukan hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mewujudkan semuanya tentunya membutuhkan waktu, tenaga dan dana yang tidak sedikit, dan perlu menentukan perencanaan-perencanaan yang matang.

”Pengembangan pendidikan Islam bukanlah pekerjaan sederhana karena pengembangan tersebut memerlukan adanya perencanaan secara terpadu dan menyeluruh. Dalam hal ini perencanaan berfungsi membantu memfokuskan pada sasaran, pengalokasian, dan kontinuitas. Dan sebagai suatu proses berpikir untuk menentukan hal yang akan dicapai, bagaimana pencapaiannya, siapa yang mengerjakannya, dan kapan dilaksanakan, maka perencanaan juga memerlukan adanya kejelasan terhadap masa depan yang akan dicapai atau dijanjikan. Oleh karena itu, dalam perencanaan ada semboyan bahwa: “*luck is the result of good planing, and good planing is the result of information well applied*”.<sup>38</sup> (Keberhasilan adalah hasil dari perencanaan yang bagus, dan perencanaan yang bagus adalah hasil dari adanya penerapan informasi dengan baik - Penulis).

Kegiatan perencanaan di atas tentunya telah begitu jauh memberikan gambaran yang cukup jelas, bahwa potensi pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam baik yang berbentuk madrasah dan sekolah maupun perguruan tinggi tampaknya belum menjadi kekuatan aktual. Karena itu, pendidikan Islam masih jauh dari harapan untuk menjalankan fungsi-fungsi alokasi posisional secara makro yang dibutuhkan masyarakat. Keadaan ini menuntut kita untuk melakukan pembenahan dan pengembangan yang lebih jauh dan menjanjikan masa depan.

“Pembenahan dan pengembangan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *macroscopic* (tinjauan makro) dan *microscopic* (tinjauan mikro). Dalam pendekatan pertama, pendidikan dianalisis dalam hubungannya dengan kerangka

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11

sosial yang lebih luas. Sedangkan dalam pendekatan kedua, pendidikan dianalisis sebagai suatu kesatuan unit yang hidup dan terdapat saling interaksi di dalam dirinya sendiri”<sup>39</sup>.

Dua pendekatan yang disebutkan di atas, bersifat saling melengkapi, terutama di tengah-tengah masyarakat yang semakin terbuka dan kompleks yang melahirkan interaksi dengan berbagai aspek kehidupan seperti era globalisasi saat ini. Dengan tegas A. Malik Fadjar mengemukakan bahwa:

”..... Kalau kita ingin menatap masa depan pendidikan Islam yang mampu memainkan peran strategis dan diperhitungkan untuk dijadikan pilihan, maka perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh, seperti berkaitan dengan hal-hal berikut ini. Pertama, kejelasan antra yang dicita-citakan dengan langkah operasionalnya. Kedua, pemberdayaan (*empowering*) kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. Ketiga, perbaikan, pembaruan, dan pengembangan dalam sistem pengelolaan atau manajemen. Dan, keempat, peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan”<sup>40</sup>.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pendidikan Islam dapat berperan lebih artikulatif di masa yang akan datang. Sesungguhnya harus disadari, secara kualitatif lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sekarang ini muncul serta dinilai “terkemuka” (*outstanding*), masih jauh dari tuntutan ideal. Karena memang dalam bahasa pengembangan pendidikan berlaku adagium “*start from the beginning to the end, and end for the beginning*”<sup>41</sup> (Mulai dari awal ke yang akhir, dan yang akhir untuk yang awal -Penulis).

Tentu harus diakui pula, bahwa untuk memenuhi semua itu dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Sistem pendanaan ini harus mendapat perhatian khusus dari kalangan umat Islam. Sebagai alternatif, cara yang dapat ditempuh ialah dengan gerakan wajib infak. Atau dengan mengalokasikan zakat mal yang khusus untuk dana pendidikan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

Langkah-langkah itu ditempuh dengan berpijak pada landasan niat dan tekad bahwa kita umat Islam, sudah seharusnya-lah mewariskan sesuatu yang terbaik bagi generasi mendatang.

## 2. Madrasah dan Tantangan Era Globalisasi

Memasuki era baru dalam sebuah peradaban umat manusia, dapat dipastikan akan terjadi perubahan-perubahan dalam setiap sektor kehidupan, termasuk adalah sektor pendidikan di Indonesia. Merupakan sebuah awal yang baik, apa yang telah dilakukan oleh para tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia terdahulu yang telah menyusun sebuah Sistem Pendidikan Nasional dan telah mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah bagi pendidikan anak bangsa untuk menghadapi setiap perubahan dan tantangan zaman, termasuk adalah era globalisasi saat ini.

”Suatu kenyataan dan sekaligus keunggulan sistem pendidikan nasional dewasa ini adalah daya akomodatifnya dalam mengintegrasikan pranata-paranata pendidikan yang beragam ke dalam satu bangunan sistemik pendidikan nasional. Yakni, dengan kesediaan mengakui ciri-ciri khas yang dimiliki pranata masing-masing”<sup>42</sup>.

Menguarai peradaban global yang sedang berlansung pada saat ini, tidak akan selesai dalam ratusan halaman buku atau sejenisnya. Pendidikan di Indonesia dan madrasah khususnya, pada saat ini sedang berada dalam tarik menarik antara peluang dan tantangan era globalisasi. Oleh karenanya, A. Malik Fadjar menguraikan tentang madrasah sebagai berikut:

”Menggagas soal pendidikan pada dasarnya menggagas soal kebudayaan, soal peradaban. Bahkan secara spesifik gagasan pendidikan akan merambah wilayah pembentukan peradaban di masa depan. Pendidikan, memang, adalah upaya merekonstruksi pengalaman-pengalaman peradaban umat manusia secara berkelanjutan guna memenuhi tugas kehidupannya, generasi demi generasi. Upaya rekonstruksi pengalaman ini dapat kita pahami dari dua sisi sekaligus, yakni sisi proses dan sisi lembaga. Dalam konteks pemahaman ini diskursus yang akan dikemukakan berusaha mendudukan madrasah sebagai lembaga

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.



yang dalam rentang waktu cukup panjang telah memainkan peran tersendiri dalam panggung pembentukan peradaban bangsa. Di dalamnya berlangsung proses tak kunjung henti merekonstruksi pengalaman-pengalaman peradaban anak bangsa Indonesia yang dari segi jumlah tidak mungkin diabaikan”.<sup>43</sup>

Memfungsikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mampu menjawab tantangan peradaban baru pada era globalisasi ini merupakan tugas yang tidak mudah. Secara pribadi A. Malik Fadjar sebagai seorang tokoh dalam bidang pendidikan merasa bahwa beliau masih tetap harus terlibat dalam setiap kiprah madrasah untuk terus maju dan berkembang. Beliau merasa bahwa:

”..... Hal yang tak kunjung berhenti mengusik pikiran saya adalah mampukah madrasah ikut serta membangun akar peradaban modern di negeri ini?, dalam konteks gelombang perubahan yang menerpa hampir kepada seluruh segmen peradaban pada ambang abad ke-21 ini. Gelombang peradaban itu datang baik dari “gejolak magma” kultural dari dalam, internal bangsa dan internal umat Islam, maupun dari arus globalisasi. Namun dalam waktu yang sama, hal ini mau tidak mau menuntut agenda perencanaan-perencanaan dan keputusan-keputusan yang terjabarkan secara spesifik”.<sup>44</sup>

Dalam setiap usaha untuk melakukan suatu perencanaan tentulah memerlukan konsep-konsep yang matang untuk mencapai tujuan yang tepat dan benar-benar menuju pada sasaran. Maka, untuk mengembangkan madrasah diperlukan pemahaman-pemahaman ulang, penataan-penataan ulang, dan perencanaan-perencanaan ulang. Di antaranya adalah: a) makna harfiah madrasah, b) dimensi sejarah dan budaya, c) realitas dewasa ini, d) kebijakan menyongsong era globalisasi, dan e) membangun harapan.

#### **a. Makna Harfiah Madrasah**

Dalam memaknai madrasah, A. Malik Fadjar banyak menguraikannya dalam hampir setiap beliau membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia. Seperti diuraikannya bahwa:

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

”Madrasah dalam khazanah kehidupan manusia Indonesia merupakan fenomena budaya yang telah berusia satu abad lebih. Bahkan, bukan satu hal yang berlebihan, madrasah telah menjadi salah satu wujud entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya. Secara berangsur namun pasti, ia telah memasuki arus utama pembangunan bangsa pada abad ke-21 ini”.<sup>45</sup>

Betapa tidak, dalam kenyataan madrasah-madrasah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air adalah tempatnya para pejuang-pejuang agama, pejuang ilmu pengetahuan dan pejuang bangsa yang telah banyak menjadikan anak-anak bangsa Indonesia mampu bertahan dan mengikuti era baru peradaban dunia saat ini, yakni era globalisasi. Memang pada kenyataannya bukan lembaga pendidikan Islam asli dari bangsa sendiri.

”Madrasah bukan suatu yang *indigenous* (pribumi) dalam peta pendidikan di Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan oleh kata “madrasah” itu sendiri, yang berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah kata ini berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia “sekolah” (yang notabene juga bukan kata asli dari bahasa kita. “Sekolah” dialihkan dari bahasa asing, misalnya *school* ataupun *scola*)”.<sup>46</sup>

Dari pemaknaan madrasah di atas, madrasah memang bukanlah sebuah lembaga pendidikan Islam asli Indonesia. Namun kiprahnya untuk saat ini harus diakui bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang telah mampu menciptakan manusia-manusia yang *genuin* dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan telah tersebar di seluruh pelosok negeri yang lebih dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam jumlah yang tidak diragukan lagi.

”Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, dipimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik. Di lembaga ini anak memperoleh pembelajaran hal-ikhwal atau seluk-beluk Agama dan keagamaan. Sehingga dalam pelaksanaannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah Agama”<sup>47</sup>.

#### **b. Dimensi Sejarah dan Budaya**

Mencermati makna harfiah madrasah di atas, sebenarnya kita harus dapat mencermati terjadinya peristiwa ”okulasi” kebudayaan yang telah ada sejak dulu, dimana madrasah merupakan sebuah ciri khas lembaga pendidikan umat Islam Indonesia yang berbeda dari lembaga-lembaga pendidika lain yang memiliki misi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia islami yang sanggup memasuki era globalisasi dengan kekuatan imtak, iptek, dan kekuatan budaya keislaman. A. Malik Fadjar menguraikan bahwa:

”Perjalanan sejarah bangsa telah mengentaskan suatu tatanan mozaik kebudayaan yang dapat kita gambarkan sebagai jajaran dan terkadang perpaduan tradisi-tradisi: a) tradisi prasejarah atau tradisi asli dan lokal; b) tradisi hindu-budha; c) tradisi Islam; dan d) tradisi barat atau modern. Keseluruhan tradisi ini telah menjadi unsur dari dan suatu ramuan yang kemudian membangun entitas budaya Indonesia. Pembangunan entitas budaya semenjak tahapan kemerdekaan, pada saat mencari dan mengukuhkan kebudayaan Nasional, sampai dengan tahapan kontemporer dewasa ini ketika pembangunan memasuki era industrialisasi, informasi, dan era globalisasi yang lazim pula disebut era kebangkitan Nasional II, telah mengalami pergumulan yang terkadang mencengangkan (dalam kadar tertentu sampai merambah ke ketegangan politis). Dapat diibaratkan, tatanan mozaik kebudayaan terus mengalami dinamika secara keberlanjutan. Unsur-unsur ataupun sub-sub entitas budaya tidak seluruhnya melebur dalam satu rumusan tunggal. Realitas kebhinekaan betapapun harus diterima dengan kelapangan dada”<sup>48</sup>.

Berbekal kerangka konseptual sejarah dan budaya, dapat disimak tentang pranata pendidikan Islam formal yang bernama

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

madrasah seperti sudah disinggung di muka. Madrasah bukanlah suatu yang berwatak *indigenous* (asli). Ketika kita mengurai tentang lembaga pendidikan madrasah, kita tentu harus menengok pada pangkal budaya lembaga pendidikan Islam yang telah ada sebagai lembaga pendidikan Islam yang *indigenous*.

”Kalau kita mengkaji pranata pendidikan Islam, mestilah kita menatap pondok pesantren. Lembaga pendidikan pondok pesantren inilah yang oleh banyak peneliti, ilmuwan, ataupun budayawan dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki watak *indigenous*.

Pondok pesantren dipandang sebagai perangkat sosialisasi dan enkulturasi yang memiliki kontribusi kebudayaan dengan lembaga pendidikan yang telah lama berakar, yang sering disebut mandala. Pola pembelajaran pondok pesantren tidak jauh berbeda dengan sistem yang berlaku pada lembaga pendidikan “asli” tersebut. Tentu dengan isi yang mulai berbeda, yakni memasukkan pelajaran atau ajaran “baru” yang keudian dikenal sebagai Agama Islam”.<sup>49</sup>

Berangkat dari lembaga pendidikan pondok pesantren di atas, maka penemuan format pendidikan bernama madrasah dapat ditelusuri dengan berkembangnya pendidikan madrasah pada saat ini.

”Format madrasah dari waktu ke waktu menjadi semakin jelas sosoknya, sementara isi dan visi keislaman terus mengalami perubahan. Sejak akhir abad ke-19, kepustakaan mencatat perubahan pemikiran Islam di wilayah nusantara (Indonesia). Hal ini seiring dengan semakin kuatnya proses pembentukan *intellectual webs* (jaringan intelektual) di kalangan umat Islam. Jaringan ulama semakin mengentalkan corak Islam murni. Nuansa mistik tentu tidak hilang, namun semakin mendekati kaidah-kaidah syariah yang lebih sunni. Hal ini kelak ditandai dengan muncul dan berkembangnya neosufisme dalam kehidupan Islam”.<sup>50</sup>

Dengan demikian dapat ambil pengertian melalui pemahaman dan pembenahan dimensi sejarah dan budaya. A. Malik Fadjar lebih lanjut menguraikan:

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

”Pengalihan khazanah peradaban barat ke wilayah Nusantara juga menjadi bagian tersendiri dari sejarah dan kehidupan bangsa. Proses ini berlangsung dalam kurun waktu panjang, sejalan dengan hegemoni politik Belanda atas negeri-negeri, pulau-pulau, atau wilayah-wilayah, bahkan seluruh kawasan nusantara yang di kemudian hari menjadi negara Indonesia. Hegemoni politik diwujudkan dalam bentuk pemerintahan jajahan, yang disebut pemerintah Hindia Belanda.

Untuk memenuhi tuntutan akan sumber daya manusia yang bisa menopang kebutuhan roda pemerintahan serta oleh dalih etis, pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan sekolah. Intervensi pendidikan pemerintah Hindia Belanda menjadi intensif dan ekstensif selama beberapa dasawarsa dalam abad ke-20, sebelum mereka dikalahkan Jepang. Kebijaksanaan “*ereschald*” atau “balas budi”, atau yang kemudian sangat terkenal dengan kebijakan politik etis, menjadi sangat berarti bagi perluasan pendidikan Barat di Indonesia”.<sup>51</sup>

Kemudian dapat ditambahkan dengan panjang lebar pula, bahwa:

Perkembangan pendidikan Barat sebagai buah dari intervensi budaya dan politik pemerintah Hindia Belanda dalam paro pertama abad ke-20 ternyata berpengaruh pula terhadap pembentukan format madrasah. Gerakan internal pembaruan Islam sudah barang tentu merupakan variabel penting dalam pembentukan format madrasah. Ada dua kecenderungan yang dapat diidentifikasi.

*Pertama*, madrasah-madrasah *Diniyah-Salafiyah* terus tumbuh dan berkembang dengan pertambahan jumlah maupun penguatan kualitas sebagai lembaga *tafaqquh fid-din*, yakni lembaga untuk (semata-mata) mendalami Agama.

*Kedua*, makin bermunculan madrasah-madrasah yang selain mengajarkan dan mendidikkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda, seperti Madrasah Adabiyah di Sumatra Barat, dan Madrasah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Pesantren Islam, PUI dan Nahdlatul Ulama. Bahkan menarik, ada pula madrasah yang sudah memasukkan ke dalam kegiatan kurikulumnya upaya membangun ekonomi kerakyatan di lingkungan umat Islam, seperti dilakukan oleh PUI di Majalengka. Pola-pola

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

madrasah ini dapat ditemui sampai sekarang. Perubahan-perubahan mungkin sekali dialami oleh madrasah karena tuntutan penyesuaian maupun *reinvention* (penemuan kembali)”.<sup>52</sup>

Demikianlah hendaknya melalui pemahaman dan pembenahan dimensi sejarah dan budaya yang telah tertanam dan berakar pada masyarakat Indonesia dapat dijaga dan dilestarikan melalui penemuan format pendidikan Islam berupa madrasah yang sekarang telah tersebar luas di seluruh pelosok Nusantara.

### c. Realitas Dewasa Ini

Memahami dan mencermati keadaan dan kondisi lembaga Pendidikan Islam, madrasah juga merupakan orientasi pengembangan madrasah dalam menghadapi tantangan perubahan era globalisasi saat ini. Pak Malik menguraikan:

”Bagaimana realitas madrasah dalam kurun Indonesia merdeka, setelah negeri ini melewati ulang tahun emas? Semua mengetahui bahwa madrasah merupakan realisasi pendidikan yang menampung aspirasi sosial-budaya-Agama penduduk Indonesia yang memeluk Agama Islam, yang secara kultural berakar kuat pada kelompok masyarakat yang disebut santri. Masyarakat menjatuhkan pilihannya pada madrasah bagi wahana pendidikan putra-putrinya tentu dengan dorongan yang berbeda-beda. Akan tetapi, secara umum dan kolektif, dorongan-dorongan tersebut, mencerminkan komitmen keagamaan yang kuat. Bisa terjadi mereka terpanggil oleh seruan hendaklah ada di antara kamu sebagian yang terpanggil untuk medalami Agama (QS. Al-Taubah [9]: 122)”.<sup>53</sup>

Dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan para tokoh pendidikan di Indonesia, akhirnya madrasah sekarang telah berkembang sebagaimana kondisi saat ini yang digambarkan oleh A. Malik Fadjar:

”Madrasah dewasa ini berdiri secara berdampingan dengan sistem persekolahan yang lain. Sebagian besar organisasi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

madrasah disusun serupa dengan organisasi persekolahan. Secara bertingkat ada Madrasah Ibtidaiyah atau MI, ada Madrasah Tsanawiyah atau MTs; ada Madrasah Aliyah atau MA. Madrasah-madrasah itu tingkat kesederajatannya sama dengan SD, SLTP, dan SMU. Komposisi mata pelajaran di madrasah mencakup komponen-komponen mata pelajaran Agama, seperti Al-Quran, hadis, fiqih, akidah dan akhlak, sejarah kebudayaan Islam, serta bahasa Arab. Komponen-komponen mata pelajaran ilmu sosial mencakup geografi, sejarah, pendidikan moral pancasila, sosiologi, dan antropologi. Komponen-komponen mata pelajaran eksakta mencakup ilmu pengetahuan alam, kimia, fisika, biologi, dan matematika. Selain itu, ada pula mata pelajaran seperti pendidikan olah raga dan kesehatan, kesenian, bahasa, (Indonesia maupun Inggris), dan keterampilan”.<sup>54</sup>

Hingga akhirnya, pada tahun terakhir (2007) dapat di ketahui madrasah-madrasah yang tersebar di seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara jumlahnya dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga madrasah Aliyah adalah: 736.412 madrasah, termasuk di dalamnya RA dan Madin. Jumlah madrasah-madrasah yang disebutkan di atas, 96% lebih dari jumlah itu merupakan madrasah swasta.

Diakui bahwa pertumbuhan dan perkembangan sekolah yang berada dalam wilayah supervisi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Departemen Pendidikan Nasional (serta Departemen Dalam Negeri) cukup menggembirakan. Cukup menarik bahwa pertumbuhan itu dibarengi dengan makin banyak berdiri Madrasah-madrasah Diniyah, yakni madrasah-madrasah yang keseluruhan mata pelajarannya adalah mata pelajaran Agama. Dapat dipahami bahwa pertumbuhan madrasah-madrasah diniyah, yang saat ini jumlahnya berkisar 38.085 buah, mengekspresikan tuntutan aspirasi masyarakat agar putra-putri mereka mengenyam pelajaran dan pendidikan Agama lebih banyak. Mereka umumnya merasa bahwa pelajaran dan pendidikan Agama di sekolah-sekolah umum tempat putra-putri mereka belajar belum cukup.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

Dalam kenyataan ini A. Malik Fadjar mengutarakan bahwa:

”Realitas lain yang tidak bisa diabaikan adalah banyaknya penyelenggaraan MI, MTs, dan MA yang berada dalam naungan pesantren atau Pondok Pesantren. Madrasah-madrasah serupa ini menciptakan satu mekanisme tersendiri guna menutupi kekurangan pelajaran dan pendidikan agama dalam kurikulum madrasah. Seperti sering terlontar di tengah-tengah masyarakat, kurikulum madrasah sekarang ini sangat memungkinkan para siswanya mendapatkan ilmu pengetahuan agama yang jauh dari memadai serta pemahaman dan penghayatan Islam yang dangkal. Madrasah yang berada dalam naungan pondok pesantren memberikan kesempatan kepada para siswanya (santri) untuk menambah kekurangan ilmu pengetahuan agama melalui pengajian-pengajian kitab di luar jam madrasah dibawah bimbingan para kiai atau ustadz. Dengan tinggal di pondok pesantren, siswa madrasah dapat memperoleh bimbingan dan kesempatan menjalankan Agama lebih intensif”.<sup>55</sup>

Demikianlah realitas madrasah menampilkan sosok beragam sebagai dampak diversifikasi pendidikan yang berlangsung di dalamnya.

#### **d. Kebijakan Menyongsong Era Globalisasi**

Beranjak dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan madrasah hingga kurun sekarang ini, Departemen Agama dan departemen pendidikan tetap terus berusaha mengembangkan intervensi terencana untuk menjadikan madrasah fungsional sebagai salah satu lembaga layanan pendidikan bagi penduduk muslim Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

”Tidak seluruh kebijakan lahir dengan gampang, ia harus memiliki kekuatan tawar-menawar kultural dan, dalam kadar tertentu, bisa bersifat politis. Sekurang-kurangnya untuk melahirkan kebijakan madrasah perlu diakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>56</sup> *Ibid.*



Demikian A. Malik Fadjar menguraikan tentang alur dan proses kebijakan dalam menyongsong perubahan ini dengan penuh pertimbangan. Antara lain sebagaimana:

”Apa pun perubahan-perubahan yang ingin disongsong, kebijakan-kebijakan mengembangkan madrasah perlu mengakomodasikan tiga kepentingan. *Kepentingan pertama* adalah bagaimana kebijakan itu pada dasarnya harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam. Yakni, menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman. Dengan jargon santri dapat kita katakan bahwa madrasah didirikan untuk menanamkan dan menumbuhkan Akidah Islamiah putra-putri umat dan bangsa. Lebih dari itu, diharapkan agar madrasah dapat melahirkan golongan terpelajar yang bisa menjalankan peran *tafaqquh fid-din*.

*Kepentingan kedua* adalah bagaimana kebijakan itu memperjelas dan ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif, sederajat dengan sistem sekolah. Porsi dari kebijakan ini tidak lain agar pendidikan madrasah sanggup mengantarkan peserta didik memiliki penguasaan *the basic* secara memadai, yaitu penguasaan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam bidang bahasa, matematika, fisika, kimia biologi, ilmu pengetahuan sosial dan pengetahuan kewarganegaraan. Madrasah juga merupakan tempat persemaian yang baik untuk menumbuhkan kreativitas seni, serta juga sebagai tempat berlatih dalam mengembangkan keterampilan bekerja.

*Kepentingan ketiga* adalah bagaimana kebijakan itu bisa menjadikan madrasah dapat merespon tuntutan-tuntutan masa depan. Untuk ini madrasah perlu diarahkan kepada lembaga yang sanggup melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, era industrialisasi, ataupun era informasi. Secara kultural tugas ini bisa sangat menegangkan sebab tuntutan masa depan terkadang mengancam segmen dasar institusi yang memiliki kepentingan keagamaan”.<sup>57</sup>

Dari ketiga hal tersebut di atas, kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan madrasah dapat mengarah pada kebijakan publik yang mementingkan kaum bawah. Hal yang paling menonjol dalam format

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

kebijakan Pak Malik adalah memberikan peluang seluas-luasnya terhadap madrasah agar dapat merespon tuntutan-tuntutan masa depan, termasuk era globalisasi saat ini.

#### e. Membangun Harapan

Melihat perkembangan madrasah dan realitasnya dewasa ini, diharapkan madrasah dapat menjawab tantangan-tantangan era globalisasi saat ini dengan segala kemampuan dan kemajemukan yang terdapat di dalamnya. A. Malik Fadjar secara panjang lebar menguraikan:

”Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional telah digulirkan dan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur keberadaan madrasah telah diterbitkan. Berdasarkan ketentuan perundangan ini, maka madrasah, sejak dari tingkat ibtidaiyah sampai dengan tingkat aliyah, ditempatkan dalam kedudukan yang sama dengan sekolah-sekolah umum. Perbedaan terletak pada ciri khas Islam yang dikenakan kepada sistem madrasah. Ini tentu lebih mengukuhkan filosofi untuk mengakomodasikan kepentingan keagamaan dengan kepentingan kewarganegaraan.

Secara sah kita dapat menggantungkan harapan agar putra-putri bangsa “yang menjadi pusat *input* madrasah” diolah menjadi sumber daya manusia yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara memadai, serta daya kreativitas yang tinggi pula. Pada gilirannya diharapkan kaum terpelajar keluaran madrasah ini sanggup menjadi sumber daya manusia Indonesia yang bisa merespon masa depannya secara tepat”.<sup>58</sup>

Demikian hendaknya prosedur dan proses pengembangan madrasah diharapkan mampu menghadapi dan menjawab tantangan era globalisasi di Indonesia untuk kemajuan ilmu pengetahuan, agama, dan kesatuan bangsa Indonesia.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

### C. Kebijakan-Kebijakan Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi

Pada era globalisasi yang semakin jauh merambah dalam semua sektor kehidupan, madrasah sebagai lembaga pendidikan tentunya tidak luput dari perkembangan zaman yang sekarang disebut sebagai era globalisasi. A. Malik Fadjar dengan tegas pernah mengamanatkan:

”Agar lembaga-lembaga pendidikan juga kokoh dalam pengembangannya tidak lagi serba sentralistis, maka kita beri mandat pada lembaga-lembaga pendidikan formal dengan istilah manajemen berbasis sekolah. Artinya lembaga-lembaga pendidikan ini lebih diberi kekuatan secara otonomi dalam mengelola dan mengembangkan misi-misi maupun proses menuju kualitasnya. Dari hal tersebut, ada tiga tantangan berat yang sedang kita hadapi saat ini. *Pertama*, bagaimana mempertahankan dari serangan krisis yang sekarang. Apa yang kita capai jangan sampai hilang. Karena itu kalau ada yang sifatnya darurat, juga kita tempuh dengan *emergency*. Seperti anak-anak gelandangan, anak-anak pengungsi, banjir kita beri beasiswa, dan sebagainya. *Kedua*, tidak bisa diingkari bahwa kita berada dalam suasana global di bidang pendidikan. Kompetisi itu adalah niscaya. Baik kompetisi secara Nasional, regional maupun internasional. Sekarang kita kompetisi dengan Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagainya. *Ketiga*, hal lain yang tidak bisa tidak harus kita jawab adalah demokratisasi, otonomi, desentralisasi. Kita juga harus menghargai keberagaman kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan sekolah-sekolah”.<sup>59</sup>

A. Malik Fadjar mengatakan ”mengelola pendidikan adalah mengelola masa depan, yang berarti juga mengelola informasi. Orang yang bisa memanager informasi akan memperoleh keberhasilan yang lebih”.<sup>60</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional (UUSPN), pendidikan di Indonesia dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam erti mencakup semua jalur, jenjang, dan teknis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Juni 2008.

<sup>60</sup> A. Mlik Fadjar, *op. cit.*, hlm. 65.

keterkaitan antara pendidikan Nasional dengan seluruh usaha pembangunan Nasional (penjelasan UUSPN, Umum, alenia VII).

Dengan sifatnya yang menyeluruh, semua bentuk kegiatan pendidikan di Indonesia tercakup dalam sistem pendidikan Nasional, termasuk pendidikan di madrasah dan pondok pesantren yang diselenggarakan atau dibina oleh departemen Agama dan selama ini lebih dikenal sebagai lembaga perguruan Agama Islam.

Masuknya madrasah dan pondok pesantren ke dalam kesatuan sistem pendidikan nasional mengharuskan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan dan pembinaan dengan ketentuan dan pokok pikiran yang terdapat dalam UUSPN dan semua peraturan pelaksanaannya.

Di antara ketentuan tersebut adalah ketentuan pasal 14 UUSPN, yang menetapkan bahwa: "anak yang telah menginjak umur tujuh tahun wajib mengikuti pendidikan dasar".<sup>61</sup> Sebagai konsekuensi kebijaksanaan yang menetapkan bahwa semua anak usia antara 7-15 tahun harus mengikuti pendidikan dasar, semua lembaga yang menampung anak didik usia antara 7-15 tahun harus menjual bagian pendidikan dasar secara penuh termasuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Konsekuensi ini telah tertuang dalam peraturan perundangan, yaitu:

1. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar yang menetapkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah adalah SD dan SLTP yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
2. Surat Keputusan No. 0487/U/1992 dan No. 054/U/1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SLTP. Hal ini bukan berarti ada perbedaan lagi antara MI/MTs dengan SD/SLTP selain ciri khas Agama Islam pada MI/MTs.
3. Keputusan menteri Agama No. 369/1993, masing-masing tentang penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29/1990 tentang pendidikan menengah. Ditegaskan bahwa jenjang pendidikan menengah, terdapat lima bentuk satuan pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Umum,

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Keagamaan, Sekolah Menengah Kedinasan, dan Sekolah Menengah Luar Biasa.

5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/1992 tentang Sekolah Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh departemen Agama ditegaskan bahwa "Madrasah Aliyah wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan Sekolah Menengah Umum (SMU)".
6. SK Mendikbud No. 0489/U/1992, departemen Agama juga berkewajiban menyelenggarakan Sekolah Menengah Keagamaan berdasarkan pada PP No. 29/1990 pasal 11 ayat (2) yang menegaskan; "Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri (Pendidikan dan Kebudayaan) kepada Menteri Agama". Sekolah Menengah Keagamaan ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 371/1993 dinamakan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).<sup>62</sup>

Pada tingkat pendidikan sekolah, Departemen Agama menyelenggarakan Raudlatul Athfal/ Bustanul Athfal (RA/BA) yang keberadaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Agama No. 367/1993. dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa RA/BA adalah taman kanak-kanak berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

Di samping satuan pendidikan dalam bentuk madrasah, departemen Agama juga melaksanakan pembinaan terhadap pondok pesantren dan madrasah diniyah. Berdasarkan ketentuan tentang jalur pendidikan, pondok pesantren, dalam arti satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara individual, tidak berjenjang dan berkesinambungan; berada pada jalur pendidikan luar sekolah. Akan tetapi, pondok pesantren dalam arti kampus pendidikan juga menyelenggarakan satuan pendidikan jalur pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan secara berjenjang.

Dengan demikian, pada jalur pendidikan sekolah, satuan pendidikan pada tingkat prasekolah, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan

---

<sup>62</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, "Sejarah Madrasah: Pertumbuhan, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia", [http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insindex.php?i\\_367=st01](http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insindex.php?i_367=st01), hlm. 1. Diakses pada tanggal, 04 Mei 2008.

menengah yang pembinaannya dilakukan oleh Ditjen Binbaga Islam adalah sebagai berikut:

1. Raudlatul Athfal/ Bustanul Athfal, sebagai taman kanak-kanak berciri khas Agama Islam;
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI), sebagai sekolah dasar yang berciri khas Agama Islam;
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs), sebagai sekolah lanjutan pertama yang berciri khas Agama Islam;
4. Madrasah Aliyah (MA), sebagai sekolah lanjutan atas yang berciri khas Agama Islam;
5. Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), sebagai sekolah menengah keagamaan.

Pada jalur pendidikan luar sekolah, satuan pendidikan yang pembinaannya dilakukan oleh Dirjen Binbaga Islam adalah:

1. Pendidikan keagamaan di pondok pesantren yang dilakukan secara individual;
2. Madrasah diniyah.

### **1. Akreditasi Madrasah**<sup>63</sup>

Walaupun jumlah madrasah negeri sangat kecil dibandingkan dengan madrasah swasta, kebijakan penegerian madrasah akan dilakukan secara selektif. Pemerintah tidak berkepentingan menegerikan madrasah-madrasah yang sudah kuat. Kepada madrasah swasta tersebut, pemerintah tetap akan memberikan bantuan pembinaan karena bagaimanapun kuatnya keuangan madrasah-madrasah, dalam bidang pendidikan Iptek masih sangat lemah.

Untuk lebih memacu pengembangan dan kemajuan madrasah swasta tersebut, telah ditempuh upaya penentuan status madrasah swasta yang lazim disebut Akreditasi. Ketentuan tentang akreditasi madrasah swasta ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 310/1989 tentang

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 79-81.

Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, sedangkan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 29/E/1990 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta.

Tujuan dilakukannya akreditasi terhadap madrasah swasta tersebut adalah:

- a. Mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan melalui:
  - 1) Pembakuan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Tenaga kependidikan yang berkualitas.
  - 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang baik.
- b. Mendorong terciptanya dan terpeliharanyaketahanan madrasah dan lingkungannya.
- c. Mendapatkan bahan-bahan bagi perencanaan dalam rangka pembinaan madrasah yang bersangkutan.
- d. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggungjawab.
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan madrasah.
- f. Memudahkan pengaturan mutasi murid/siswa.

Akreditasi terhadap madrasah swasta itu dilaksanakan terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang meliputi komponen-komponen: kelembagaan kurikulum, administrasi sekolah, ketenagaan, murid/siswa, sarana/prasarana, dan situasi madrasah.

Berdasarkan akreditasi terhadap komponen-komponen tersebut, ditetapkan jenjang status madrasah swasta, terdiri dari status terdaftar, diakui, dan disamakan. Jumlah madrasah swasta yang sudah dinilai untuk penetapan jenjang akreditasinya masih kecil, bahkan di beberapa daerah tertentu belum ada sama sekali. Tampaknya, kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi ini adalah terbatasnya dana.

## 2. Kebijakan dan Program <sup>64</sup>

Bertitik tolak dari keadaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan perguruan Agama Islam seperti diuraikan di atas, maka kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah dan pondok pesantren sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkemampuan memadai, sesuai dengan jenis dan jenjang.
- b. Mengupayakan peningkatan efektivitas peranan madrasah negeri sebagai model dan sebagai pengendali mutu pendidikan di madrasah.
- c. Mengembangkan program pendidikan dan meningkatkan kemampuan madrasah dalam melaksanakan perannya sebagai sekolah umum yang berciri khas Agama Islam sehingga dicapai keterpaduan dan keserasian dalam pembinaan dan penyelenggaraan madrasah dalam kesatuan sistem pendidikan Nasional.
- d. Meningkatkan mutu dan kemampuan madrasah aliyah keagamaan dalam menyiapkan lulusannya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik sebagai bagian dari pendidikan calon ulama dan pemimpin islam, maupun untuk terjun ke masyarakat sebagai tenaga menengah di bidang pelayanan keagamaan.
- e. Meningkatkan kemampuan kualitatif dan memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan terutama guru, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mutu pendidikan di madrasah.
- f. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana serta mengembangkan organisasi dan tata kerja untuk mendukung tercapainya efisiensi kerja dalam rangka menetapkan fungsi perguruan Agama Islam.
- g. Meningkatkan kemampuan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dalam melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 95-99.



- h. Meningkatkan kemampuan madrasah swasta agar dapat memberikan peranannya yang lebih besar sebagai mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi dan pemerataan pendidikan menengah.

Dengan memperhatikan keadaan dan permasalahan serta kebijakan tersebut, disusunlah program-program yang secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengerian Madrasah.
- b. Akreditasi Madrasah Swasta.
- c. Pengembangan Perangkat Kurikulum Madrasah.
- d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana.
- e. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Guru.
- f. Peningkatan Kualitas Guru.
- g. Bantuan-bantuan Madrasah Swasta dan Pondok Pesantren.
- h. Peningkatan Kemampuan Pembina Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah.
- i. Pengembangan Program Keterampilan pada Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren.
- j. Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektoral
- k. Peningkatan Pelaksanaan Supervisi, Pemantauan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pendidikan di Madrasah dan Pondok Pesantren.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program di atas, akan dilaksanakan dengan dukungan dana yang berasal dari pembiayaan rutin maupun pembangunan termasuk bantuan dari pihak donor luar negeri. Pada saat ini, pembinaan perguruan agama Islam sedang dan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didukung pendanaannya oleh ADB dan IDB, yaitu:

- a. *Junior Secondary Education Project (ADB)*
- b. *Basic Education Project (ADB)*
- c. *Madrasah Aliyah Quality Improvement Project (ADB).*



**BAB IV**  
**ANALISIS PEMIKIRAN A. MALIK FADJAR TENTANG**  
**PENGEMBANGAN MADRASAH PADA ERA GLOBALISASI**  
**DI INDONESIA**

Melihat perkembangan sosial dewasa ini, pendidikan ternyata menempati titik puncak yang harus berhadapan dengan berbagai macam benturan dan membutuhkan penanganan yang serius dalam menyikapi permasalahan sosial tersebut. Dalam pandangan Abdul Rachman Shaleh, dia menjelaskan bahwa:

Usaha pengembangan di bidang pendidikan madrasah setidaknya dapat dilihat dari dua segi, yaitu: *Pertama*, dari segi kedudukannya sebagai bagian integral dari kesatuan sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini madrasah dituntut untuk mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, di samping harus memiliki hubungan yang akrab dengan sistem Pendidikan Nasional itu sendiri. *Kedua*, dari segi kedudukannya sebagai bagian terpenting dari pembangunan sektor agama yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam hal ini, setiap upaya pengembangan madrasah harus mengacu agar madrasah dapat menunjang pembangunan sektor agama secara keseluruhan dengan tetap memelihara identitas dan karakteristiknya sendiri sebagai sekolah agama dan lembaga keagamaan.<sup>1</sup>

Sehingga, berpijak pada landasan teori pada Bab II dan dari penelusuran pemikiran A. Mlik Fadjar tentang pengembangan madrasah sebagaimana terdapat pada Bab III, maka penulis dapat memberikan analisis pemikiran tokoh pendidikan (A. Malik Fadjar) sebagaimana berikut:

**A. Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi Di Indonesia**

**1. Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan**

Lahirnya seorang tokoh dalam dunia Pendidikan Nasional di Indonesia bernama A. Malik Fadjar merupakan awal dunia baru di bidang pendidikan. Dengan berbagai alasan yang dapat memperkuat pendapat ini, sebagaimana tercermin dalam setiap gagasan dan pemikiran A. Malik Fadjar dalam bidang pendidikan (khususnya tentang madrasah).

---

<sup>1</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 126.

Pada analisis ini, pemikiran A. Malik Fadjar tentang pengembangan madrasah dimulai dari pengertian Pendidikan Islam, menurutnya yang selanjutnya akan mengarah pada era globalisasi di Indonesia sebagaimana telah terjadi pada saat ini, harus lebih dipahami dan diselami makna dan tujuannya dengan cermat dan menyeluruh.

Pendidikan Islam, dari wujud kelembagaannya dapat dipahami melalui tiga pandangan:

*Pertama*, jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggarannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Pada konteks ini, Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikannya. *Kedua*, jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagaimana ilmu yang lain. *Ketiga*, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan lewat program studi yang diselenggarakannya.<sup>2</sup>

Sejalan dengan pengertian pendidikan Islam di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan pendidikan Islam tidak sekedar menyangkut persoalan ciri khas, melainkan lebih mendasar lagi, yaitu tujuan yang diidamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal. Atau dalam pembahasan filsafatnya diistilahkan sebagai ”*insan kamil*” atau ”muslim paripurna”.<sup>3</sup>

Sedangkan, menurut D. Marimba, ”Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian

---

<sup>2</sup> A. Malik Fadjar, *Madrasah Dan Tantangan Modernitas*, (Bangung: Mizan, 1998), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Musthofa Syarif dan Juanda Abubakar, (eds.), *Visi Pembaruan Pendidikan Islam A. Malik Fadjar*, (Jakarta: LP3NI, 1998), hlm. 4.

utama menurut ukuran-ukuran Islam”.<sup>4</sup> Jadi, pendidikan Islam lebih memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan pendidikan lain, yang mana karakteristik tersebut adalah adanya penekanan pada pencarian ilmu, penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah SWT. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *long life education* (penulis) dalam pendidikan modern.<sup>5</sup>

Merujuk pada sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa lalu, dimana sebagian besar masyarakat dalam memahami arti pendidikan Islam memang hanya sebatas pada ciri khas dan ukuran-ukuran bagi pendidikan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Dalam artian bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan kepada anak didiknya tentang bagaimana beribadah dan menjalankan ajaran Agama Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Maka, pengembangan pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan era globalisasi merupakan keharusan dan juga kepentingan yang mendesak.

Adalah niscaya bahwa kehadiran lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan sesungguhnya sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama umat Islam. Bahkan, hal itu kini terasa sebagai kebutuhan yang sangat mendesak terutama bagi kalangan muslim kelas menengah ke atas yang secara kuantitatif terus meningkat belakangan ini.<sup>6</sup>

Dari sudut pendekatan sistem pendidikan dan kelembagaan, oleh A. Malik Fadjar diarahkan sebagai “mekanisme alokasi posisional”. Artinya, sistem pendidikan dan kelembagaannya mendapat kepercayaan

---

<sup>4</sup> Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), hlm. 23.

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 10.

<sup>6</sup> A. Malik Fadjar, *op. cit.*, hlm. 7.

dari masyarakat untuk menyalurkan peserta didiknya ke dalam posisi atau peran ideal tertentu.<sup>7</sup>

Dengan kata lain, mewujudkan dan mengatur serta mengarahkan sebuah lembaga pendidikan yang dapat menjamin masa depan anak bangsa adalah bukan hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mewujudkan semuanya tentunya membutuhkan waktu, tenaga dan dana yang tidak sedikit, dan perlu menentukan perencanaan-perencanaan yang matang. Oleh karena itu, dalam perencanaan ada semboyan bahwa: *“luck is the result of good planing, and good planing is the result of information well applied”*.<sup>8</sup> (Keberhasilan adalah hasil dari perencanaan yang bagus, dan perencanaan yang bagus adalah hasil dari adanya penerapan informasi dengan baik -Penulis).

Abdul Rachman Shaleh, mengharapkan agar pendidikan Islam dalam perkembangannya dikembangkan dalam kerangka pembentukan kepribadian sebagai Muslim yang taat menjalankan agamanya sebagai khalifah Allah di bumi, sehingga program pendidikan Islam secara khusus adalah dalam kerangka program kurikuler yang diwajibkan bagi setiap peserta didik di setiap sekolah.<sup>9</sup>

Kegiatan perencanaan di atas tentunya telah begitu jauh memberikan gambaran yang cukup jelas, bahwa potensi pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam baik yang berbentuk madrasah dan sekolah maupun perguruan tinggi tampaknya belum menjadi kekuatan aktual. Karena itu, pendidikan Islam masih jauh dari harapan untuk menjalankan fungsi-fungsi alokasi posisional secara makro yang dibutuhkan masyarakat. Keadaan ini menuntut kita untuk melakukan pembenahan dan pengembangan yang lebih jauh dan menjanjikan masa depan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3. Lihat pula pada A. Malik Fadjar, “Pengembangan Pendidikan Islam Ditinjau Dari Mekanisme Alokasi Posisional”, makalah beliau yang diterbitkan dalam: Ahmad Barizi dan Mustofa Syarif (eds), *op. cit.*, hlm. 4

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11

<sup>9</sup> Abdul Rachman Shaleh, *op. cit.*, hlm. 7-8.

“Pembenahan dan pengembangan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *macroscopic* (tinjauan makro) dan *microscopic* (tinjauan mikro). Dalam pendekatan pertama, pendidikan dianalisis dalam hubungannya dengan kerangka sosial yang lebih luas. Sedangkan dalam pendekatan kedua, pendidikan dianalisis sebagai suatu kesatuan unit yang hidup dan terdapat saling interaksi di dalam dirinya sendiri”.<sup>10</sup>

pendekatan yang ungkapkan A. Malik Fadjar di atas bersifat saling melengkapi dan saling mengisi kompleks melahirkan interaksi dengan berbagai aspek kehidupan seperti era globalisasi saat ini. Dimana interaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak lagi ada batas, tidak lagi berada pada kawasan atau lingkungan sendiri, melainkan telah terjadi perluasan hingga mendunia.

Lebih jauh dari pada itu, dengan tegas A. Malik Fadjar mengemukakan bahwa:

”..... Kalau kita ingin menatap masa depan pendidikan Islam yang mampu memainkan peran strategis dan diperhitungkan untuk dijadikan pilihan, maka perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh, seperti berkaitan dengan hal-hal berikut ini. *Pertama*, kejelasan antra yang dicita-citakan dengan langkah operasionalnya. *Kedua*, pemberdayaan (*empowering*) kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. *Ketiga*, perbaikan, pembaruan, dan pengembangan dalam sistem pengelolaan atau manajemen. Dan, *keempat*, peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan”.<sup>11</sup>

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pendidikan Islam dapat berperan lebih artikulatif di masa yang akan datang. Sesungguhnya harus disadari, secara kualitatif lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sekarang ini muncul serta dinilai “terkemuka” (*outstanding*), masih jauh dari tuntutan ideal. Karena memang dalam bahasa pengembangan pendidikan berlaku adagium “*start from the beginning to the end, and end*

---

<sup>10</sup> A. Malik Fadjar, *op. cit.*, hlm. 12-13.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

*for the beginning*".<sup>12</sup> (Mulai dari awal ke yang akhir, dan yang akhir untuk yang awal -Penulis).

Memahami situasi dan kondisi seperti ini, A. Malik Fadjar juga tidak tinggal diam. Beliau dengan sigap dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dianggap krusial ini.

"Tentu harus diakui pula bahwa untuk semua itu dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Sistem pendanaan ini harus mendapat perhatian khusus dari kalangan umat Islam. Sebagai alternatif, cara yang dapat ditempuh ialah dengan gerakan wajib infak. Atau dengan mengalokasikan zakat mal yang khusus untuk dana pendidikan".<sup>13</sup>

Atas dasar dan argumentasi yang diungkapkan A. Malik Fadjar di atas, adalah solusi yang utama, istimewa dan sebuah gagasan *futuristik*. Sebagaimana Firman Allah:

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوًى وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْعَانَكُمْ.  
 ﴿محمد: 36-37﴾.

Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. (QS. Muhammad ayat: 36-37).<sup>14</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa mereka yang memiliki kelebihan harta dituntut menyumbangkannya kepada orang yang berhak menerimanya atau mereka yang membutuhkannya baik melalui proses pewarisan, hibah, infaq, dan juga termasuk qurban. Langkah-langkah itu ditempuh dengan berpijak pada landasan niat dan tekad bahwa kita umat

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI-Yayasan Penerjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 835.

Islam, sudah seharusnya mewariskan sesuatu yang terbaik bagi generasi mendatang.

Senada dengan hal tersebut, M. Imam Zamroni mengungkapkan: "Tak kalah pentingnya bahwa tidak adanya diskriminasi antarwarga yang berkantong tebal dan yang berkantong tipis juga menjadi persoalan yang sangat krusial. Maka peningkatan subsidi pendidikan bagi kaum ekonomi menengah ke bawah adalah sebuah keharusan".<sup>15</sup>

## 2. Madrasah dan Tantangan Era Globalisasi

Trend globalisasi, menuntut setiap lapisan masyarakat untuk menyikapinya dengan hati-hati. Bagi perkembangan madrasah yang saat ini sedang berhadapan langsung dengan era baru tersebut, memerlukan penyikapian dari setiap gelombang yang dihasilkan oleh globalisasi yang secara langsung maupun tidak langsung menuntut masyarakat dan manusia pada umumnya umat Islam, untuk segera mengambil tindakan jitu dalam menghadapinya.

Dalam pandangan sosial, Anthony Giddens, misalnya, tidak mengecap globalisasi sebagai momok yang menakutkan, malah sebaliknya, globalisasi di satu sisi adalah keuntungan besar yang akan membawa masyarakat menuju era yang modern, teknologi canggih dan kehidupan yang mewah.

Yang menjadikan pertanyaan dalam analisa penulis dalam hal ini adalah: bagaimana sikap madrasah dalam menghadapi tantangan globalisasi yang menawarkan berbagai keuntungan besar dalam perspektif dunia ini? Tentunya para praktisi pendidikan memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut.

Masalah globalisasi sebenarnya bukan masalah baru bagi umat muslim Indonesia. Pembentukan masyarakat muslim Indonesia bahkan

---

<sup>15</sup> M. Imam Zamroni, "Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kecil (Rekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional Menuju Pendidikan Berbasis Kerakyatan)", dalam Imam Machali dan Musthofa (eds.), *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, (Yogyakarta: PRESMA Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga dan Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 220.



bersamaan dengan datangnya gelombang global yang besar dari Timur Tengah sejak akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Globalisasi yang terjadi masa itu lebih bersifat religio-intelektual. Namun yang menerjang umat muslim Indonesia sekarang ini adalah globalisasi yang bersumber dari barat dengan watak dan sifat ekonomi-politik dan sains-teknologi.<sup>16</sup>

Dalam mengurai era baru tersebut, lembaga pendidikan Indonesia ternyata telah memiliki tameng tebal yang dapat menyaring segala yang dihasilkan oleh gelombang besar globalisasi yakni berupa lembaga pendidikan madrasah dengan segala sistem yang membawahnya.

”Suatu kenyataan dan sekaligus keunggulan sistem pendidikan nasional dewasa ini adalah daya akomodatifnya dalam mengintegrasikan pranata-pranata pendidikan yang beragam ke dalam satu bangunan sistemik pendidikan nasional. Yakni, dengan kesediaan mengakui ciri-ciri khas yang dimiliki pranata masing-masing. Hal ini benar-benar menampilkan budaya simpatik jati diri bangsa yang berakar pada peradaban “Bhineka Tunggal Ika”. Betapa simpatiknya pengakuan bahwa “madrasah” (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah) merupakan sekolah umum yang berciri khas Islam dan menjadi bagian keseluruhan sistem pendidikan Nasional di negara kita. Pengakuan serupa ini secara kultural sungguh tepat, mengingat bangunan peradaban suatu bangsa bisa sangat kuat manakala bertumpu pada akar dan kesinambungan budaya. Pandangan keseharian, pandangan budaya, maupun pandangan ilmiah membenarkan kenyataan bahwa madrasah merupakan bagian dari tradisi pendidikan yang hidup di Indonesia”<sup>17</sup>

Dari pernyataan A. Malik fadjar di atas, Pendidikan Islam di Indonesia dan madrasah khususnya, pada saat ini sedang berada dalam tarik menarik antara peluang dan tantangan era globalisasi. Namun, eksistensi madrasah sangat bergantung pada sikap dalam menanggapi kemajuan demi kemajuan yang terjadi hingga saat ini. Karena globalisasi selain membawa dampak yang dapat mengembangkan kemakmuran perekonomian dan kemajuan Iptek, juga membawa dampak yang dapat menimbulkan krisis spiritual dan kepribadian yang memunculkan

---

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, *op. cit.*, hlm. 9.

kesenjangan dan kekerasan sosial. Oleh karenanya, Dalam setiap usaha untuk melakukan suatu perencanaan tentulah memerlukan konsep-konsep yang matang untuk mencapai tujuan yang tepat dan benar-benar menuju pada sasaran. Maka menurut A. Malik Fadjar, dalam mengembangkan madrasah diperlukan pemahaman-pemahaman ulang, penataan-penataan ulang, dan perencanaan-perencanaan ulang. Di antaranya adalah: a) makna harfiah madrasah, b) dimensi sejarah dan budaya, c) realitas dewasa ini, d) kebijakan menyongsong era globalisasi, dan e) membangun harapan.

#### **a. Makna Harfiah Madrasah**

Dalam memaknai madrasah, A. Malik Fadjar banyak menguraikannya dalam hampir setiap beliau membahas tentang pendidikan Islam dan khususnya tentang madrasah. Beliau menguraikan bahwa:

”Madrasah dalam khazanah kehidupan manusia Indonesia merupakan fenomena budaya yang telah berusia satu abad lebih. Bahkan, bukan satu hal yang berlebihan, madrasah telah menjadi salah satu wujud entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya. Secara berangsur namun pasti, ia telah memasuki arus utama pembangunan bangsa pada abad ke-21 ini”.<sup>17</sup>

Karena itu, membicarakan madrasah di Indonesia dalam kaitannya dengan sejarah munculnya lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seringkali tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai pesantren sebagai cikal-bakalnya. Dengan kata lain, madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karena itu menjadi penting untuk mengamati proses historis sebagai mata rantai yang menghubungkan perkembangan pesantren di masa lalu dengan munculnya madrasah di kemudian hari.

---

<sup>17</sup> A. Malik Fadjar, *op. cit.*, hlm. 15-16.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Betapa tidak, dalam kenyataan madrasah-madrasah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air adalah tempatnya para pejuang-pejuang Agama, pejuang ilmu pengetahuan dan pejuang bangsa yang telah banyak menjadikan anak-anak bangsa Indonesia mampu bertahan dan mengikuti era baru peradaban dunia saat ini, yakni era globalisasi. Memang pada kenyataannya:

”Madrasah bukan suatu yang *indigenous* (pribumi) dalam peta pendidikan di Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan oleh kata “madrasah” itu sendiri, yang berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah kata ini berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia “sekolah” (yang notabene juga bukan kata asli dari bahasa kita. “Sekolah” dialihkan dari bahasa asing, misalnya *school* ataupun *scola*)”.<sup>19</sup>

Madrasah memang bukanlah sebuah lembaga pendidikan Islam asli Indonesia. Namun kiprahnya untuk saat ini harus diakui bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang telah mampu menciptakan manusia-manusia yang *genuin* dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan telah tersebar di seluruh pelosok negeri yang lebih dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam jumlah yang tidak diragukan lagi.

”Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, dipimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik. Di lembaga ini anak memperoleh pembelajaran hal-ikhwal atau seluk-beluk Agama dan keagamaan. Sehingga dalam pelaksanaannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah Agama”.<sup>20</sup>

Dari pemaknaan di atas, A. Malik Fadjar memberikan kesimpulan bahwa:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

”Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah Agama, setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa diakui telah mengalami perubahan-perubahan walaupun tidak melepaskan diri dari makna asli sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam”.<sup>21</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan, secara harfiah madrasah bisa diartikan dengan sekolah, karena secara teknis keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar secara formal. Namun demikian Karel A. Steenbrink membedakan madrasah dan sekolah umum, karena keduanya mempunyai karakteristik atau ciri khas yang berbeda.<sup>22</sup> Madrasah memiliki kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah umum. Meskipun mengajarkan ilmu pengetahuan umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah, akan tetapi madrasah memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya. Sementara itu sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh dengan budaya Barat.

#### **b. Dimensi Sejarah dan Budaya**

Mencermati makna harfiah madrasah di atas, sebenarnya kita harus dapat mencermati terjadinya peristiwa ”okulasi” kebudayaan yang telah ada sejak dulu. Dimana madrasah merupakan sebuah ciri khas lembaga pendidikan umat Islam Indonesia yang berbeda dari lembaga-lembaga pendidika lain yang memiliki misi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Islami yang sanggup memasuki era globalisasi dengan kekuatan Imtak, Iptek, dan kekuatan budaya keislaman. Sebagaimana telah diuraikan oleh A. Malik Fadjar bahwa:

”Perjalanan sejarah bangsa telah mengentaskan suatu tatanan mozaik kebudayaan yang dapat kita gambarkan sebagai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>22</sup> Lihat: Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 88.

jajaran dan terkadang perpaduan tradisi-tradisi: a) tradisi prasejarah atau tradisi asli dan lokal; b) tradisi hindu-budha; c) tradisi Islam; dan d) tradisi barat atau modern. Keseluruhan tradisi ini telah menjadi unsur dari dan suatu ramuan yang kemudian membangun entitas budaya Indonesia. Pembangunan entitas budaya semenjak tahapan kemerdekaan, pada saat mencari dan mengukuhkan kebudayaan Nasional, sampai dengan tahapan kontemporer dewasa ini ketika pembangunan memasuki era industrialisasi, informasi, dan era globalisasi yang lazim pula disebut era kebangkitan Nasional II, telah mengalami pergumulan yang terkadang mencengangkan (dalam kadar tertentu sampai merambah ke ketegangan politis). Dapat diibaratkan, tatanan mozaik kebudayaan terus mengalami dinamika secara keberlanjutan. Unsur-unsur ataupun sub-sub entitas budaya tidak seluruhnya melebur dalam satu rumusan tunggal. Realitas kebhinekaan betapapun harus diterima dengan kelapangan dada”.<sup>23</sup>

Era globalisasi dengan berbagai tantangannya, imbasnya terhadap pengembangan madrasah yang pertama dan utama adalah masih menempelnya warisan kolonialism di tengah-tengah masyarakat indonesia. Dengan berbekal kerangka konseptual sejarah dan budaya sebagaimana disebutkan di atas, peneliti beranggapan bahwa pranata pendidikan Islam formal yang bernama madrasah adalah sebuah keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai *banker* sekaligus sebagai kekuatan umat Islam Indonesia. Walaupun madrasah bukanlah suatu yang *indigenous* (suatu yang asli dan ciri khas) dari bangsa Indonesia. Namun, harus diuraikan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki pangkal budaya lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia sebagaimana pondok pesantren yang telah dulu muncul sebelum adanya madrasah.

”Kalau kita mengkaji pranata pendidikan Islam, mestilah kita menatap pondok pesantren. Lembaga pendidikan pondok pesantren inilah yang oleh banyak peneliti, ilmuwan, ataupun budayawan dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki watak *indigenous*.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

Pondok pesantren dipandang sebagai perangkat sosialisasi dan enkulturasi yang memiliki kontribusi kebudayaan dengan lembaga pendidikan yang telah lama berakar, yang sering disebut mandala. Pola pembelajaran pondok pesantren tidak jauh berbeda dengan sistem yang berlaku pada lembaga pendidikan “asli” tersebut. Tentu dengan isi yang mulai berbeda, yakni memasukkan pelajaran atau ajaran “baru” yang kemudian dikenal sebagai Agama Islam”.<sup>24</sup>

Berangkat dari hal mencermati lembaga pendidikan pondok pesantren di atas, maka penemuan format pendidikan bernama madrasah dapat ditelusuri dengan berkembangnya pendidikan madrasah pada saat ini.

Format madrasah yang semakin maju dengan mengalami perubahan-perubahan hingga menjadi semakin jelas sosoknya. Hal ini kelak ditandai dengan muncul dan berkembangnya neosufisme dalam kehidupan Islam.<sup>25</sup> Dengan demikian dapat ambil pengertian melalui pemahaman dan pembenahan dimensi sejarah dan budaya lembaga-lembaga pendidikan Islam dari masa klasik hingga sekarang dapat diartikan sebagai ”pengawetan”<sup>26</sup> dalam istilah Azyumardi Azra untuk ilmu-ilmu keislaman. A. Malik Fadjar lebih lanjut menguraikan: Pengalihan khazanah peradaban barat ke wilayah Nusantara juga menjadi bagian tersendiri dari sejarah dan kehidupan bangsa. Proses ini berlangsung dalam kurun waktu panjang, sejalan dengan hegemoni politik Belanda atas negeri-negeri, pulau-pulau, atau wilayah-wilayah, bahkan seluruh kawasan nusantara yang di kemudian hari menjadi negara Indonesia. Hegemoni politik diwujudkan dalam bentuk pemerintahan jajahan, yang disebut pemerintah Hindia Belanda.

Untuk memenuhi tuntutan akan sumber daya manusia yang bisa menopang kebutuhan roda pemerintahan serta oleh dalih etis, pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan sekolah.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>26</sup> Azyumardi Azra, *op. cit.*, hlm. 62.

Intervensi pendidikan pemerintah Hindia Belanda menjadi intensif dan ekstensif selama beberapa dasawarsa dalam abad ke-20, sebelum mereka dikalahkan Jepang. Kebijakan “*ereschald*” atau “balas budi”, atau yang kemudian sangat terkenal dengan kebijakan politik etis, menjadi sangat berarti bagi perluasan pendidikan Barat di Indonesia”.<sup>27</sup>

Kemudian dapat disimpulkan bahwa:

Perkembangan pendidikan Barat sebagai buah dari intervensi budaya dan politik pemerintah Hindia Belanda dalam paropertama abad ke-20 ternyata berpengaruh pula terhadap pembentukan format madrasah. Gerakan internal pembaruan Islam sudah barang tentu merupakan variabel penting dalam pembentukan format madrasah. Ada dua kecenderungan yang dapat diidentifikasi.

Pertama, madrasah-madrasah *Diniyah-Salafiyah* terus tumbuh dan berkembang dengan pertambahan jumlah maupun penguatan kualitas sebagai lembaga *tafaqquh fid-din*, yakni lembaga untuk (semata-mata) mendalami Agama. Kedua, makin bermunculan madrasah-madrasah yang selain mengajarkan dan mendidikkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda, seperti Madrasah Adabiyah di Sumatra Barat, dan Madrasah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Pesantren Islam, PUI dan Nahdlatul Ulama. Bahkan menarik, ada pula madrasah yang sudah memasukkan ke dalam kegiatan kurikulumnya upaya membangun ekonomi kerakyatan di lingkungan umat Islam, seperti dilakukan oleh PUI di Majalengka. Pola-pola madrasah ini dapat ditemui sampai sekarang. Perubahan-perubahan mungkin sekali dialami oleh madrasah karena tuntutan penyesuaian maupun *reinvention* (penemuan kembali)”.<sup>28</sup>

Demikianlah hendaknya, melalui pemahaman dan pembenahan dimensi sejarah dan budaya yang telah tertanam dan berakar pada masyarakat Indonesia dapat dijaga dan dilestarikan melalui penemuan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

format pendidikan islam berupa madrasah yang sekarang telah tersebar luas di seluruh pelosok Nusantara.

**c. Realitas Dewasa Ini**

Memahami dan mencermati keadaan dan kondisi lembaga pendidikan Islam madrasah juga merupakan orientasi pengembangan madrasah dalam menghadapi tantangan perubahan era globalisasi saat ini. A. Malik Fadjar menguraikan:

”Bagaimana realitas madrasah dalam kurun Indonesia merdeka, setelah negeri ini melewati ulang tahun emas? Semua mengetahui bahwa madrasah merupakan realisasi pendidikan yang menampung aspirasi sosial-budaya-Agama penduduk Indonesia yang memeluk Agama Islam, yang secara kultural berakar kuat pada kelompok masyarakat yang disebut santri. Masyarakat menjatuhkan pilihannya pada madrasah bagi wahana pendidikan putra-putrinya tentu dengan dorongan yang berbeda-beda. Akan tetapi, secara umum dan kolektif, dorongan-dorongan tersebut, mencerminkan komitmen keagamaan yang kuat. Bisa terjadi mereka terpanggil oleh seruan hendaklah ada di antara kamu sebagian yang terpanggil untuk medalami Agama (QS. Al-Taubah [9]: 122)”<sup>29</sup>

Dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan para tokoh pendidikan di Indonesia, akhirnya madrasah sekarang telah berkembang sebagaimana kondisi saat ini yang digambarkan oleh A. Malik Fadjar:

”Madrasah dewasa ini berdiri secara berdampingan dengan sistem persekolahan yang lain. Sebagian besar organisasi madrasah disusun serupa dengan organisasi persekolahan. Secara bertingkat ada Madrasah Ibtidaiyah atau MI; ada Madrasah Tsanawiyah atau MTs; ada Madrasah Aliyah atau MA. Madrasah-madrasah itu tingkat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.



kesederajatannya sama dengan SD, SLTP, dan SMU. Komposisi mata pelajaran di madrasah mencakup komponen-komponen mata pelajaran Agama, seperti Al-Quran, hadis, fiqih, akidah dan akhlak, sejarah kebudayaan Islam, serta bahasa Arab. Komponen-komponen mata pelajaran ilmu sosial mencakup geografi, sejarah, pendidikan moral Pancasila, sosiologi, dan antropologi. Komponen-komponen mata pelajaran eksakta mencakup ilmu pengetahuan alam, kimia, fisika, biologi, dan matematika. Selain itu, ada pula mata pelajaran seperti pendidikan olah raga dan kesehatan, kesenian, bahasa, (Indonesia maupun Inggris), dan keterampilan”.<sup>30</sup>

Hingga akhirnya, pada tahun terakhir (2007) dapat diketahui madrasah-madrasah yang tersebar di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia jumlahnya dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga madrasah Aliyah adalah: 736.412, termasuk didalamnya RA dan Madin. Jumlah madrasah-madrasah yang disebutkan di atas, 96% lebih dari jumlah itu merupakan madrasah swasta.

Diakui bahwa pertumbuhan dan perkembangan sekolah yang berada dalam wilayah supervisi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Departemen Pendidikan Nasional (serta Departemen Dalam Negeri) cukup menggembirakan. Cukup menarik bahwa pertumbuhan itu dibarengi dengan makin banyak berdiri Madrasah-madrasah Diniyah, yakni madrasah-madrasah yang keseluruhan mata pelajarannya adalah mata pelajaran Agama. Dapat dipahami bahwa pertumbuhan madrasah-madrasah diniyah, yang saat ini jumlahnya berkisar 38.085, mengekspresikan tuntutan aspirasi masyarakat agar putra-putri mereka mengenyam pelajaran dan pendidikan Agama lebih banyak. Mereka umumnya merasa bahwa

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

pelajaran dan pendidikan Agama di sekolah-sekolah umum tempat putra-putri mereka belajar belum cukup.

Dalam kenyataan ini A. Malik Fadjar mengutarakan bahwa:

”Realitas lain yang tidak bisa diabaikan adalah banyaknya penyelenggaraan MI, MTs, dan MA yang berada dalam naungan pesantren atau Pondok Pesantren. Madrasah-madrasah serupa ini menciptakan satu mekanisme tersendiri guna menutupi kekurangan pelajaran dan pendidikan Agama dalam kurikulum madrasah. Seperti sering terlontar di tengah-tengah masyarakat, kurikulum madrasah sekarang ini sangat memungkinkan para siswanya mendapatkan ilmu pengetahuan Agama yang jauh dari memadai serta pemahaman dan penghayatan Islam yang dangkal. Madrasah yang berada dalam naungan pondok pesantren memberikan kesempatan kepada para siswanya (santri) untuk menambah kekurangan ilmu pengetahuan Agama melalui pengajian-pengajian kitab di luar jam madrasah dibawah bimbingan para kiai atau ustadz. Dengan tinggal di pondok pesantren, siswa madrasah dapat memperoleh bimbingan dan kesempatan menjalankan Agama lebih intensif”.<sup>31</sup>

Demikianlah realitas madrasah menampilkan sosok beragam sebagai dampak diversifikasi pendidikan yang berlangsung di dalamnya.

#### **d. Kebijakan Menyongsong Era Globalisasi**

“Mengawali” perubahan madrasah selama masa Indonesia merdeka, sebegitu jauh departemen Agama berusaha mengembangkan intervensi terencana untuk menjadikan madrasah fungsional sebagai salah satu lembaga layanan pendidikan bagi penduduk muslim Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Tidak seluruh kebijakan lahir dengan gampang. Ia harus memiliki kekuatan tawar-menawar kultural dan, dalam kadar tertentu,

bisa bersifat politis. Sekurang-kurangnya untuk melahirkan kebijakan madrasah perlu diakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat.

Demikian A. Malik Fadjar menguraikan tentang alur dan proses kebijakan dalam menyongsong perubahan ini dengan penuh pertimbangan. Antara lain sebagaimana beliau menjelaskan:

”Apa pun perubahan-perubahan yang ingin disongsong, kebijakan-kebijakan mengembangkan madrasah perlu mengakomodasikan tiga kepentingan. Kepentingan pertama adalah bagaimana kebijakan itu pada dasarnya harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam. Yakni, menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman. Dengan jargon santri dapat kita katakan bahwa madrasah didirikan untuk menanamkan dan menumbuhkan Akidah Islamiah putra-putri umat dan bangsa. Lebih dari itu, diharapkan agar madrasah dapat melahirkan golongan terpelajar yang bisa menjalankan peran *tafaqquh fid-din*.

Kepentingan kedua adalah bagaimana kebijakan itu memperjelas dan ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif, sederajat dengan sistem sekolah. Porsi dari kebijakan ini tidak lain agar pendidikan madrasah sanggup mengantarkan peserta didik memiliki penguasaan *the basic* secara memadai, yaitu penguasaan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam bidang bahasa, matematika, fisika, kimia biologi, ilmu pengetahuan sosial dan pengetahuan kewarganegaraan. Madrasah juga merupakan tempat persemaian yang baik untuk menumbuhkan kreativitas seni, serta juga sebagai tempat berlatih dalam mengembangkan keterampilan bekerja.

Kepentingan ketiga adalah bagaimana kebijakan itu bisa menjadikan madrasah dapat merespon tuntutan-tuntutan masa depan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Untuk ini madrasah perlu diarahkan kepada lembaga yang sanggup melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, era industrialisasi, ataupun era informasi. Secara kultural tugas ini bisa sangat menegangkan sebab tuntutan masa depan terkadang mengancam segmen dasar institusi yang memiliki kepentingan keagamaan”.<sup>32</sup>

#### e. Membangun Harapan

Melihat perkembangan madrasah dan realitasnya dewasa ini, diharapkan madrasah dapat menjawab tantangan-tantangan era globalisasi saat ini dengan segala kemampuan dan kemajemukan yang terdapat di dalamnya. A. Malik Fadjar secara panjang lebar menguraikan:

”Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional telah digulirkan dan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur keberadaan madrasah telah diterbitkan. Berdasarkan ketentuan perundangan ini, maka madrasah, sejak dari tingkat ibtidaiyah sampai dengan tingkat aliyah, ditempatkan dalam kedudukan yang sama dengan sekolah-sekolah umum. Perbedaan terletak pada ciri khas Islam yang dikenakan kepada sistem madrasah. Ini tentu lebih mengukuhkan filosofi untuk mengakomodasikan kepentingan keagamaan dengan kepentingan kewarganegaraan.

Secara sah kita dapat menggantungkan harapan agar putra-putri bangsa “yang menjadi pusat input madrasah” diolah menjadi sumber daya manusia yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara memadai, serta daya kreativitas yang tinggi pula. Pada gilirannya diharapkan kaum terpelajar keluaran madrasah ini sanggup menjadi sumber daya manusia Indonesia yang bisa merespon masa depannya secara tepat”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

Demikian hendaknya prosedur dan proses pengembangan madrasah diharapkan mampu menghadapi dan menjawab tantangan era globalisasi di Indonesia untuk kemajuan ilmu pengetahuan, agama, dan kesatuan bangsa Indonesia.

## **B. Kebijakan-Kebijakan Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi**

Pada era globalisasi yang semakin jauh merambah dalam semua sektor kehidupan, madrasah sebagai lembaga pendidikan tentunya tidak luput dari perkembangan zaman yang sekarang disebut sebagai era globalisasi. A. Malik Fadjar dengan tegas pernah mengamanatkan;

”Agar lembaga-lembaga pendidikan juga kokoh dalam pengembangannya tidak lagi serba sentralistis, maka kita beri mandat pada lembaga-lembaga pendidikan formal dengan istilah manajemen berbasis sekolah. Artinya lembaga-lembaga pendidikan ini lebih diberi kekuatan secara otonomi dalam mengelola dan mengembangkan misi-misi maupun proses menuju kualitasnya.

Dari hal tersebut, ada tiga tantangan berat yang sedang kita hadapi saat ini. *Pertama*, bagaimana mempertahankan dari serangan krisis yang sekarang. Apa yang kita capai jangan sampai hilang. Karena itu kalau ada yang sifatnya darurat, juga kita tempuh dengan *emergency*. Seperti anak-anak gelandangan, anak-anak pengungsi, kebanjiran kita beri beasiswa, dan sebagainya. *Kedua*, tidak bisa diingkari bahwa kita berada dalam suasana global di bidang pendidikan. Kompetisi itu adalah niscaya. Baik kompetisi secara Nasional, regional maupun internasional. Sekarang kita kompetisi dengan Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagainya. *Ketiga*, hal lain yang tidak bisa tidak harus kita jawab adalah demokratisasi, otonomi, desentralisasi. Kita juga harus menghargai keberagaman kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan sekolah-sekolah”.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc. di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Juni 2008.

A. Malik Fadjar, mengatakan mengelola pendidikan adalah mengelola masa depan, yang berarti juga mengelola informasi. Orang yang bisa mengelola informasi akan memperoleh keberhasilan yang lebih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional (UUSPN), pendidikan di Indonesia dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan teknis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan Nasional dengan seluruh usaha pembangunan Nasional (penjelasan UUSPN, Umum, alenia VII). Dengan sifatnya yang menyeluruh, semua bentuk kegiatan pendidikan di Indonesia tercakup dalam sistem pendidikan Nasional, termasuk pendidikan di madrasah dan pondok pesantren yang diselenggarakan atau dibina oleh departemen Agama dan selama ini lebih dikenal sebagai lembaga perguruan Agama Islam.

Masuknya madrasah dan pondok pesantren ke dalam kesatuan sistem pendidikan Nasional mengharuskan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan dan pembinaan dengan ketentuan dan pokok pikiran yang terdapat dalam UUSPN dan semua peraturan pelaksanaannya.

Di antara ketentuan tersebut adalah ketentuan pasal 14 UUSPN, yang menetapkan bahwa anak yang telah menginjak umur tujuh tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.<sup>35</sup> Sebagai konsekuensi kebijaksanaan yang menetapkan bahwa semua anak usia antara 7-15 tahun harus mengikuti pendidikan dasar, semua lembaga yang menampung anak didik usia antara 7-15 tahun harus menjual bagian pendidikan dasar secara penuh termasuk madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah. Konsekuensi ini telah tertuang dalam peraturan perundangan, yaitu; pada pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tentang pendidikan dasar yang menetapkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah adalah SD dan SLTP yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

---

<sup>35</sup> A. Mlik Fadjar, *op. cit.*, hlm. 66.

Sebagai realisasi PP No. 28/ 1990, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan No. 0487/U/1992 dan No. 054/U/1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SLTP. Ini tidak berarti ada perbedaan lagi antara MI/MTs dengan SD/SLTP selain ciri khas Agama Islam pada MI/MTs.

Dalam rangka menindaklanjuti SK-SK Mendikbud tersebut, telah dikeluarkan keputusan Menteri Agama No. 369/1993, masing-masing tentang penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Penetapan madrasah menjadi sekolah umum juga dilakukan terhadap Madrasah Aliyah (MA), sebagai satuan dalam jalur pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Peraturan Pemerintah yang mengatur pendidikan menengah adalah PP No. 29/1990 tentang pendidikan menengah. Dalam PP No. 29 tersebut ditegaskan bahwa jenjang pendidikan menengah, terdapat lima bentuk satuan pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Keagamaan, Sekolah Menengah Kedinasan, dan Sekolah Menengah Luar Biasa.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/1992 tentang Sekolah Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama ditegaskan bahwa "Madrasah Aliyah wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan Sekolah Menengah Umum (SMU)". Selain MA sebagai SMU berciri khas Agama Islam yang penyelenggaraannya didasarkan pada SK Mendikbud No. 0489/U/1992, departemen Agama juga berkewajiban menyelenggarakan Sekolah Menengah Keagamaan berdasarkan pada PP No. 29/1990 pasal 11 ayat (2) yang menegaskan; "Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri (Pendidikan dan Kebudayaan) kepada Menteri Agama". Sekolah Menengah Keagamaan ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 371/1993 dinamakan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

Pada tingkat pendidikan sekolah, departemen Agama menyelenggarakan Raudlatul Athfal/ Bustanul Athfal (RA/BA) yang keberadaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Agama No. 367/1993. dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa RA/BA adalah taman kanak-kanak berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Di samping satuan pendidikan dalam bentuk Madrasah, Departemen Agama juga melaksanakan pembinaan terhadap Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Berdasarkan ketentuan tentang jalur pendidikan, pondok pesantren, dalam arti satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara individual, tidak berjenjang dan berkesinambungan; berada pada jalur pendidikan luar sekolah. Akan tetapi, pondok pesantren dalam arti kampus pendidikan juga menyelenggarakan satuan pendidikan jalur pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan secara berjenjang.

Dengan demikian, pada jalur pendidikan sekolah, satuan pendidikan pada tingkat prasekolah, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang pembinaannya dilakukan oleh Ditjen Binbaga Islam adalah: Raudlatul Athfal/ Bustanul Athfal, sebagai taman kanak-kanak berciri khas Agama Islam; Madrasah Ibtidaiyah (MI), sebagai sekolah dasar yang berciri khas Agama Islam; Madrasah Tsanawiyah (MTs), sebagai sekolah lanjutan pertama yang berciri khas Agama Islam; Madrasah Aliyah (MA), sebagai sekolah lanjutan atas yang berciri khas Agama Islam; Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), sebagai sekolah menengah keagamaan.

Pada jalur pendidikan luar sekolah, satuan pendidikan yang pembinaannya dilakukan oleh Dirjen Binbaga Islam adalah: Pendidikan keagamaan di pondok pesantren yang dilakukan secara individual, dan Madrasah Diniyah.

Kemudian, untuk lebih memacu pengembangan dan kemajuan madrasah swasta, telah ditempuh upaya penentuan status madrasah swasta yang lazim disebut Akreditasi. Ketentuan tentang akreditasi madrasah swasta ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 310/1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan



Agama Islam, sedangkan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 29/E/1990 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta.<sup>36</sup>

Tujuan dilakukannya akreditasi terhadap madrasah swasta adalah:

1. Mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan melalui:
  - a. Pembakuan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Tenaga kependidikan yang berkualitas.
  - c. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang baik.
2. Mendorong terciptanya dan terpeliharanyaketahanan madrasah dan lingkungannya.
3. Mendapatkan bahan-bahan bagi perencanaan dalam rangka pembinaan madrasah yang bersangkutan.
4. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggungjawab.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan madrasah.
6. Memudahkan pengaturan mutasi murid/siswa.

Akreditasi terhadap madrasah swasta itu dilaksanakan terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang meliputi komponen-komponen: kelembagaan kurikulum, administrasi sekolah, ketenagaan, murid/siswa, sarana/prasarana, dan situasi madrasah. Berdasarkan akreditasi terhadap komponen-komponen tersebut, ditetapkan jenjang status madrasah swasta, terdiri dari; status terdaftar, diakui, dan disamakan.

Jumlah madrasah swasta yang sudah dinilai untuk penetapan jenjang akreditasinya masih kecil, bahkan di beberapa daerah tertentu belum ada sama sekali. Tampaknya, kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi ini adalah terbatasnya dana.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 79-81.

Bertitik tolak dari keadaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan perguruan Agama Islam seperti diuraikan di atas, maka kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah dan pondok pesantren sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkemampuan memadai, sesuai dengan jenis dan jenjang.
2. Mengupayakan peningkatan efektivitas peranan madrasah negeri sebagai model dan sebagai pengendali mutu pendidikan di madrasah.
3. Mengembangkan program pendidikan dan meningkatkan kemampuan madrasah dalam melaksanakan perannya sebagai sekolah umum yang berciri khas Agama Islam sehingga dicapai keterpaduan dan keserasian dalam pembinaan dan penyelenggaraan madrasah dalam kesatuan sistem pendidikan Nasional.
4. Meningkatkan mutu dan kemampuan madrasah aliyah keagamaan dalam menyiapkan lulusannya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik sebagai bagian dari pendidikan calon ulama dan pemimpin islam, maupun untuk terjun ke masyarakat sebagai tenaga menengah di bidang pelayanan keagamaan.
5. Meningkatkan kemampuan kualitatif dan memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan terutama guru, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mutu pendidikan di madrasah.
6. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana serta mengembangkan organisasi dan tata kerja untuk mendukung tercapainya efesiensi kerja dalam rangka menetapkan fungsi perguruan Agama Islam.
7. Meningkatkan kemampuan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dalam melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 95-99.

8. Meningkatkan kemampuan madrasah swasta agar dapat memberikan peranannya yang lebih besar sebagai mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi dan pemerataan pendidikan menengah.

Dengan memperhatikan keadaan sosial masyarakat dan permasalahan serta kebijakan tersebut, disusunlah program-program yang secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penegerian Madrasah.
2. Akreditasi Madrasah Swasta.
3. Pengembangan Perangkat Kurikulum Madrasah.
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana.
5. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Guru.
6. Peningkatan Kualitas Guru.
7. Bantuan-bantuan Madrasah Swasta dan Pondok Pesantren.
8. Peningkatan Kemampuan Pembina Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah.
9. Pengembangan Program Keterampilan pada Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren.
10. Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektoral
11. Peningkatan Pelaksanaan Supervisi, Pemantauan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pendidikan di Madrasah dan Pondok Pesantren.

Lebih lanjut dalam meneruskan langkah-langkah kebijakan dan program di atas, sesuai yang di kemukakan oleh A. Malik Fadjar, bahwa di Departemen Agama dan Pendidikan Nasional sebagai Departemen yang pernah dipimpin A. Malik Fadjar juga masih melakukan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang beliau cetuskan semasa memimpin di Departemen tersebut. Di antaranya adalah langkah dan tindak lanjut yang difokuskan pada perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perluasan akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, serta masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), termasuk BOS buku, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD-MI dan SMP-MTs, pembangunan sarana, prasarana, pembangunan pusat sumber belajar berbasis TIK, dan peningkatan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil.
2. Perbaiki distribusi guru, meningkatkan kualitas pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, perbaikan dan peningkatan efektivitas manajemen sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, peyeimbangan dan pemerataan distribusi penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, reformasi pendidikan profesi pendidik, pelaksanaan sistem pengukuran dan akuntabilitas kinerja pendidik dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan perlindungan, serta pendayagunaan jejaring komunitas guru yang memungkinkan para pendidik dan tenaga kependidikan meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan dan terstandar.
3. Peningkatan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan menengah seluas-luasnya, baik melalui jalur formal maupun nonformal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan termasuk pusat sumber belajar berbasis TIK, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.

4. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan otonomi perguruan tinggi, peningkatan intensitas dan kualitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan pascasarjana baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (*literate society*).
6. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan untuk mencapai standar nasional pelayanan pendidikan secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
7. Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan perawatan anak usia dini yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dan peningkatan peran serta masyarakat.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan prinsip *good governance* termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam rangka mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendidikan. Sejalan dengan itu, anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk bantuan sosial atau imbal swadaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
10. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan melalui: (a) pelatihan pengelola perpustakaan dan taman bacaan; (b) pengembangan

model layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling dan perpustakaan elektronik; (c) supervisi, pembinaan dan stimulasi pada semua jenis perpustakaan; (d) penyusunan program pengembangan perpustakaan; (e) penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah; (f) pelatihan cara penulisan kesastraan dan penelitian kebahasaan; (g) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kepustakaan; (h) pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar; serta (j) publikasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis meneliti dan menganalisa pemikiran A. Malik Fadjar dengan memperhatikan riwayat hidup, karier dan prestasi serta karya-karya yang beliau hasilkan dari jerih payah pemikirannya sebagaimana disebutkan di depan, A. Malik Fadjar merupakan seorang tokoh yang memiliki corak pemikiran dan ciri khas sebagai seorang tokoh pendidikan di Indonesia. Corak dan cirri khas pemikiran beliau antara lain adalah sebagaimana berikut:

1. A. Malik Fadjar adalah seorang tokoh yang memiliki pemikiran futuristic dan visioner, Hal ini terlihat dari seluruh gagasan dan pemikirannya yang selalu memiliki implikasi terhadap perbaikan dunia pendidikan Islam khususnya adalah madrasah dalam keadaannya sekarang ini dan mngacu pada pencitraan masa depan.
2. Cakupan pemikirannya mengenai pengembangan madrasah pada era globalisasi, beliau memiliki corak *Teo-Institutis* (Teoretis-Institutif/ Kombinasi). Beliau berbicara pada hampir semua aspek yang terdapat gagasan dan pemikirannya dalam pengembangan madrasah tampak segar, orisinal dan aktual. Beliau sangat piawai berbicara perihal persoalan madrasah. Ia mengungkap adanya peluang dan tantangan madrasah pada era globalisasi, serta kebijakan dan program yang dicanangkan untuk pengembangan madrasah pada era globalisasi.
3. Langkah-langkah beliau dalam mengambil setiap keputusan untuk dijadikan kebijakan dalam kepemimpinan beliau di beberapa Departemen dalam Pemerintahan Pusat, walaupun banyak menuai kritik serta penolakan dari berbagai kalangan di Masyarakat, ternyata mampu dipahami dan diterima oleh masyarakat, bangsa dan Negara hingga sampai sekarang banyak gagasan-gagasan beliau yang masih relevan dan dijalankan pada pemerintahan sekarang ini.

Dari corak-corak pemikiran A. Malik Fadjar, sebagaimana disebutkan di atas, A. Malik Fadjar adalah seorang tokoh Nasional yang benar-benar mampu mengartikulasikan dirinya dalam tiga dimensi sekaligus; yaitu sebagai cendekiawan, intelektual dan pengabdian. Gagasan-gagasan beliau yang segar khususnya mengenai madrasah yang telah banyak dipublikasikan di berbagai media, dan gagasan segarnya mengenai pendidikan masa depan benar-benar menggambarkan komitmen dan dedikasi beliau sebagai figur dalam artikulasi tiga dimensi tersebut.

Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa pada diri A. Malik Fadjar terdapat akumulasi pribadi yang utuh sehingga mampu mengkomunikasikan tiga kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan umat, kepentingan pemerintah, dan kepentingan pribadi dan keluarganya.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis mengetahui corak pemikiran A. Malik Fadjar dalam pengembangan Madrasah pada era globalisasi di Indonesia, maka perkenankan penulis untuk menyampaikan beberapa pesan atau saran-saran:

1. A. Malik Fadjar adalah tokoh Agama sekaligus tokoh Nasional yang dikenal sebagai seorang pendidik, politisi, dan organisatoris yang berangkat dari keluarga pendidik yang menjadi pembaru dalam bidang pendidikan Nasional. Oleh karena itu, para pelaku pendidikan hendaknya mengikuti jejak beliau yang mampu melintasi kemajuan zaman dengan turut serta tampil dalam mengatasi dan menentukan arah perkembangan nasib anak bangsa. Para pelaku pendidikan tidak boleh berkecil hati, akan tetapi harus mampu berkiprah dan bersaing dalam kehidupan masa kini dan yang akan datang.
2. Para pengelola lembaga pendidikan madrasah haruslah menyadari bahwa yang terpenting dalam penyelenggaraan madrasah adalah pengelolaan yang semaksimal mungkin dengan disertai penghayatan nilai-nilai keagamaan yang sepenuhnya. Agar pendidikan di madrasah dapat dipercaya oleh Masyarakat luas dan menghasilkan lulusan yang kompeten



dengan Imtak dan Iptek untuk menyelami arus perkembangan zaman termasuk globalisasi saat ini.

3. Sebagai seorang muslim yang taat pada ajaran Islam, sebaiknya perlu mengkaji dan menggali konsep-konsep pendidikan Islam sekaligus mengamalkannya dalam mendidik generasi-generasi mendatang; yaitu dengan mengambil dari pemikiran tokoh pendidikan Islam sehingga dapat diterapkan dan dijadikan pertimbangan pemikiran dalam menentukan arah pendidikan Islam yang baik untuk dikembangkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

### **C. Kata Penutup**

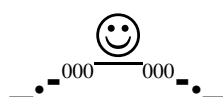
Segala Pujian hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya, memberikan perlindungan dan bimbingan-Nya serta memberikan kasih dan sayang-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S.1) yang berjudul “Corak Pemikiran A. Malik Fadjar Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi Di Indonesia (Studi Pemikiran Tokoh Pendidikan)”. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman gelap gulita menuju jalan terang benderang.

Ucapan berribu-ribu terima kasih penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu jalannya penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat memberikan apa pun kecuali hanya ucapan syukur dan semoga Allah membalas amal-amal baik yang telah kita lakukan untuk kemajuan ilmu, Agama, Bangsa dan Negara. Terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Malik Fadjar, M.Sc., yang telah memberikan waktunya dalam penelitian ini, Bpk. Drs.H. Abdul Mu'thi, M.Ed., yang telah mendukung dan mempertemukan penulis dengan Pak Malik dan Ade' tersayang yang telah memberikan waktunya menemani dan mendampingi dalam penulisan.

Sebagaimana manusia biasa yang tidak mungkin sempurna, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna,

banyak kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Kemudian saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan, demi kesempurnaan penulisan-penulisan berikutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga langkah-langkah penulis mendapatkan *ridlo* Allah. *Amin.*[]



**\*TAMAT\***



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. Masyhur dan Ismail S. Ahmad (eds.), *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSMNU, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azizy, A. Qodri, *Islam Dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta (Kajian Historis-Normatif)*, Makalah, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 5, 2004.
- Azra, Azyumardi, *Esei-Esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.
- Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Barizi, Ahmad (ed.), *Holistika Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Burhan, Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- CD-ROM Hadits, *Sunan Abu Dawud*.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1994.
- Departemen Agama RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi/ IAIN Jakarta, 1992/1993.

- Dyke, Vernon van, *Political Science: A Philosophical Analysis*, Stanford: Stanford, University Press, 1960.
- Fadjar, A. Malik, *Madrasah Dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. 2, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
- Faisal, Sanapiah, dan Mulyadi Guntur Warseso (Peny.), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasioanl, 1982.
- Feisal, Jusuf Amir, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2004.
- Hasan Langulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, Cet. 2, 1988.
- <http://Kompas.com/kompas-cetak/0406/28/humaniora/1112151/htm>. Diakses pada: Jum'at, 12 Mei 2006.
- <http://Kompas.com/kompas-cetak/0406/28/humaniora/1112151/htm>. Diakses pada: Jum'at, 22 Desember 2006.
- [http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insindex.php?i\\_367=st01](http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insindex.php?i_367=st01) Diakses pada tanggal, 04 Mei 2008.
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/31/dikbud/foto09.htm>. diakses pada 15 mei 2007.
- <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/a/abdul-malik-fadjar/index.shtml>. Diakses pada hari Selasa, 15 Mei 2007. 12: 15 WIB.
- <http://www.wikipedia/freensiklopedia.com/madrasah/html>. Diakses pada: Selasa, 15 Mei 2007.
- Idi, Abdullah dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Indra, Hasbi, *Pesantren dan Transformasi Sosial: Studi atas Pemikiran K.H. Abdullah Syafi'i Dalam Bidang Pendidikan Islam*, Jakarta: PENAMADANI, 2003.
- Iqbal, Muhammad, *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, alih bahasa Ali Audah, dkk., Jakarta: Tintamas, Cet. 1, 1966.

- Ismail, SM, Nurul Huda, Abdul Kholiq, (eds.), *Dinamika Pesantren Dan Madrasah*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002.
- Machali, Imam dan Musthofa (eds.), *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: PRESMA Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga dan Ar-Ruzz Media, 2004.
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1999.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Masyhur, M. Amin dan Ismail S. Ahmad (eds.), *Dialog Pemikiran Islam Dan Realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSMNU, 1993).
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Kerjasama PSAPM Surabaya dan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004.
- Nahlawi, Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, alih bahasa: Joko S. Kahhar dan Supriyanto, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 1, 1994.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa dan Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Nata, Abudin, Ahmad Sulhi Chotib (ed.), *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995.
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Oxford University, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: University Press, Cet. 6, 2001.
- Pardoyo, *Sekularisasi Dalam Polemik*, Jakarta: Graffiti, 1993.
- Poerbakawatja, Soegarda, *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung, 1970.

- Rahim, Husni, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Depag RI, 1996.
- Shaleh, Abdul Rachman, *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI-Yayasan Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971.
- Steenbrink, Karl A., *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, Cet. 2, 1994.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syarif, Mustofa dan Juanda Abubakar, (eds.), *Visi Pembaruan Pendidikan Islam H. A. Malik Fadjar*, Jakarta: LP3NI, 1998.
- TIM Penyusun Ensoklopedi Muhammadiyah, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, Cet. 2, 2005.
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Bandung: Citra Umbara, 2006.
- [www.sociologyonline.co.uk/GlobalGiddens1.htm](http://www.sociologyonline.co.uk/GlobalGiddens1.htm). Diakses pada hari/tanggal: Jum'at, 22 Desember 2006.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Zuhri, K. H. Saifuddin, *Secercah Da'wah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Zuhri, K.H. Saifuddin, *Berangkat Dari Pesantren*, Jakarta: Gunung Agung, 1997.
- Zuhri, K.H. Saifuddin, *Kaledeskop Politik di Indonesia*, Jilid II, Jakarta: Gunung Agung, 1983.